Kerjasama
Balitbang Kabupaten Lahat
Dengan
Universitas Airlangga Surabaya

Laporan Pendahuluan

KAJIAN PENGUATAN INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LAHAT

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara serta menjadikannya sebagai ladang ibadah menuai pahala dan Ridho Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya pula kami dapat mengajukan laporan "Kajian Penguatan Layanan Infrastruktur Kabupaten Lahat Tahun 2023" dengan baik.

Tujuan dari penyusunan penguatan Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lahat ini adalah: a. Menganalisa unsur-unsurpelayanan infrastruktur yang dapat memberikan kepuasaan masyarakat. b. Menganalisa Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukturdan tingkat kesenjangan antara kualitas dan harapan masyarakat akan pelayanan infrastruktur. c. Merumuskan prioritas peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Lahat.

Penilaian unsur pelayanan infrastruktur dikembangkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) selanjutnya dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dari jenis infrstruktur yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong penyelenggara pelayanan (pemerintah) untuk meningkatkan kualitas pelayanannya

Harapan kami semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Lahat. Semoga informasi dari kajian ini kemudian benar-benar dapat dipakai dalam merumuskan solusi alternatif bagi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, sehingga dapat memberikan sumbangan yang kontributif bagi pembangunan Kabupaten Lahat.

Surabaya, 2023

UNAIR

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Sasaran 7
BAB II DASAR HUKUM DAN KAJIAN TEORI 8
2.1. Dasar Hukum 8
2.2. Kajian Teori 9
2.2.1. Infrastruktur 9
2.2.2. Jenis Infrastruktur 12
2.2.3. Pengembangan Infrastruktur 19
2.2.4. Karakteristik Infrastruktur 22
2.2.5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 38
2.3. Pengertian Pelayanan Publik 53
2.4. Kesenjangan Kualitas Pelayanan Publik 54
BAB III METODE KEGIATAN 73
3.1. Tahapan 74
3.1.1. Review Hasil tahun sebelumnya 74
3.2. Jenis Penelitian dan Metode 78
3.2.1. Metode dan Teknik 78
3.2.2. Alat Pengumpul dan Pengolah Data 79
3.3. Populasi dan Sampel 79
3.3.1. Metode Pengambilan Sampel 81
3.4. Waktu dan Tempat Penelitian 82
3.5. Variabel 83
3.6. Teknik Pengumpulan Data 85
3.7. Jenis dan Sumber Data 85
3.8. Pengolahan Data dan Analisis Survey 86
3.9. Data Analisa 88
Bab IV Gambaran Kabupaten Lahat 89
4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 89
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 89
4.2 Demografi 111

4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 113
4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... 131
4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM..... 134
4.5 FOKUS URUSAN DASAR 141
4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 156
Bab V Hasil Kegiatan..... 164
5.1 Sebaran Responden 164
5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan 164
5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur.... 169
5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 170
5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku 174
5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir 177
5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama..... 181
5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan 183
5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan 188
5.4. Perhitungan IKLI..... 191
Bab VI Penutup 208
DAFTAR PUSTAKA..... 210

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang tersebar disepanjang katulistiwa, negara Republik Indonesia memiliki karakteristik yang khas, baik dalam dimensi geografis, sosiologi bahkan sosial budaya. Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya kultural diyakini sampai saat ini belum digali dan dikembangkan secara optimal. Upaya peningkatan dan optimalisasi potensi yang selama ini dilakukan dirasakan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Adanya kendala, baik itu pada aspek sumber daya manusia, aspek kemampuan pendanaan, kualitas manajemen serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berkurangnya percepatan (akselerasi) peningkatan optimalisasi, untuk meningkatkan akselerasi tersebut diperlukan peningkatan dan pengembangan infrastruktur pembangunan nasional. Infrastruktur mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam konteks peran dan sumbangannya dalam pembangunan nasional. Salah satu komponen penting dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur adalah pengembangan kinerja sarana dan prasarana infrastruktur itu sendiri.

Salah satu unsur utama kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi adalah penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti: ketenagalistrikan, penyediaan air minum, telekomunikasi, sarana jalan, dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur sebagai komoditas yang berdimensi publik (public goods) merupakan tanggung jawab pemerintah. Artinya, pemerintah terlibat secara langsung di dalam penyediaan infrastruktur sebagai pelengkap di dalam sistem ekonomi yang berlangsung di dalam suatu kelompok masyarakat atau negara.

Pengelolaan infrastruktur yang kurang optimal, mempunyai implikasi bahwa provinsi dengan kualitas infrastruktur rendah akan sulit berkompetisi dalam menarik investor asing dibandingkan provinsi lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas agenda pembangunan di Kabupaten Lahat, yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan infrastruktur di Lahat antara lain meliputi : penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembukaan keterisolasian wilayah, perbaikan dan peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur irigasi untuk pertanian dan air baku.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastuktur merupakan modal yang sangat di butuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungan kegitan antar daerah/wilayah, infrastruktur fisik mempunyai keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan system infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Dokumen perencanaan yang baik sudah seharusnya memenuhi kriteria SMART, yakni Spesific (jelas dan terarah), Measureable (dapat

diukur), Attainable (dapat dicapai), Realistic (realistis, dapat dicapai), Timely (ada batasan waktu). Measureable (terukur) memiliki pengertian bahwa dokumen perencanaan harus dapat diukur pencapaiannya melalui taret-target yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Target ini dijabarkan melalui indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator sasaran ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga sasaran kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Secara teknis pada dasarnya indikator dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Lahat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Salah satu unsur utama kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi adalah penyediaan infrastruktur yang

memadai, seperti: ketenagalistrikan, penyediaan air minum, telekomunikasi, sarana jalan, dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur sebagai komoditas yang berdimensi publik (public goods) merupakan tanggung jawab pemerintah. Artinya, pemerintah terlibat secara langsung di dalam penyediaan infrastruktur sebagai pelengkap di dalam sistem ekonomi yang berlangsung di dalam suatu kelompok masyarakat atau negara.

Pengelolaan infrastruktur yang kurang optimal, mempunyai implikasi bahwa provinsi dengan kualitas infrastruktur rendah akan sulit berkompetisi dalam menarik investor asing dibandingkan provinsi lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas agenda pembangunan di Kabupaten Lahat, yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan infrastruktur di Lahat antara lain meliputi : penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembukaan keterisolasian wilayah, perbaikan dan peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur irigasi untuk pertanian dan air baku.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastuktur merupakan modal yang sangat di butuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungan kegitan antar daerah/wilayah, infrastruktur fisik mempunyai keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan system infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang

diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Dokumen perencanaan yang baik sudah seharusnya memenuhi kriteria SMART, yakni Spesific (jelas dan terarah), Measureable (dapat diukur), Attainable (dapat dicapai), Realistic (realistis, dapat dicapai), Timely (ada batasan waktu). Measureable (terukur) memiliki pengertian bahwa dokumen perencanaan harus dapat diukur pencapaiannya melalui taret-target yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Target ini dijabarkan melalui indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator sasaran ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga sasaran kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Secara teknis pada dasarnya indikator dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Lahat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*). Pengukuran akan dilakukan secara

agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Konsep dari hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Lahat (skala 1-10). Bagaimana kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan oleh masyarakat pengguna infrastruktur merupakan *feedback* yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Tantangan pembangunan dan penyediaan infrastuktur oleh Pemerintah Daerah yang cukup berat serta tingginya harapan masyarakat akan pelayanan infrastruktur yang berkualitas maka salah satu upaya yang harus dilakukan melakukan evaluasi penilaian kinerja berdasarkan persepsi masyarakat pengguna infrastruktur. Evaluasi ini berguna untuk perbaikan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Lahat.

Metode evaluasi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Lahat adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada masyarakat pengguna layanan infrastruktur. Survey Kepuasan Masyarakat ini untuk mendapatkan umpan balik (feedback) atas pelayanan infrastruktur yang diberikan. Hal ini juga tidak lain karena tuntutan akan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government yang bergeser menjadi paradigma good governance dimana dalam memberikan pelayanan publik berorientasi harus pada kepuasan masyarakat.

Melalui pengukuran kepuasan masyarakat ini maka upaya untuk mewujudkan good local governance dan misi Kapupaten Lahat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah akan dapat dicapai karena adanya evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja layanan infrastruktur secara terus menerus.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Lahat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Berdasar urgensi kegiatan ini, maka Bappeda Kabupaten Lahat berkerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

1.2. Rumusan Masalah

Menyusun kajian dengan rumusan sebagi berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat tentang kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana potensi dan karakteristik toponimi Lahat?
3. Bagaimana Rumusan Strategi penguatan kepuasan layanan infrastruktur di Lahat?
4. Bagimana saran dan rekomendasi penguatan kepuasan layanan infrastruktur di Lahat?

1.3. Sasaran

Menyusun Kajian Indeks Layanan Infrastruktur berdasar data empiris melalui survey

BAB II DASAR HUKUM DAN KAJIAN TEORI

2.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Umum.

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Grig dikutip oleh Kodoatie, 2005;8) Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-istalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan system ekonomi masyarakat (Grig dikutip oleh Kodoatie, 2005;9)

Defenisis teknik juga memberikan spesifik apa yang dilakukan sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem ifrastruktur. Sistem infrastruktur juga merupakan proses dengan keterlibatan berbagai aspek interdisiplin dan multi sektoral. Pendapat lain mengenai infrastruktur didefenisikan secara spesifik oleh American public Works Assocation (Stone, 1974) infrastruktur didefenisikan sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen- agen public untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Menurut Arthur Lewis, (1994;114) Prasarana (Infrastructure) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan

mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap.

Ketersediaan infrastruktur, khususnya yang tepat guna dan berkualitas merupakan prasyarat untuk memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan. Ketersediaan infrastruktur dapat mendukung aktivitas sosial ekonomi keseharian, meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pembangunan kawasan pedesaan. Ketiga hal tersebut saling bersinergi satu sama lainnya. Berputarnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kualitas SDM akan mendorong laju pembangunan ekonomi desa. Sebaliknya keberhasilan pembangunan perdesaan akan memberikan dampak balik yang positif bagi peningkatan akivitas kehidupan dan kuaitas SDM (Arsyad,dkk, 2011:31). Berdasarkan pernyataan tersebut ketersediaan infrastruktur memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan wilayah pedesaan.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan defenisi infrastruktur yang telah dipaparkan tesebut di atas Development Repor (World Bank, 1994) menyatakan bahwa, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara). Sibrani (2002) menemukan bahwa infrastruktur, dalam hal ini listrik dan pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Prasetyo dan Firdaus (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih.

Tabel 2. 1 Kajian Teori Infrastruktur

No	Sumber	Aspek yang Terdapat Dalam Teori
1.	(Grigg, 1988)	Sistem Fisik Transportasi Pengairan Drainase Bangunan gedung Fasilitas public Memenuhi kebutuhan social dan ekonomi
2.	American public Works Assocation (Stone, 1974)	Fasilitas fisik Dibutuhkan oleh agen public Fungsi pemerintah Penyediaan air Tenaga listrik Pembuangan limbah Transportasi Pelayanan similar Memfasilitasi tujuan ekonomi
3.	(Arsyad,dkk, 2011:31).	Memecahkan permasalahan pembangunan Mendukung aktivitas social dan ekonomi Meningkatkam kualitas SDM
4.	Bachtiar Effendi (2002:48)	Penunjang pelaksanaan pembangunan Fasilitas pelayanan public Prasarana jalan Air bersih Jembatan Sarana pendidikan Sarana kesehatan

		Sarana peribadatan Sarana transportasi Irigasi Teknologi dan komunikasi Mempermudah kegiatan ekonomi

Infrastruktur didefenisikan dalam penelitian ini sebagai sarana dan prasarana dasar pedesaan yang terdiri dari prasarana (air bersih, komunikasi, energy listrik, irigasi, jalan, jembatan,drainase), sarana ekonomi (pasar, pertokoan, serta industry masyarakat), sarana transportasi (kondisi jalan dan akses transportasi), sarana social (pendidikan, kesehatan, peribadatan).

2.2.2. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005). Berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988) yaitu meliputi: Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant); Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang; Fasilitas pengelolaan limbah (padat); Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi; Fasilitas lintas air dan navigasi; Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya. Sistem transit public; Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi; Fasilitas gas alam; Gedung publik: sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan; Fasilitas perumahan public; Taman RW sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk lapangan olahraga dan Fasilitas Komunikasi.

Sedangkan berdasarkan kapasitas infrastruktur fisik (Arsyad, 2011; 31) dibagi menjadi: pertama Infrastruktur Transportasi yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi pedesaan. Ketersediaan jalan yang memadai (aspal) misalnya menjamin desa memiliki akses dari dan ke sumber-sumber ekonomi dan

pemasaran. Selain kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan raya, tingkat keterpencilan suatu daerah juga dapat mengganggu kelancaran arus ditribusi, baik distribusi hasil pembangunan, faktor produksi, maupun arus informasi. Prasarana untuk mengakomodasi mobilitas orang dan barang tentu saja sangat vital perannya dalam pengembangan sebuah wilayah adalah terminal.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lain yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan. Dengan adanya transportasi harapan dapat menghilangkan isolasi dan memeberi stimulan kea rah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industry maupun sector lainnya di daerah pedesaan. Transportasi sangat penting bagi daerah pedesaan di Negara-negara yang sedang berkembang, karena menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan social ekonomi.

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tepat tujuan dihubungkan satu sama lain dengan suatu jaringan dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari system transportasi. Transportasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya tidak terwujud secara baik (Bintarto, 1982). Selain itu Hurst (1974) mengemukan bahwa interaksi antara wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang maupun jasa. Transportasi merupakn tolak ukur dalam interaksi keruangan antara wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Transportasi digunakan untuk

memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat.

Dalam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi dan tanpa moda transportasi (berjalan kaki). Pergerakan tanpa moda transportasi biasanya berjarak pendek, sedangkan pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang atau jauh. Menurut Hurst (1974) kajian geografi transportasi umumnya berfokus pada jaringan transportasi, local, struktur, arus, dan signifikan serta pengaruh jaringan terhadap ruang ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dengan prinsip ketergantungan antara jaringan dengan ruang ekonomi sebagaimana perubahan aksesibilitas.

Dalam hal ini semakin baik jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang.

Kedua Infrastruktur Komunikasi Salah satu contoh dari infrastrukur komunikasi adalah kantor pos. Ketiga Infrastruktur Listrik, Kondisi infrastruktur yang baik secara kapasitasnya yang memadai mampu memberikan stimulasi bagi kegiatan ekonomi sosial ekonomi di suatu wilayah. Listrik merupakan salah satu sarana vital dalam aktivitas kehidupan keseharian dan aktivitas ekonomi perdesaan. Keempat Infrastruktur Ekonomi, Keberadaan infrastruktur ekonomi, sebagai salah satu prasarana penunjang kegiatan ekonomi di sebuah kawasan, angat mutlak diperlukan. tanpa adanya ifrastruktur ekonomi yang memadai, maka kegiatan ekonomi perdesaan akan terhambat. Infrastruktur ekonomi terdiri dari pasar, pertokoan, kios,dll. Selain itu infrastruktur ekonomi lainnya yang sangat penting sebagai fasilitator pembangunan ekonomi desa adalah keberadaan lembaga keuangan (Bank dan bukan Bank) dan akses para kredit. Kelima Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur yang paling penting dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan public, korelasi yang positif antara peninkatan akses diukur dari keberadaan

kualitas fasilitas kesehatan dan meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat. Faktor kesehatan merupakan salah satu yang menentukan kualitas SDM. Selain ketesediaan fasilitas jarak desa ke fasilitas kesehatan public merupakan hal penting, karena korelasi dapat dikorelasikan sebagai penyebab redahnya aksesibilitas masyarakat pada prasarana pelayanan kesehatan.

Aksesibilitas desa ke fasilitas kesehatan publik merupakan aspek dari infrastruktur kesehatan lainnya yang juga penting untuk dilihat adalah kemudahan dalam mencapai fasilitas kesehatan baik public maupun swasta. Jumlah tenaga medis dan paramedic di pedesaan, maksudnya pelayanan kesehatan selain didukung oleh ketersediaan fasilitas dan perlengkapan fasilitas kesehatan juga perlu ditunjang oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi dan mumpuni. Ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan per satuan wilayah merupakan salah satu aspek penting yang perlu untuk dilihat, dan yang terakhir adalah fasilitas penunjang kesehatan di pedesaan. Keenam Infrastruktur Pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam infrastruktur pendidikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan dasar dan jarak ke fasilitas pemdidikan dasar. Salah satu jalan utuk mengakumulasi modal manusia, selain aspek kesehatan adalah juga melalui aspek pendidikan. Ketersediaan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan kualitas SDM khususnya lewat aspek pendidikan. Mohammad Ali (2009: 58) dalam buku “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” dijelaskan bahwa “pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional”, oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat.

Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa: Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan, infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan dan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (Pedoman PPIP, 2009).

Tabel 2. 2 Kajian Teori Jenis Infrastruktur

No	Sumber	Aspek yang Terdapat Dalam Teori
1.	(Grigg, 1988)	1. Sistem penyediaan air Waduk Penampungan air a. Transmisi dan distribusi b. Fasilitas pengolahan air (treatment plant) Sistem pengelolaan air limbah c. Pengumpul Pengolahan Pembuangan Daur ulang 2. Fasilitas pengelolaan limbah (padat) 3. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi; Fasilitas lintas air dan navigasi; 4. Fasilitas transport; tasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya 5. Sistem transit public; Sistem kelistrikan a. Produksi Distribusi 6. Fasilitas gas alam; Gedung publik a. Sekolah Rumah sakit b. Gedung pemerintahan; Fasilitas perumahan public

		7. Taman RW sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk lapangan olahraga 8. Fasilitas Komunikasi.
2.	(Grigg, 1988; Grigg dan Fontane, 2000)	1. Grup transportasi Jalan 2. Jalan raya Jembatan 3. Grup pelayanan transportasi Transit 4. Bandara Pelabuhan 5. Grup komunikasi Grup keairan 6. Air 7. Air buangan System keairan 8. Termasuk jalan air yaitu sungai Saluran terbuka 9. Pipa
		10. Grup pengolahan air limbah Grup bangunan 11. Grup distribusi dan produksi energy.

3.	(Arsyad, 2011; 31)	1. Infrastruktur transportasi 2. Ketersediaan jalan yang memadai (aspal) Kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan raya 3. Infrastruktur komunikasi Kantor pos 4. Infrastruktur listrik Infrastruktur ekonomi 5. Pasar Pertokoan Kios 6. Keberadaan lembaga keuangan (bank dan bukan bank) Akses para kredit 7. Infrastruktur kesehatan 8. Ketersediaan fasilitas kesehatan public 9. Kualitasfasilitas kesehatan dan meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat 10. Faktor kesehatan merupakan salah satu yang menentukan kualitas sdm 11. Jarak desa ke fasilitas kesehatan publik Aksesibilitas desa ke fasilitas kesehatan 12. Jumlah tenaga medis dan paramedic di pedesaan Ketersediaan fasilitas dan perlengkapan fasilitas kesehatan Ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan per satuan wilayah 13. Infrastruktur pendidikan 14. Ketersediaan fasilitas pendidikan dasar Jarak ke fasilitas pendidikan dasar.

4.	(Pedoman PPIP, 2006)	1. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas Jalan 2. Jembatan perdesaan 3. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan Irigasi perdesaan 4. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan 5. Berupa penyediaan air minum 6. Sanitasi perdesaan

Jenis infrastruktur desa berdasarkan dengan tempat penelitian terkait diantaranya adalah: Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant), Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang, Fasilitas pengelolaan limbah (padat), Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi, Fasilitas transportasi : jalan, serta utilitas pelengkap lainnya dan Fasilitas komunikasi.

2.2.3. Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dalam pengertian luas meliputi enam bidang yang terdiri dari pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur komunikasi dan transportasi, pelindungan sumber daya alam dan lingkungan dan infrastruktur social (Stiglizt, 1997). Pengertian pembangunan infrastruktur lainnya disampaikan oleh (Sudaryati, 2007) yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada penigkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berkaitaan dengan hal tersebut Ahmad dan Hossain (1990) dalam penelitiannya, menunjukan bahwa daerah yang infrastruktur transportasinya berkembang, memperoleh keuntungan yang signifikan

dibandingkan dengan desa-desa yang infrastruktur transportasinya belum berkembang. Pengembangan infrastruktur merupakan saah satu factor pendukung pembangunan ekonomi suatu Negara. Bhattacharyay (2008) telah mengidentifikasikan peran penting infrastruktur dalam pembangunan wilayah, yaitu sebagai factor dasar yang mampu mendorong perubahan ekonomi diberbagai sector baik local maupun internasional. Hal tersebut diperkuat oleh Kessedes dan ingram (1994) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat infrastruktur terhadap perekonomian yaitu: 1) mengurangi biaya produksi, 2) memperluas kesempatan kerja dan konsumsi karena terbukanya daerah-daerah yang terisolasi, dan 3) menjaga stabilitas ekonomi makro melalui investasi pada infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli konsumen.

Kriteria pengembangan infrastruktur di desa dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: (1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, (2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin, (3) Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta (5) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan (6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, (7) Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat, (8) Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun, (8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

Ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa yaitu

berupa jalan, jembatan dan tambatan perahu. Kedua pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu irigasi pedesaan. Ketiga pembangunn infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi penyediaan air bersih atau air minum dan sanitasi perdesaan.

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan

mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

2.2.4. Karakteristik Infrastruktur

1. **Prasarana Jalan Dan Jembatan**

   Peraturan perundang-undangan tentang jalan yang berlaku adalah Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

   a. **Sistem Klasifikasi Jalan Umum**

      Dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan klasifikasi jalan umum berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan. Maksud dilakukannya klasifikasi jalan umum tersebut, selain untuk efisiensi jaringan, juga dalam rangka pembagian kewenangan pembinaan jalan, sehingga jelas pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan suatu ruas jalan tertentu. Bentuk kegiatan penyelenggaraan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan tersebut meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan (TURBINBANGWAS). ***Pengaturan Jalan*** adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. ***Pembinaan Jalan*** adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. ***Pembangunan Jalan*** adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. ***Pengawasan Jalan*** adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

   b. **Klasifikasi Jalan Menurut Peruntukan**

      Sesuai pasal 6 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan sesuai peruntukkannya terdiri atas jalan umum dan

jalan khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004). Termasuk ke dalam jalan umum ini adalah jalan tol. Jalan Khusus adalah jalan yang bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan (pasal 6 (3) UU No. 38 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan jalan khusus (penjelasan pasal 6 (3) UU No. 38 Tahun 2004), antara lain: jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

c. Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia

Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan jaringan jalan, maka pada pasal 7 s.d pasal 10 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan umum dikelompokkan lebih lanjut menurut:

Sistem Jaringan, yang terdiri atas: sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;

Fungsi Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, Jalan lingkungan;

Status Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa;

Kelas Jalan, yang dikelompokkan menjadi: jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil.

Pada **Tabel 2.1** disampaikan definisi untuk masing-masing istilah pengelompokkan jalan umum tersebut di atas.

Secara umum dapat diperoleh kesimpulan bahwa landasan dalam UU No. 38 Tahun 2004 dalam mengklasifikasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Definisi Istilah dalam Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia

No	Pembagian	Klasifikasi	Definisi
1	Menurut system	Sistem jaringan jalan primer	sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yg berwujud pusat kegiatan.
		Sistem jaringan jalan sekunder	sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
2	Menurut fungsi	Jalan arteri	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
		Jalan kolektor	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
		Jalan lokal	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

		Jalan lingkungan	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
3	Menurut status	Jalan Nasional	jalan arteri & jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
		Jalan Provinsi	jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
		Jalan Kabupaten	jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
		Jalan Kota	jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota,

			menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
		Jalan Desa	jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
4	Menurut Kelas	Jalan kelas I	Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: lebar maks 2.500 mm, tinggi maks 4.200 mm, muatan sumbu maks 10 t.
		Jalan kelas II	Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: lebar maks 2.500 mm, panjang maks 12.000, tinggi maks 4.200 mm, muatan sumbu maks 8 t.
		Jalan kelas III	Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: lebar maks 2.100 mm, panjang maks 9.000, tinggi maks 3.500 mm, muatan sumbu terberat 8 t.
		Jalan kelas khusus	Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: lebar melebihi dari 2.500 mm, panjang

			melebihi dari 18.000, tinggi melebihi 4.200 mm, muatan sumbu melebihi 10 t.

Sumber: UU No. 38 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2009

2. Prasarana Transportasi

a. Transportasi Darat

Peraturan perundang-undangan tentang lalulintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut diatur, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan lalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terkait dengan ruang lalulintas, jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

Fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan terdiri atas:

1) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) mm, ukuran paling tinggi 4.200

(empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

2) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) mm, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) mm, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) mm, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
4) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan uk. lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) mm, uk. panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) mm, uk. paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

b. Transportasi Laut

Peraturan perundang-undangan tentang prasarana transportasi laut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada undang-undang tersebut, Tatanan Kepelabuhan Nasional memuat:

1) Peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan;
2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
3) Lokasi pelabuhan.

Menurut jenisnya, pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau. Selanjutnya, menurut hirarkinya pelabuhan laut terdiri atas:

1) Pelabuhan utama;

2) Pelabuhan pengumpul;
3) Pelabuhan pengumpan.

Lebih lanjut, penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Setiap pelabuhanwajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang disusun dengan memperhatikan:

1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
4) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
5) Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan;
6) Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pembangunan dan izin mengoperasikan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari:

1) Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
2) Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.

c. Transportasi Udara

Peraturan perundang-undangan tentang prasarana transportasi udara diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Kegiatan angkutan udara niaga dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh menteri.

Sedangkan jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara antarnegara. Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1) Permintaan jasa angkutan udara;
2) Terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
3) Fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
4) Terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar udara;
5) Pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal;
6) Keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

Tatanan kebandar udaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang handal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Tatanan kebandar udaraan nasional sebagaimana tersebut merupakan sistem perencanaan kebandar udaraan nasional yang menggambarkan interdependensi, interrelasi, dan sinergi antar-unsur yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tatanan kebandar udaraan nasional memuat peran, fungsi, penggunaan, hirarki, dan klasifikasi bandar udara serta rencana induk nasional bandar udara.

Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan bandar udara domestik. Hirarki bandar udara terdiri atas bandar udara pengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan bandar udara pengumpan merupakan bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul dan

merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal. Lebih lanjut, klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.

3. Prasarana Air Bersih

a. Definisi Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan airminum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Ketentuan Umum Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990.

b. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih

Sistem penyedian air bersih harus memenuhi beberapa persyaratan utama.Persyaratan tersebut meliputi persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif dan persyaratan kontinuitas.

c. Sistem Distribusi dan Sistem Pengaliran Air Bersih

Menurut Damanhuri, E., (1989) sistem distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan.Sistem ini meliputi unsur sistem perpipaan dan perlengkapannya, hidran kebakaran, tekanan tersedia, sistem pemompaan, dan Reservoir

Sistem distribusi air minum terdiri atas perpipaan, katup-katup, dan pompa yang membawa air yang telah diolah dari instalasi pengolahan menuju pemukiman, perkantoran dan industri yang mengkonsumsi air. Juga termasuk dalam sistem ini adalah fasilitas penampung air yang telah diolah (reservoir distribusi), yang digunakan saat kebutuhan air lebih besar dari suplai

instalasi, meter air untuk menentukan banyak air yang digunakan, dan keran kebakaran.

Dua hal penting yang harus diperhatikan pada sistem distribusi adalah tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang memenuhi (kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kualitas air yang berasal dari instalasi pengolahan.

d. Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air yang diperlukan untuk melayani penduduk yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu untuk keperluan domestik (rumah tangga) dan non domestik.Target pelayanan harus mengacu pada Millenium Development Goals (MDGs) dimana daerah perkotaan harus sudah terlayani 60% dari jumlah penduduk. Dalam melayani jumlah cakupan pelayanan penduduk akan air bersih sesuai target, maka direncanakan kapasitas sistem penyediaan air bersih yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu untuk keperluan domestik (rumah tangga) dan non domestik. .

1) Kebutuhan Air Bersih Untuk Domestik (Rumah Tangga).

Menurut Anonimus, (1990) menyatakan bahwa kebutuhan domestik dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga yang dilakukan melalui Sambungan Rumah (SR) dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fasilitas Hidran Umum (HU). Pada Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan besar debit domestik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik diperhitungkan terhadap beberapa faktor:

a) Jumlah penduduk yang akan dilayani menurut target tahapan perencanaan sesuai dengan rencana cakupan pelayanan.
b) Tingkat pemakaian air bersih diasumsikan tergantung pada kategori daerah dan jumlah penduduknya.

2) Kebutuhan Air Bersih Untuk Non Domestik.

Menurut Anonimus, (1990), kebutuhan air bersih non domestik dialokasikan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih berbagai fasilitas sosial dan komersial yaitu fasilitas pendidikan, peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, instansi pemerintahan dan perniagaan. Besarnya pemakaian air untuk kebutuhan non domestik diperhitungkan 20% dari kebutuhan domestik.

4. Prasarana Irigasi

Air merupakan salah satu sumber kehidupan mutlak untuk mahkluk hidup. Ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air. Kelebihan air terutama di musim hujan di suatu tempat bisa menjadi masalah seperti banjir atau longsor. Namun kekurangan air terutama pada musim kemarau juga menimbulkan masalah, yaitu timbulnya bencana kekeringan. Keberadaaan, ketersediaan, kebutuhan dan penggunaan sumber daya air tergantung dari banyak aspek yang saling mempengaruhi saling memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Sejarah terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air ini merupakan suatu proses yang cukup panjang. Ada yang pro maupun ada yang kontra untuk diterbitkan. Isu-isu timbul selama proses penerbitannya, antara lain privatisasi, ekspor air, peningkatan fungsi ekonomi dan berkurangnya fungsi sosial yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa air merupakan kepentingan semua pihak (*water is everyone's business*).

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga

diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 UUD 45 yang berisi[1]:

> "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan sumber daya air akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang sumber daya air agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam.

a. Pengertian Irigasi.

   Yang dimaksud dengan istilah irigasi adalah kegiatan - kegiatan yang bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, perkebunan dan lain-lain usaha pertanian, rawa - rawa, perikanan. Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak

diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Masih sering kita jumpai istilah irigasi ini diganti dengan istilah *"Pengairan"*. Untuk sementara istilah irigasi kita anggap punya pengertian yang sama dengan istilah pengairan.

b. Tujuan Irigasi

Dalam tujuan irigasi dibahas : tujuan irigasi secara langsung dan secara tidak langsung. Tujuan irigasi secara langsung: Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah, agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara diantara butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai tujuan sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Tujuan irigasi secara tidak langsung: Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pemberian air yang dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antara lain :

1) Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman maka suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang bertujuan merendahkan suhu tanah.
2) Membersihkan tanah, dilakukan pada tanah yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salah satu usaha misalnya penggenangan air di sawah untuk melarutkan unsur- unsur berbahaya tersebut kemudian air genangan dialirkan ketempat pembuangan.
3) Memberantas hama, sebagai contoh dengan penanganan maka lubang tikus bisa direndam dengan air maka tikus akan keluar, lebih mudah dibunuh.
4) Mempertinggi permukaan air tanah, misalnya dengan perembesan melalui dinding dinding saluran, permukaan air tanah dapat dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk

mengambil air melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi.

5) Membersihkan buangan air kota (penggelontoran), misalnya dengan prinsip pengenceran karena tanpa pengenceran tersebut air kotor dari kota akan berpengaruh sangat jelek bagi pertumbuhan tanaman.

6) Kolmatasi, yaitu menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan mengalirkan air berlumpur dan akibat endapan lumpur tanah tersebut menjadi cukup tinggi sehingga genangan yang terjadi selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkinkan adanya usaha pertanian.

c. Pembagian Daerah Irigasi

Pembangian kewenangan daerah irigasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2006 khususnya pada Bab IV pasal 16, 17 dan 18 menjelaskan tentang kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan: Daerah Irigasi (DI) dengan luas diatas 3000 ha menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Daerah Irigasi (DI) antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah Irigasi (DI) lebih kecil dari 1000 ha sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

5. Prasarana Perumahan

Undang undang yang mengatur penyelenggaraan perumahan di Indonesia adalah Undang undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman. Dalam Undang undang tersebut di atur beberapa poin penting, diantaranya :

a. Definisi Perumahan dan pemukiman.

Definisi perumahan dan pemukiman diatur dalam undang-undang ini dalam pasal 1, diantaranya :

1) Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
2) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
7) Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

b. Peningkatan Kualitas

Bagian ke tiga undang undang ini, khususnya paragraph 1 yang termuat dalam pasal 96 disebutkan bahwa : Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola- pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Selanjutnya dalam pasal 97 ayat 1 dijelaskan : Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:

1) Pemugaran;
2) Peremajaan; atau
3) Pemukiman kembali.

2.2.5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

1. Teori Kepuasan Masyarakat

Menurut Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2004) disebutkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan dan kinerja. Oliver (dalam Tjiptono, 2004) memberikan pendapat bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan oleh ketidaksesuaian harapan yang merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan mayarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan kenyataan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Linder Pelz dalam Gotleb, Grewal dan Brown (Tjiptono, 2004) bahwa kepuasan merupakan respon afektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik. Sementara Engel (dalam Tjiptono, 2004) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi purna beli terhadap alternatif yang dipilih yang memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan.

Kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Definisi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas, sebaliknya apabila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas dan apabila kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Dikaitkan dengan kepuasan masyarakat, maka kepuasan pelanggan dapat dianalogikan sebagai kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan instansi.

2. Layanan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah guna *(utility)*. Guna yang diciptakan oleh kegiatan infrastruktur adalah guna tempat *(place utility)* dan guna waktu *(time utility)*. Menciptakan guna tempat, berkaitan dengan kegiatan pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya suatu barang dari daerah produksi ke daerah pasar, maka gunanya atau nilai dari barang tersebut lebih tinggi karena dibutuhkan oleh banyak konsumen yang mampu membayar dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai akan menunjang kelancaran transportasi dalam memindahkan barang atau orang. Guna waktu adalah mampu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat memberikan kegunaan yang lebih besar karena barang sampai ditempat tujuan adalah tepat waktu dan barangnya dalam kondisi baik.

Selain menciptakan guna tempat dan guna waktu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur akan memberikan manfaat yang positif dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan

poltik. Manfaat ekonomi dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, yaitu: (1) memperluas pasar atau daerah pemasaran yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan bagi produsen. Daerah yang mempunyai infrastruktur yang baik akan mudah berhubungan dengan daerah yang juga mempunyai infrastruktur yang baik, sehingga pasar atau wilayah pemasaran semakin luas. Ini akan berbeda dengan daerah yang infrastrukturnya jelek akan membuat stagnan pasar dan daerah pemasarannya. (2) mengurangi perbedaan harga antar daerah menjadi sekecil mungkin sehingga harga barang-barang menjadi stabil. Infrastruktur yang baik akan memudahkan transportasi dalam menjangkau kebutuhan daerah tertentu pada daerah lain, sehingga harga barang di suatu tempat tidak dibebani dengan biaya transportasi yang lebih mahal. (3) infrastruktur yang baik akan mendorong kelancaran transportasi dan mampu menjangkau daerah yang luas serta mendorong daerah-daerah melakukan spesialisasi produksi sesuai potensi yang dimiliki berarti mampu menerapkan prinsip keunggulan komparatif (comparative cost), yaitu memproduksi barang dengan biaya murah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memberikan manfaat sosial dan budaya, misalnya (1) dalam bidang budaya dan seni, adanya pengenalan budaya dan seni dari daerah yang dulunya terpencil atau infrastruktur tidak baik, sehingga budaya dan seni daerah tersebut lestari dan berkembang. (2) dalam bidang pendidikan, buku-buku pelajaran dari daerah maju dapat dikirimkan ke daerah-daerah yang tertinggal sehingga dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.(3) dalam bidang kesehatan, daerah-daerah yang mengalami gizi buruk atau sedang dilanda wabah penyakit atau bencana alam lainnya dapat segera dilakukan bantuan kesehatan. (4) Dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menjalin erat rasa solidaritas dan persaudaraan antar daerah. Pada bidang politik, dengan infrastruktur yang baik dapat (1) diselenggarakan sistem

pemerintahan yang mantap dan bersifat uniform. Pengaduan dari pemerintah kota/kabupaten dapat langsung dilakukan secara singkat dan cepat pada pemerintah provinsi. (2) menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi. (3) mampu mengatasi gangguan keamanan dan pertahanan, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari luar daerah sehingga mampu mempererat persatuan daerah tersebut.

3. Indikator layanan Infrastruktur

Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator manfaat (*Outcame*) atau dampak (*impact)* dapat dicapai, artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat.

Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis infrastruktur, teori yang digunakan mengadopsi dan modifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik (*availability*) (ii) kualitas fisik (*quality*) (iii) kesesuaian (*appropriateness*) (iv) pemanfaatan (*utility*) dan (v) penyerapan tenaga kerja (*job creation*). Dalam IKLI, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

1) Ketersediaan fisik *(availability)* adalah bahwa dalam setiap aktivitas belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan *output* yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;

2) Kualitas fisik *(quality)* adalah kualitas *output* yang dihasilnya, yaitu bahwa aspek efektifitas akan lebih *reliable* apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas *output* yang baik dan optimal;
3) Kesesuaian *(appropriateness)* adalah kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat ;
4) Pemanfaatan *(utility)* adalah tingkat pemanfaatan atas *output* yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas *output*, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya; dan
5) Penyerapan tenaga kerja *(job creation)* adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur;
6) Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur.

Menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1) Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional. Besarnya mobilitas ekonomi tahun 2002 yang melalui jaringan jalan nasional dan provinsi rata-rata perhari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-kilometer (Bappenas, 2003, dikutip oleh Kenastri, 2007). Hal ini belum termasuk mobilitas ekonomi yang

mempergunakan jaringan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya adalah infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

2) Infrastruktur Pengairan

Pada umumnya pembangunan infrastruktur sumberdaya air tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan pembangunan sektor-sektor lainnya karena infrastruktur merupakan penunjang atau pendukung pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air banyak memberikan dukungan yang besar antara lain untuk pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir,penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

3) Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi.

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di dunia ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut dua hal, yaitu air untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan air untuk kehidupan kita sebagai manusia yang berbudaya (Otto Soemarwoto, dikutip oleh Kenastri, 2007). Kebutuhan air untuk memenuhi kehidupan hayati secara langsung diperlukan dalam produksi bahan makanan kita, seperti untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holitkultura, kehidupan ikan, ternak dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh industri baik untuk proses pendinginan mesin dan pengangkutan limbah.Manusia sebagai makhluk yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, permasalahan air dan penyehatan lingkungan (sanitation) harus menjadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin terbatas dan langka (scarcity) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia belum mampu menikmati atau mengakses

pada sumber air minum yang sehat dan bersih. Di samping itu, kondisi di atas diperparah dengan belum terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakat dan sistem penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, persampahan, dan drainase. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

4) Infrastruktur Perumahan

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan.

5) Infrstruktur Sarana dan Prasarana Transportasi

Menurut Morlok (1991), terdapat beberapa yang merupakan komponen utama dari transportasi, yaitu :

a. Manusia dan barang (yang diangkut)
b. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut)
c. Jalan (tempat alat angkut bergerak)
d. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut ke dalam dan dari alat angkut)
e. System pengoperasian (yang mengatur 4 komponen manusia barang kendaraan/ peti kemas, jalan dan terminal)

Sedangkan Menurut Manheim (1979) komponen utama dari transportasi hanya meliputi:

a. Jalan dan terminal
b. Kendaraan, dan
c. Sistem pengelolaan

Pada intinya adalah ketiga komponen diatas merupakan komponen sarana dan prasaran transportasi yang saling terkait dalam memenuhi permintaan akan transportasi. Dengan komponen komponen diatas, maka yang dapat diartikan dari sitem transportasi adalah gabungan elemen jalan dan terminal, kendaraan dan system peroperasian yang saling berkait dan bekerja sama dalam mengantisipasi permintaan dari manusia dan barang. Transportasi sebagai system mencakup system prasarana yaitu jalur dan simpul terjadinya pergerakan, dan system pengendalian atau pengaturan yaitu memungkinkan pergerakan tersebut dapat berjalan dengan efisien, lancer, aman dan teratur.

4. Penyusunan Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah. Instrumen untuk mengukur indeks kepuasan layanan infrastruktur perlu adanya indikator yang merupakan dasar penyusun dari Indeks kepuasan layanan infrastruktur ini. Penilaian dengan menggunakan keenam indikator tersebut harus dilakukan secara komperehensif dan integral, sehingga pengukuran kinerja menjadi suatu kesatuan yang utuh. Karena keenam indikator tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam pengukuran maupun penilaianya, maka setiap indikator harus mendapat perlakuan pengukuran yang berbeda pula. Agar keenam indikator tersebut tetap dapat dinilai secara integral, maka perlu dilakukan pembobotan setiap indikator tersebut sesuai dengan tujuan. Untuk melakukan pembobotan indikator, perlu dilakukan analisis mengenai signifikansi

dari setiap indikator dalam menggambarkan kinerja infrastruktur. Pembobotan yang dilakukan pada setiap indikator pada prinsipnya didasari pada kekuatan setiap indikator dalam menggambarkan efektifitas belanja infrastruktur.

Secara berurutan, proses penyusunan formulasi indeks kepuasan layanan infrastruktur, yaitu :

- Menentukan Bobot penilaian tehadap *variable indikator* (6 indikator) dan jenis jenis infrastruktur (jenis)
- Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) yang dihadiri oleh responden dengan kriteria sebagai berikut : (1) tingkat kepentingan responden terhadap belanja infrastruktur (2) tingkat keahlian/pengetahuan bidang infrastruktur (3) Praktisi yang secara langsung menangani bidang pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah instansi yang menjadi perencana dan pelaksana dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim.
- Dalam FGD, untuk sementara ada dua opsi, khususnya yang terkait dengan keberadaan variabel indikator. Apakah indikator yang sudah diberikan bisa ditambah, dikurangi atau dirubah. Adapun implementasinya adalah sebagai berikut :

  Tidak ada perubahan variabel yang diusulkan

Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian mereka mengenai rangking terhadap variabel indikator dan jenis infrastruktur. Masing – masing peserta FGD (target survey) diminta untuk mengisi tabel berikut :

Tabel 2. 4 Daftar isian untuk perengkingan variable indikator

No	Variabel Indikator	Rangking	Keterangan
1	Ketersediaan fisik	.....	
2	Kualitas fisik	.....	
3	Kesesuaian	.....	

4	Pemanfaatan	.....
5	Penyerapan tenaga kerja	.....
6	Kontribusi terhadap perekonomian	.....

Ada perubahan variabel yang diusulkan

Sebelum Peserta FGD diminta memberi perangkingan, mereka diminta untuk mendiskusikan terhadap kemungkinan adanya perubahan variabel indikator.

Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian mereka mengenai rangking terhadap variabel indikator baru (jika ada perubahan) dan jenis infrastruktur. Masing – masing peserta FGD (target survey) diminta untuk mengisi tabel berikut :

Tabel 2. 5 Daftar isian untuk perengkingan variabel indikator baru (jika ada)

No	Variabel Indikator	Rangking	Keterangan
1	Ketersediaan fisik	.....	
2	Kualitas fisik	.....	
3	Kesesuaian	.....	
4	Pemanfaatan	.....	
5	Penyerapan tenaga kerja	.....	
6	Kontribusi terhadap perekonomian	.....	
7	Lain lain	.....	

Untuk tabel isian pembobotan jenis infrastruktur, baik ada ataupun tidak ada variable indikator baru tabel isiannya sama. Teknik pembobotan dilakukan dengan metode pembobotan *eckenrode*.

Metode pembobotan Eckenrode adalah salah satu metode pembobotan yang digunakan untuk menentukan derajat kepentingan/bobot dari setiap kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Penentuan bobot ini dinilai sangat penting karena akan mempengaruhi nilai

total akhir dari setiap pilihan keputusan. Bobot merupakan nilai preferensi tujuan tak berdimensi.

Konsep yang digunakan dalam metode pembobotan ini adalah dengan melakukan perubahan urutan menjadi nilai dimana urutan 1 dengan nilai tingkat (nilai) tertinggi, urutan 2 dengan tingkat (nilai) di bawahnya, dan seterusnya. Adapun langkah- langkah dalam metode perhitungan bobot Eckenrode adalah sebagai berikut (Ma'arif dan Tanjung) Responden diminta untuk meranking setiap kriteria (pengisian tabel sebelumnya) Membuat tabel berikut :

Kriteria	Jumlah Ranking					Nilai	Bobot
	R1	R2	R3	.....	Rn		
K1	Jr11	Jr12	Jr13	.....	Jr1n	N1	B1
K2	Jr21	Jr22	Jr23	.....	Jr2n	N2	B2
K3	Jr31	Jr32	Jr33	.....	Jr3n	N3	B3
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Km	Jrm1	Jrm2	Jrm3	.....	Jrmn	Nn	Bn
Faktor Pengali	Rn-1	Rn-2	Rn-3	.....	Rn-n	Total Nilai	1

5. Pengolahan data hasil primer survey

Untuk mendapatkan respon kepuasan masyarakat terhadap kepuasan kinerja infrastruktur, data yang digunakan adalah data primer (data survey) yang diperoleh dengan cara pemberian Kuesioner kepada responden dan wawancara secara langsung kepada sumber informasi yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan pengguna infrastruktur yang bersangkutan. Dari data tersebut di olah dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perhitungan Kepuasan pengguna layanan Hasil Survei

Responden	*indikator*			*indikator*			*Indikator 6*		
	Atibut1		*atribut 2*	*Atibut1*		*atribut 2*	*Atibut1*		*atribut 2*
	X1	***X2***	***X3***	**.**				**.**	***Xi***
1	x_{11}	x_{21}	x_{31}						X_{i1}
2	x_{12}	x_{23}	x_{33}						X_{i2}
3	x_{13}	x_{23}	x_{33}						X_{i3}

. . . n	. . . x_{1n}	. . . x_{2n}	. . . x_{3n}						... X_{in}
Rata-rata atribut (X)	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_3$				$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_1$
Rata-rata indikator (ind)	**Ind 1**			**Ind 3**					**Ind 6**

Nilai Rata-rata peratibut kepuasan

$$\text{rata-rata atribut (X)} = \frac{\text{Jumlah nilai atribut}}{\text{Jumlah Responden}} = \bar{x}_i = \frac{\sum x_{in}}{n}$$

Nilai rata-rata indikator

$$\text{rata-rata indikator (Ind)} = \frac{\text{rata2 atribut (x)}}{\text{Jml atribut per indikator}} \overline{Ind\ x_i} = \frac{\sum \bar{x}_i}{n x_{in}} =$$

Setelah rata-rata Indikator di peroleh selanjutnya dimasukan dalam tabel formulasi (formula model) untuk mengukur Indeks masing-masing jenis infrastruktur (parsial). Formulasi perhitungan IKLI infrastruktur

INFRASTUKTUR A

NO	VARIABEL INDIKATOR	NILAI RATA-RATA INDIKATOR	KONVERSI	BOBOT DARI FGD	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) X 20	(5)	(6) = (4)X(5)
1	***Ketersediaan fisik***	**Ind 1**	...	...	...
2	*Kualitas fisik*	Ind 2	....	....	....
3	***Kesesuaian***	**Ind3**	...	...	...
4	*Pemanfaatan*	....	....	....	....
5	***Penyerapan tenaga kerja***	...	...	...	...
6	*Kontribusi terhadap perekonomian*	Ind 6	....	....	....
				INDEKS Infrastruktur A =	$\sum (6)$

Untuk menghitung Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat, merupakan penjumlahan dari indeks masing-masing infrastruktur dikali bobot proporsi anggaran masing-masing infrastruktur, dengan menggunakan formulasi model sebegai berikut

Tabel 2. 7 Menghitung Indikator Angegat

Infrastruktur	Nilai Indeks	Bobot*)	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)= (2)*(3)
Infrastruktur A			
Infrastruktur B			
Infrastruktur C			
Ifrastruktur D			
Infrastruktur E			
Nilai Agregat IKLI			$\Sigma(4)$

Keterangan Bobot *) diperoleh dari proporsi kebijakan anggaran Pemerintah. Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang nerupakan penjumlahan dari masing-masing infrastruktur setelah dibobot (Σ ɸTotal Index type A + B + C+D+E)/n) dapat dikelompokkan skala penilaian berikut ini :

ASUMSI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)			
NILAI INDEKS	RENTANG NILAI		KETERANGAN
1	0 - 10	0 - 20	Buruk
2	11 - 20		
3	21 - 30	21 - 40	Sedang
4	31 - 40		
5	41 - 50	41 - 60	Cukup
6	51 -60		
7	61 - 70	61 - 80	Baik
8	71 - 80		
9	81 - 90	81 - 100	Baik Sekali
10	91 - 100		

6. Keterkaitan Infrastruktur dengan RPJMD

Pembangunan infrastuktur mengacu pada arahan pembangunan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatra Selatan. Pembangunan

infrastruktur menjadi prioritas dan masuk dalam salah satu Misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatra Selatan, didalam pernyataan misi ke tiga disebutkan :Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Untuk meningkatkan kemantapan jalan juga dilakukan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Sumatra Selatan akan dibangun jalan tol dan Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di ibukota kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan misi tersebut maka arahan tujuan pembangunan Provinsi Sumatra Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan khususnya pada pembangunan infrastruktur diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;
3. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se- Provinsi Sumatra Selatan dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber- sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran pada 5 (lima) tahun ke depan adalah “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar”.

2.3. Pengertian Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pengertian tersebut, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *(regulator)* dan sebagai pemegang monopoli layanan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan) dan pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Dan Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan.

Unsur kepuasan pelanggan seharusnya menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah). Pemerintah menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan

meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah tejadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* bergeser menjadi paradigma *good governance*.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai *regulator (rule government)* harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari aspek proses dan *output* pelayanan. Karena tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, maka penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran. .

2.4. Kesenjangan Kualitas Pelayanan Publik

Servqual atau kualitas pelayanan mengkaitkan dua dimensi sekaligus, yaitu satu pihak penilaian servqual pada dimensi konsumen (*consumer*) atau masyarakat. Sedangkan di pihak lain juga dapat dilakukan pada dimensi *provider* (pemerintah) atau secara lebih dekat lagi adalah terletak pada kemampuan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kedua dimensi tersebut dapat saja terjadi kesenjangan atau gap antara harapan-harapan dan kenyataan-kenyataan yang dirasakan konsumen/ masyarakat dengan persepsi pemerintah terhadap harapan-harapan masyarakat tersebut. Setidaknya ada 5 kesenjangan

atau gap yang dirasakan konsumen/ masyarakat dengan persepsi pemerintah, yaitu : Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan persepsi pemerintah. Terjadi antara dimensi masyarakat dengan dimensi pemerintah. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab adalah :

- Pemerintah kurang berorientasi pada riset pasar.
- Ketidakcukupan komunikasi ke atas secara hirarkis.
- Jenjang struktur organisasi yang terlalu bertingkat sehingga menimbulkan jarak yang jauh antara para pembuat kebijakan dengan front line.
- Kesenjangan antara persepsi pemerintah terhadap harapan masyarakat dengan spesifikasi kualitas pelayanan.
- Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab gap ini, yaitu :
- Komitmen pemerintah terhadap kualitas layanan yang rendah.
- Standarisasi tugas belum tersedia.
- Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan kenyataan delivery service di tingkat bawah.

Gap ini terjadi karena suatu organisasi belum memiliki spesifikasi atau suatu citra pelayanannya yang khas. Faktor-faktor penyebabnya adalah :

- *Role ambiguity*, atau kecenderungan yang menimpa front line service terhadap kondisi bimbang dalam memberikan pelayanan karena tidak terdapatnya kepastian/standarisasi dari tugas mereka.
- *Role conflict*, kecenderungan dimana para pegawai merasa tidak memilik kemampuan untuk memuaskan pelanggan.
- Tidak ada kesesuaian antara skill pegawai bidang tugas yang sesuai.
- Kurangnya teknologi yang sesuai.
- Tidak ada kesesuaian antara sistem kontrol/evaluasi dengan sistem imbalan bagi pegawai.
- Kurangnya teamwork.

- Keempat, kesenjangan antara kenyataan delivery service quality dengan komunikasi terhadap pelanggan/masyarakat.

Faktor-faktor penyebabnya adalah :

- Ketidakpastian komunikasi horizontal antara level operasional, dengan induk organisasi.
- Kecenderungan menjanjikan sesuatu pada konsumen secara berlebihan.
- Kesenjangan yang terjadi pada “harapan” masyarakat dengan “persepsi” tentang pelayanan.

Secara keseluruhan gap atau kesenjangan pada kedua dimensi (customer dan provider) digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 **Model Konseptual Service Quality (Servqual)**

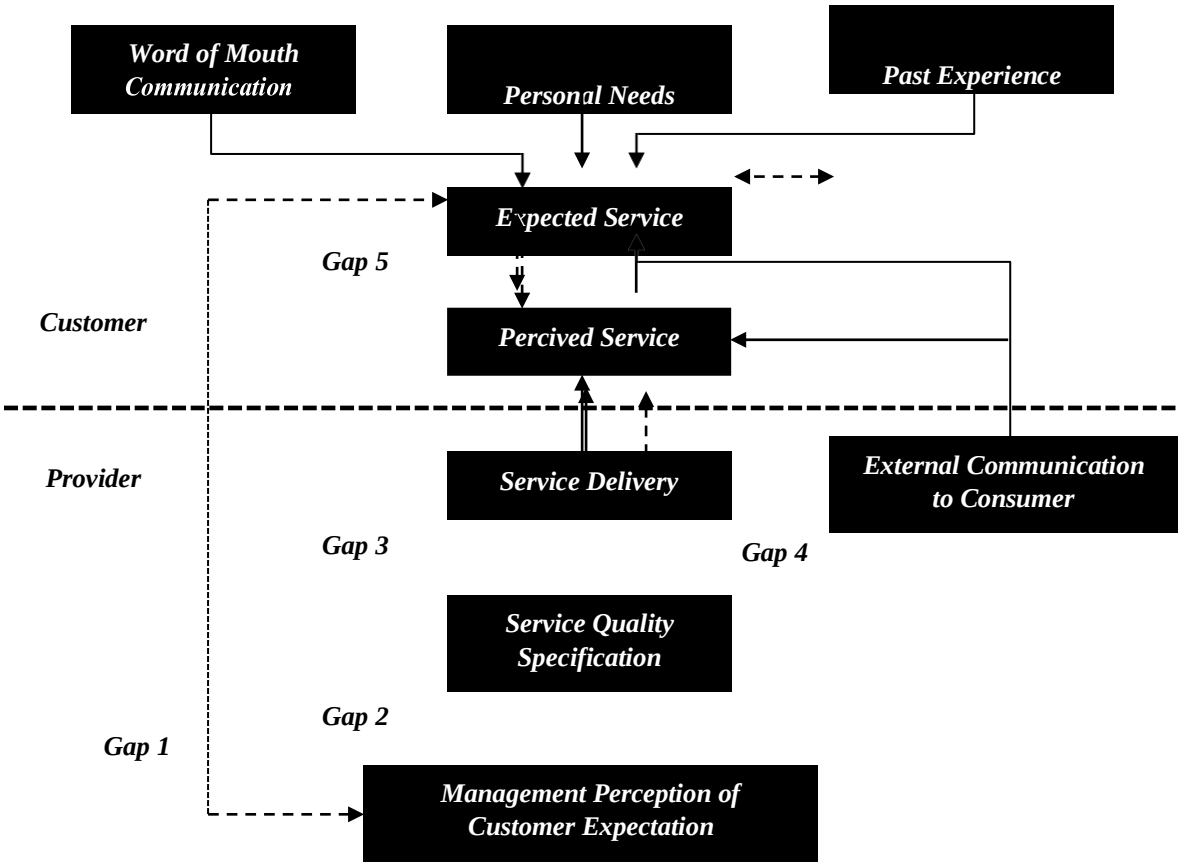

Evaluasi Evaluasi adalah suatu penilaian yang obyektif mengenai derajat dari seluruh pelayanan atau bagian-bagian komponennya

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Elemen yang perlu mendapat perhatian adalah evaluasi yang memerlukan perbandingan dari pencapaian suatu pelayanan atau prosedur dengan beberapa standar yang bersifat absolut dan penilaian bersifat obyektif (Davis, 1989). Pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian atau hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah "evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation" (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu : 1. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. 2. Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan perencanaan yang ada (planned). 3. Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti. 4. Quasi experimental models,

merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. 5. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Menurut Scriven (1999) ada dua model evaluasi yaitu: 1. Goal Free Evaluation Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan). 2. Evaluasi formatif-sumatif Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu.

Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil- hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Menurut P.P No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di

dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu; 1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex- ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; 2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on- going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan 3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Aspek Jaringan dan Klasifikasi Fungsi Jalan 1. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi/Peranan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 34 tahun 2006 tentang jalan, klasifikasi jalan menurut fungsinya terbagi menjadi empat jalan yaitu: 1. Jalan Arteri Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanannya jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk ke jalan ini sangat dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan Kolektor Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlahjalan masuk dibatasi. 3. Jalan Lokal Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk tidak dibatasi. 4. Jalan Lingkungan. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk dibatasi (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006). 2. Sistem Jaringan Jalan Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan. (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006). a. Sistem Jaringan Jalan Primer Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat- pusat kegiatan. b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan). Sistem jaringan jalan sekunder terdiri atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. 3. Klasifikasi Jalan Menurut Status Jalan Jaringan jalan menurut status jalan dikelompokan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan) diantaranya: jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kota dan jalan Desa 4. Klasifikasi Kelas Jalan Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan Klasifikasi kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi

penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan). 1. Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Spesifikasi untuk jalan bebas hambatan (freeway) sebagaimana dimakasud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, b. Pengendalian jalan masuk secara penuh, c. Tidak ada persimpangan sebidang, d.Dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, e.Paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, f. Lebar paling sedikit 3,5 meter. 2. Jalan Raya (Highway) Spesifikasi untuk jalan raya (highway) sebagaimana dimakasud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas secara menerus b. Pengendalian jalan masuk secara terbatas, c. Dilengkapi dengan median, d. Paling sedikit 2(dua) lajur setiap arah, e. Lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. 3. Jalan Sedang (Road) Spesifikasi untuk jalan sedang (road) sebagaimana dimakasud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, b.Untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) arah, c. Lebar jalur paling sedikit 7 meter. 4. Jalan Kecil (Street) Spesifikasi untuk jalan kecil (street) sebagaimana dimakasud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas setempat, b. Paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) arah, c. Lebar jalur paling sedikit 5,5 meter (Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan). Pelayanan Publik Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utama dalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara. Perkembangan yang muncul di sejumlah negara dalam bidang pelayanan publik menunjukkan adanya pergeseran lebih ke arah penerapan prinsip orientasi pasar dalam penyediaan pelayanan (David, 2005). Ini berarti bahwa pelayanan yang

diberikan pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan prinsip catalytic government, yang mengandung arti bahwa aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak sebagai katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu dibutuhkan visi yang jelas dalam memberikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya. Dipandang dan sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan yang didorong oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan masyarakat mempunyai perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yang berlaku pada masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal ini membuka cakrawala baru bagi aparatur untuk semakin berperan secara lebih baik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya (David, 2005). Merujuk SK MENPAN nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik, atau pelayanan umum, pada dasarnya merupakan, "segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan demikian pengertian pelayanan publik sebagaimana dimaksud SK tersebut mempunyai arti yang sangat luas. Diterapkannya kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilihat dari sisi pelayanan pubik, diharapkan point of delivery menjadi lebih pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadi lebih dekat ke masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah perlu pelimpahan kewenangan menyangkut pelayanan publik pada tingkatan pemenintah di bawahnya, utamanya pemerintah kecamatan. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam pelayanan administrasi dan pelayanan pembangunan, sedangkan berdasarkan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terdapat 3 fungsi pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun

2003) : Pertama, environmental services. Bentuk ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana lingkungan (dalam arti luas) antara lain jalan, jembatan, drainase, jambatan dsb. Juga termasuk dalam bentuk layanan ini adalah personal services antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan, keagamaan dsb. Kedua, developmental services. Layanan bentuk ini lebih bersifat memampukan dan memfasilitasi (enabling and facilitating), atau sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian termasuk pelayanan yang berupa pelayanan administrative yang bersifat legalitas misalnya melegalkan sesuatu kepemilikan atau keberadaan seseorang individu dalam masyarakat yang berbentuk pelayanan perijinan, KTP, akte kelahiran, dan sebagainya. Ketiga, protective services. Bentuk ketiga ini lebih bersifat pemberian pelayanan keamanan dan perlindungan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, militer, bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Sementara itu menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik seperti kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah KTP, BPKB, SIM, STNK, IMB, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan sebagainya. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Sendi-sendi pelayanan menurut

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 adalah sebagai berikut: 1) Kesederhanaan 2) Kejelasan dan kepastian 3) Keamanan 4) Akurasi 5) Tangung jawab 6) Kelengkapan sarana dan prasarana. 7) Kemudahan akses Tjiptono (2001) menyatakan: Profesionalisme pemerintah sedang mengalami pemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat politik dalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Tetapi pejabat pemerintah mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme. Dengan demikian bidang pelayanan publik masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan secara sungguh-sunguh dalam berbagai sektor yang menjadi pendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif sehingga dapat menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang profesional guna memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam kondisi demikian tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayan yang dibutuhkan masyarakat. Maka salah satu alasan penting kehadiran pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan publik yaitu diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, jika layanan yang dibutuhkan itu ternyata tidak dapat dijangkau masyarakat atau disediakan oleh mekanisme pasar. Meluasnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan (publik) berkembang dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara. Adanya perluasan fungsi tersebut tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyat. Perluasan yang besar pada akhir-akhir ini dalam fungsi kesejahteraan itu telah memperlihatkan konsepsi baru tentang sifat pemerintahan konsepsi ini meletakkan pemerintahan dalam hubungan-hubungan yang lebih akrab dan kooperatif dengan manusia biasa sekaligus meruntuhkan tradisi pemerintahan sebagai suatu kekuasaan. Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini sesungguhnya adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi

pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti juga disampaikan oleh Osborne dan Ted Gabler (2005) : mengupayakan peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberiwewenang kepada swasta lebih banyak berpartsipasi, karena mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka memperbaiki sistim untuk mewujudkan masyarakat lebih baik maka Osborne dan Ted Gabler menyimpulkan prinsip-prinsip yang mereka anggap sebagai keputusan model baru yaitu: 1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalu menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi cukup sebagai penggerak. 2. Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan segenap lapisan secara optimal. Sebagai pemilik wewenang untuk mengkompetisikan berbagai lapisan, pemerintah hendaknya tetap menyuntikkan ide pembangunan tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan berbagai masukan dapat ditampung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama. Dengan demikian berbagai pihak bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi menemukan pertumbuhan kembangnya. 3. Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai kemungkinan 25 kendala daripada menanggulangi di kemudian hari. 4. Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi mampu menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial. 5.

Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, yaitu kecenderungannya penyelewengan dan korupsi relatif kecil sehingga untuk itu diperlukan perubahan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan: a. Mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kuliatas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kualitas Pelayanan Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2000) mengatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan. Kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran hasil yang mempertemukan kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan kepuasan. Jadi konsep kualitas lebih dari sekedar memenuhi spesifikasi barang, kualitas mengimplikasikan memenuhi atau melebihi harapan tentang ketepatan waktu, akurasi pekerjaan, kecepatan tanggapan, dan unjuk kerja. Kualitas dipandang secara lebih luas, di mana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Untuk mengukur kualitas layanan di sektor publik menurut Laterner & Levine (1993) melalui 5 indikator, yakni: 1) Baik tidaknya layanan (quality of service). Baik tidaknya layanan dapat dilihat dari sejauh mana institusi dalam memberikan layanan publik dengan ramah, populis dan berbagai macam bentuk perilaku yang dapat menyenangkan dan memuaskan pelanggan. 2) Produktivitas.

Produktivitas sering diukur dengan rasio antara input dengan output. Dalam konteks layanan publik produktivitas dapat diukur dengan jawaban pertanyaan. 3) Responsibilitas. Responsibilitas, dapat dibatasi sebagai tanggung jawab secara intern institusi dan atau pelaksana layanan di dalam memberikan layanan publik atau menjalankan tugasnya. 4) Akuntabilitas. Akuntabilitas, dalam konteks layanan publik dapat dibagi menjadi dua sasaran: (a) bagi institusi pemerintah lokal dalam memberikan layanan publik; (b) bagi pelaksana layanan secara individual dimaknai dengan sejauhmana pelaksana layanan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 5) Responsivitas. Responsivitas diartikan sebagai daya peka organisasi dan pelaksana layanan dalam menyikapi perkembangan lingkungan institusinya. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan menurut Parasuraman et.al (dalam Tjiptono, 2000) meliputi lima dimensi pokok, yaitu: a. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. b. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjian dengan segera, akurat, dan memuaskan. c. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. d. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan kemampuan,kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Lovelock (2005) mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai antara lain: 1. Tangible (terjamah), yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material. 2. Realiable (handal), yang meliputi kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memilki keajegan. 3. Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu rasa tanggung jawab

terhadap mutu pelayanan. 4. Assurance (jaminan), yang meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. 5. Empathy (empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan Kepuasan Pengguna/ Pelanggan Untuk mendefinisikan kepuasan pengguna/ pelanggan sebenarnya tidaklah mudah, karena pengguna/ pelanggan memiliki berbagai macam karakteristik, baik pengetahuan, kelas sosial, pengalaman, pendapatan maupun harapan. Misalnya, seorang pelanggan baru ingin mencoba masakan tertentu dari sebuah restoran. Sebelum melakukan pembelian, pelanggan baru tersebut pasti memiliki harapan bahwa dia akan dilayani secara baik, pelayannya ramah, cepat tanggap, dan masakan yang ingin dicoba enak. Jika harapan pelanggan ini sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan melebihi harapannya sudah dapat dipastikan pelanggan tersebut akan merasa puas. Tetapi bila yang dalami dan dirasakan pelanggan tidak sesuai dengan harapannya, misalnya pelayanannya tidak ramah, tidak tanggap dan masakannya tidak, sudah dapat dipastikan pelanggan tidak merasa puas. Dari contoh diatas, kepuasan pelanggan/pengguna dapat diketahui setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa layanan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan produk adan jasa, sama atau melebihi harapan (Zulian Yamit, 1996). Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmati dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya. Persepsi yang akurat mengenai harapan pelanggan merupakan hal yang perlu, namun tidak cukup untuk memberikan kepuasan kepada

pelanggan. Perusahaan harus mewujudkan harapan pelanggan ke dalam desain dan standar kepuasan pelanggan. Desain dan standar kepuasan pelanggan dikembangkan atas dasar harapan konsumen dan prioritasnya (Assauri, 2003). Kepuasan dan Ketidakpuasan Pengguna/ Pelanggan Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapan. Menurut Engel et al. (1995) kepuasan pengguna/pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil yang sama atau melampui harapan pengguna /pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pengguna/pelanggan. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Harapan pengguna/ pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan pesaingnya. Pengguna/ pelanggan yang puas akan setia lebih lama, mereka bersedia merekomendasi perusahaan, mau membayar sesuai mutu yang disampaikan, mengatakan hal-hal yang positif dari perusahaan, dan kurang sensitif terhadap harga. 27 Dari definisi-definisi tentang kepuasan tersebut adanya suatu kesamaan makna bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian emosional dari pengguna/ pelanggan setelah penggunaan suatu produk, di mana harapan dan kebutuhan terpenuhi. Pengguna/pelanggan yang tidak puas mereka akan kecewa, dengan kekecewaan itu pengguna/pelanggan akan melakukan tindakan komplain, atau tidak sama sekali melakukan apa-apa (diam). Engel et al. (1995) mengemukakan bentuk-bentuk pengambilan tindakan akibat dari ketidakpuasan atas kualitas pelayanan yang disampaikan kepada pengguna/pelanggan di antaranya: 1. Respon suara (voice response); 2. Respon pribadi (private response); 3. Respon pihak ketiga (third-party response); Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana

ataupun kompleks, dan rumit. Dalam hal ini peranan setiap individu dalam service incounter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna/ pelanggan secara lebih baik, maka perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan. Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhinya harapan pelanggan, penyebab tersebut ada yang bisa dikendalikan oleh penyedia jasa. Dengan demikian, penyedia jasa bertanggung jawab untuk meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin terjadi dan menghindarinya dengan cara merancang jasa yang mudah dipahaminya dengan jelas. Dalam hal ini penyedia jasa harus mengambil inisiatif agar ia dapat memahami dengan jelas instruksi dari klien, dan klien mengerti benar apa yang akan diberikan. Bagaimana dengan sifat-sifat dari pelanggan yang tidak puas tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya atau tidak, seperti yang diuraikan Tjiptono (2001) sebagai berikut: 1. Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan 2. Tingkat ketidakpuasan pelanggan 3. Manfaat yang diperoleh 4. Pengetahuan dan pengalaman 5. Sikap pelanggan terhadap keluhan/ komplain 6. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi 7. Peluang keberhasilan dalam menyampaikan keluhan. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Indek Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya”. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan dapat dilakukan melalui pengukuran kepuasan masyarakat atau pelanggan, untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana

pelayanan telah mampu memenuhi harapan atau dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka organisasi harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau suatu atribut tertentu. Harapan pelanggan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kinerja aktualnya, sehingga dari sini akan diperoleh indeks kepuasan pelanggan yang mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Menurut Tjiptono (2001), Indeks Kepuasan Pelanggan adalah mengukur perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan dalam membeli suatu produk atau jasa dan apa yang sesungguhnya ditawarkan perusahaan. Sedangkan pandangan lainnya memberikan alasan pengunaan Indeks Kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari kepuasan pelanggan". Menurut Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang "relevan, valid dan reliable", sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu: 1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. 4. Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 7. Kecepatan

pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani. 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepeda penerima pelayanan. 14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

BAB III METODE KEGIATAN

Penyusunan Indeks kepuasan layanan infrastruktur dilakukan dengan tahapan- tahapan Asumsi (*default*) yang dipakai dalam proses menyusun Formulasi Indek, yaitu:

a. Indeks dibentuk oleh total sub indeks dari sub indek – sub indeks :
   - Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
   - Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara)
   - Penyediaan infrastruktur air bersih
   - Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)
   - Penyediaan infrastruktur perumahan

b. Kriteria Penilaian
   - Ketersediaan fisik (*availability*) : bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan *output* yang berupa barang secara fisik. Hal ini diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.
   - kualitas fisik (*quality*) : kualitas *output* yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas *output* yang baik dan optimal.
   - Kesesuaian (*appropriateness*) : kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat.
   - Pemanfaatan (*utility*) : tingkat pemanfaatan atas *output* yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas *output* maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.
   - Penyerapan tenaga kerja (*job creation*)
   - Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa

pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur.

3.1. Tahapan

Secara berurutan, proses penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur, yaitu :

3.1.1. Review Hasil tahun sebelumnya

Review hasil tahun sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kelemahan dan kekurangan tahun kemarin dan akan diperbaiki di tahun ini. Beberapa yang akan diperbaiki salah satunya adalah penyempurnaan jumlah sampel, tahun 2015 jumlah sampel yang di ambil tetap minimal sebanyak 1500 responden namun distribusinya akan di revisi berdasarkan perkembangan penambahan obyek survey . Untuk menjaga konsistensi hasil IKLI dari tahun ke tahun maka menggunakan metode dan formulasi perhitungan yang sama dengan tahun 2014 maupun 2015.

Teknik dan metode dalam menghitung IKLI sebangaimana tahun sebelumnya antara lain:

1. Indiktor pembentuk Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mengunakan 6 variabel indikator

   Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator manfaat (*Outcame*) atau dampak (*impact)* dapat dicapai, artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat.

   Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis

infrastruktur, teori yang digunakan mengadopsi dan modifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik (*availability*) (ii) kualitas fisik (*quality*) (iii) kesesuaian (*appropriateness*) (iv) pemanfaatan (*utility*) dan (v) penyerapan tenaga kerja (*job creation*). Dalam IKLI, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

a. Ketersediaan fisik *(availability)* adalah bahwa dalam setiap aktivitas belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan *output* yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;
b. Kualitas fisik *(quality)* adalah kualitas *output* yang dihasilnya, yaitu bahwa aspek efektifitas akan lebih *reliable* apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas *output* yang baik dan optimal;
c. Kesesuaian *(appropriateness)* adalah kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat ;
d. Pemanfaatan *(utility)* adalah tingkat pemanfaatan atas *output* yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas *output*, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya; dan
e. Penyerapan tenaga kerja (job creation) adalah tingkat

penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur;

f. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur.

g. Bobot indikator masing-masing layanan sama seperti tahun 2014. (hasil FGD tahun 2014 dengan Metode pembobotan *Eckenrode)*

2. Penyusunan Kuisioner

Indeks didasarkan pada hasil jawaban kuesioner yang menggunakan skala linkert 1 s.d 5, berupa indikasi kinerja dengan keterangan sebagaiberikut : skala 1 (tidak puas), 2 (kurang puas), 3 (cukup puas), 4 (puas), dan 5 (sangat puas). Penetapan indeks tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder, serta data primer dari responden, dimana akurasi persepsi responden terhadap objek penelitian sangat menentukan pembentukan indeks tersebut. Penyusunan kuisioner ini sendiri sangat dipengaruhi oleh 6 indikator yg sudah disebutkan sebelumnya.

a. Ketersediaan fisik (availability)
b. Kualitas fisik (quality)
c. Kesesuaian (appropriateness) d, Pemanfaatan (utility)
d. Penyerapan tenaga kerja (job creation)
e. Kontribusi terhadap perekonomian

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dengan melakukan survei dengan responden masyarakat yang mempunyai pamahaman terhadap pembangunan infrastukur. Dengan teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah dengan menggunakan *multistage random sampling*, dan *geographically random sampling*, dengan pendekatan sebagai berikut:

- *Multistage random sampling*

  Pembentukan strata ini disamping agar distribusi sampel menjadi representatif untuk mewakili populasi, juga untuk mencapai optimalisasi homogenitas dalam masing-masing *cluster* atau subkelompok responden;

- Geographically random sampling

  Berdasarkan pendekatan geografis responden dijaring dari berbagai alamat. Sehingga diharapkan responden akan representatif baik ditinjau dari sisi jaringan maupun dari sisi sentral. Dengan demikian berdasarkan pendekatan geografis responden diharapkan tersebar di berbagai area;

4. Proses Pengolahan dan Analisa Data

   Tahapan pengolahan data dan analisa data sampai dengan pembuatan laporan survei bisa dilihat pada bagan di bawah.

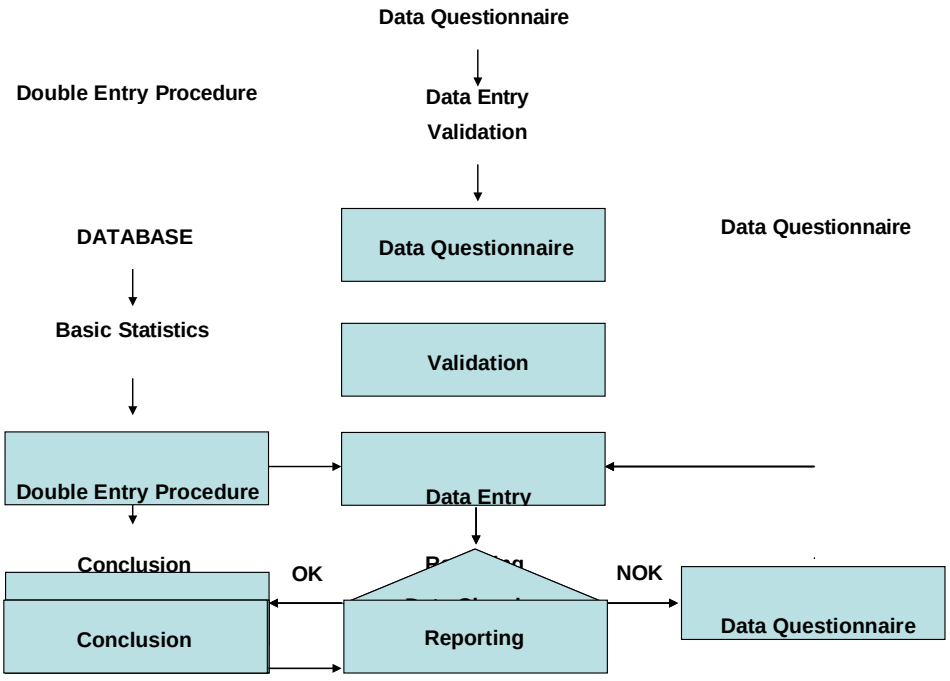

Gambar 2 – Data Processing Flow

3.2. Jenis Penelitian dan Metode

Penelitian tentang layanan infrastruktur yang disusun dalam angka indeks adalah penelitian determitistik kuantitif, yaitu mengukur sebuah konsep sampai dengan indikator pada satuan angka yang bisa memberikan informasi. Angka yang diperoleh merupakan informasi tentang tingkat kesalehan pada sejumlah responden sebagai represntasi dari kelompok besarnya sebagaipengguna layanan.

Rencana kerja lebih diarahkan pada bagaimana seluruh tahapan kerja dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan kerangka acuan kerja pekerjaan ini.

3.2.1. Metode dan Teknik

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei, dengan teknik klaster (clustered random sampling) disebarkan secara acak pada seluruh kecamatan di Kabupaten

Lahat. Metode survei sendiri adalah cara memeroleh informasi dan data yang dirancang untuk untuk memahami status atau gejala tertentu, tujuannya adalah untuk menggambarkan variabel atau kondisi dan situasi apa tindakanlayanan infrastruktur dari pemeluk itu terjadi.

3.2.2. Alat Pengumpul dan Pengolah Data

Data penelitian kuantitatif probabilistik adalah jenis data nomotetik, angka diperoleh dari jawaban responden yang dikumpulkan menggunakan angket langsung dibacakan pada pemeluk agama terpilih. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan excel dan SPSS 20, disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat pemeluk agama yang merupakan jemaah yang aktif mengikuti kegiatan rumah ibadat pada setiap agama, baik aktif dalam mengikuti pembinaanrohani maupun pelaksanaan kegiatan ibadah yang bersifat ritualrutin atau berkala. Pemilihan kriteria ini dilakukan sebagai gambaran pendahuluan atas layanan infrastruktur di Indonesia, artinya jika jemaah rumah ibadat menghasilkan nilai indeks layanan infrastruktur yang tinggi dapat diasosiasikan bahwa ibadah ritual dan pemahaman keagamaan memang berkontribusi dalam membentuk layanan infrastruktur yang baik di Indonesia. Di samping itu, pemilihan jemaah rumah ibadat adalah untuk memastikan bahwa layanan infrastruktur yang dilakukan adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama sehingga dapat membedakannya denganlayanan infrastruktur yang dipengaruhi oleh ideologi atau ajaran (isme) lainnya.

Oleh karena riset Layanan infrastruktur ini diketahui memiliki total populasi atau memiliki *sampling frame* di seluruh Indonesia,terkonsentrasi di berbegai kota dan kabupaten, sehingga diperlukan fungsi peluang. Istilah fungsi peluang sebagai upaya menarik sejumlah representasi pemeluk.

Pengambilan sampel sendiri dengan teknik *"Clustered Random Sampling*" yaituteknik pengambilan sampel peluang secara acak, yang dilakukanpada kondisi populasi yg homogen, dimana kondisi populasi membentuk provinsi-provinsi yg kondisinya homogen di dalamprovinsi, tetapi heterogen antar provinsi. Maka, penghitungan sampel parameter, karena riset Layanan infrastruktur ini menghasilkan skor Layanan infrastruktur yang kemudian akan menjadi landasan pengkategorian KS di Indonesia, maka parameter yang diteliti dalam penelitian ini adalah parameter proporsi

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah berdasarkan dokumen kependudukan. Jumlah sampel responden untuk survey ini ditetapkan 382 responden. Hal ini mengacu pada sampel crije dan Morgan yang juga dipakai dalam penetapan jumlah sampel untuk Survey Layanan Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan tabel berikut:

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistage Random Sampling*, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Menentukan Jumlah Sampel per Kecamatan

Jumlah sampel per Kecamatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lahat .

TAHAP 2: Menentukan jumlah kelurahan/desa terpilih.

Kelurahan/desa terpilih diambil secara acak dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat .

Prinsip penentuan kelurahan/desa: setiap Kelurahan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Jumlah Kelurahan terpilih pada masing-masing Kecamatan bergantung pada jumlah sampel pada masing-masing Kecamatan

TAHAP 3: Menentukan SSU (*Secondary Sampling Unit*) yaitu RT (Rukun Tetangga) terpilih. Dalam 1 Kelurahan/Desa diambil maksimal 2 RT (Rukun Tetangga). RT terpilih diambil secara acak dari seluruh RT pada masing-masing desa atau kelurahan.

TAHAP 4: Menentukan PSU (*Primary Sampling Unit*) yaitu Rumah Tangga Terpilih diambil secara acak dari rumah tangga yang ada pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) terpilih. Interval antar rumah tangga minimal 3 (tiga) rumah

TAHAP 5: Menentukan PSU berdasarkan beberapa kriteria tambahan seperti:

- Berdasarkan gender responden
- Berdasarkan usia responden
- Berdasarkan pekerjaan responden
- Berdasarkan strata pendidikan responden
- Berdasarkan pemanfaatan responden terhadap layanan publik yang diterima

3.4. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2022 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lahat.

3.5. Variabel

Pada kegiatan survey ini menggunakan variabel yang disesuaikan dengan program unggulan pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Indikator IKLI Umum

INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Ketersediaan Fisik (availability)	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan
Kualitas Fisik (quality)	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan
Kesesuaian (Appropriateness)	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan
Efektifitas Pemanfaatan (Utility)	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan
Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan
Kontribusi pada Perekonomian	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);

INDIKATOR	SUB INDIKATOR
	3. infrastruktur air bersih;
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
	5. infrastruktur perumahan

2. Indikator Capaian Per OPD

INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Jalan dan jembatan	Jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat
	Jaringan jalan yang menghubungkan antar desa yang ada di Kabupaten Lahat
	Jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kota
	Jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota
	Jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dengan perumahan
	Jaringan jalan yang menghubungkan antar pemukiman
	Jaringan jalan yang menghubungkan dengan pusat kegiatan ekonomi lokal (kegiatan industri dan jasa)
	Ketersediaan Jembatan dengan kondisi baik
Infrastruktur Air Bersih	Air bersih untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari
	Pelayanan perawatan dan perbaikan kerusakan/ kebocoran jaringan air bersih
	Jaringan distribusi air bersih yang menjangkau seluruh rumah tangga
	Pembangunan dan Pengembangan jaringan air bersih di perdesaan dan perkotaan
Infrastruktur Perumahan	infrastruktur perumahan berupa sanitasi
	infrastruktur perumahan berupa saluran drainase
	Infrastruktur penerangan jalan umum
Infrastruktur Ruang Publik	Kawasan pedestrian
	Taman Kota
	Sarana olahraga
Infrastruktur Irigasi	Penyediaan saluran irigasi untuk melayani kebutuhan Pertanian
	Infrastruktur penyediaan air baku
Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana transportasi bis yang menghubungkan Kabupaten Lahat dengan Kota/ Kabupaten lain
	Sarana transportasi kereta api yang menghubungkan Kabupaten Lahat dengan Kota/ Kabupaten lain
	Fasilitas stasiun yang menghubungkan Kabupaten Lahat dengan Kota/ Kabupaten lain

	Sarana transportasi berupa angkutan para transit (contoh: ojek, becak, ojek online)
	Fasilitas terminal
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Infrastruktur pengelolaan persampahan
	Infrastruktur pengelolaan limbah
Infrastruktur Pelayanan Publik	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
	Ketersediaan Fasilitas Pasar

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode:

a. Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data terpercaya dari jurnal maupun penerbitan resmi maupun dari dinas-dinas terkait.
b. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta primer/langsung tentang kondisi fisik wilayah yang merupakan hasil pengamatan lapangan secara visual.
c. Wawancara, dilakukan kepada seluruh responden yang terjaring dalam survey.
d. Survei tertutup

3.7. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang pernah memanfaatkan pelayanan publik pada pelayanan Perizinan di Kabupaten Lahat berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi data demografi kependudukan dari BPS dan referensi lain yang relevan.

3.8. Pengolahan Data dan Analisis Survey

Tahapan selanjutnya dari pekerjaan ini adalah pengolahan data dan analisis survey. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemeriksaan Data *(Cleansing)* Pada tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan data hasil survey. Pemeriksaan data dilakukan dengan beberapa langkah , antara lain :
   a) Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk diproses atau didrop, bilamana jawaban tidak lengkap;
   b) Memberi nomor pada kuesioner sebagai kendali;
   c) Memeriksa kelengkapandan kejelasan jawaban;
   d) Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya.
2. Proses Pengkodean Data Tahapan selanjutnya adalah memberi kode data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dalam penelitian survey biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu.Untuk kuesioner dengan sistem tertutup maka kode-kode jawaban harus dibuatkan. Pemberian kode ini dengan mengacu prinsip-prinsip pengukuran atau skala pengukuran,
3. Proses Tabulasi Data Proses tabulasi data adalah proses data entry atau memasukkan seluruh data kuesioner yang terdiri Bagian A (Data Responden), bagian B (Closed Question) dan bagian C (Open Question) ke dalam soft copy sesuai aplikasi yang digunakan. Dalam pengolahan data, menggunakan aplikasi sederhana yakni Program Microsoft Excell dari Microsoft Office. Setelah data dimasukkan, selanjutnya adalah membersihkan data dari salah ketik atau salah mengkode data. Beberapa hal yang bisa

dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang kita entry, antara lain :

a) Memproses data untuk diperiksa ulang, misalnya dengan pilihan statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, modus dan median;
b) Memeriksa secara teliti apakah ada penyimpangan-penyimpangan; c. Mencocokkan kembali data yang telah di entry dengan data yang ada pada kuesioner.

4. Proses Analisis Data Analisa Data dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014. Selain itu juga ditambahkan dengan melakukan GAP analisys secara statistik terhadap tingkat mutu pelayanan dibandingkan dengan harapan masyarakat dengan cara memetakan unsur-unsur yang diukur dalam kuadran mutu pelayanan dengan teori service *quality*. Data-data yang didapatkan dari hasil survey tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/ klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan :

   a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.
   b) Deskripsi Kepuasan maupun Ketidakpuasan
   c) Diagram Importance dan Performance Analysis (IPA Diagram) Merupakan metode untuk mengetahui dimana tingkat harapan terhadap pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu.

3.9. Data Analisa

Setelah data selesai di validasi dan maka dilakukan proses pengolahan dengan menggunakan bantuan software pengolahan data. Dalam hal ini, software yang digunakan terdiri dari Microsoft Excell dan SPSS versi 13 dan Sejak dari input hingga running data, kontrol kualitas dilakukan secara ketat oleh ahli statistik. Proses pengolahan data setelah data di oleh dengan SPSS, akan di tabulasikan (dengan bantuan software Microsoft Excell) berdasarkan urutan pertanyaan dalam kuesioner .

Bab IV Gambaran Kabupaten Lahat

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lahat menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Lahat diperoleh gambaran karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Lahat.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

4.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat yang dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan terdiri dari 24 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa, yang memiliki wilayah seluas 4.361,83 $km^{2.}$ dengan batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan : Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim

Secara rinci luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1	Tanjung Sakti PUMI	31.708,60	7,30	Pajar Bulan	18	66,35
2	Tanjung Sakti PUMU	17.815,46	4,10	Simpang III PUMU	14	66,97
3	Kota Agung	24.347,54	5,60	Kota Agung	22	32,59
4	Mulak Ulu	6.375,95	1,47	Muara Tiga	16	27,87
5	Tanjung Tebat	8.476,96	1,95	Tanjung Tebat	14	22,55
6	Mulak Sebingkai	3.885,44	0,89	Keban Agung	10	18,53
7	Pulau Pinang	5.299,55	1,22	Jati	10	3,3
8	Pagar Gunung	13.485,56	3,10	Karang Agung	20	15,86
9	Gumay Ulu	16.067,68	3,70	Tinggi Hari	10	17,13
10	Jarai	11.301,83	2,60	Pasar Jarai	21	41,53
11	Pajar Bulan	19.258,37	4,43	Sumur	20	36,60
12	Muara Payang	6.283,68	1,45	Lawang Agung	7	44,87
13	Suka Merindu	3.069,53	0,71	Suka Merindu	10	40,84
14	Kikim Barat	20.275,84	4,67	Saung Naga	19	46,14
15	Kikim Timur	52.507,20	12,08	Bungamas	32	20,57
16	Kikim Selatan	35.774,38	8,23	Pagar Jati	18	31,61
17	Kikim Tengah	12.635,59	2,91	Tanjung Aur	9	32,7
18	Lahat	20.737,51	4,77	Lahat	29	0
19	Gumay Talang	22.970,40	5,29	Sukarame	15	7,67
20	Lahat Selatan	8.672,12	2,00	Tanjung Payang	10	2,11
21	PSEKSU	25.391,40	5,84	Lubuk Mabar	11	21,69
22	Merapi Barat	18.754,23	4,32	Merapi	19	16,01
23	Merapi Timur	37.988,98	8,74	Lebuay Bandung	14	28,02
24	Merapi Selatan	11.404,29	2,62	Sukamerindu	9	14,50
Kabupaten		**434.487,9**	**100**	**Lahat**	**377**	-

Sumber: - BPS, Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2021

Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis berdasarkan Peta Rupabumi skala 1 : 50.000 pada garis terluar Kabupaten Lahat terletak antara 3°29'42,000"- 4°16'1,200" Lintang Selatan dan 102°54'54,000"-103°46'22,800" Bujur Timur. Dengan letak yang sangat strategis tersebut menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan merupakan jalur transportasi nasional Lintas Tengah Sumatera (Trans Jakarta – Lampung – Baturaja – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Bengkulu atau Padang). Secara rinci batas administrasi Kabupaten Lahat

dapat dilihat pada gambar 2.1.

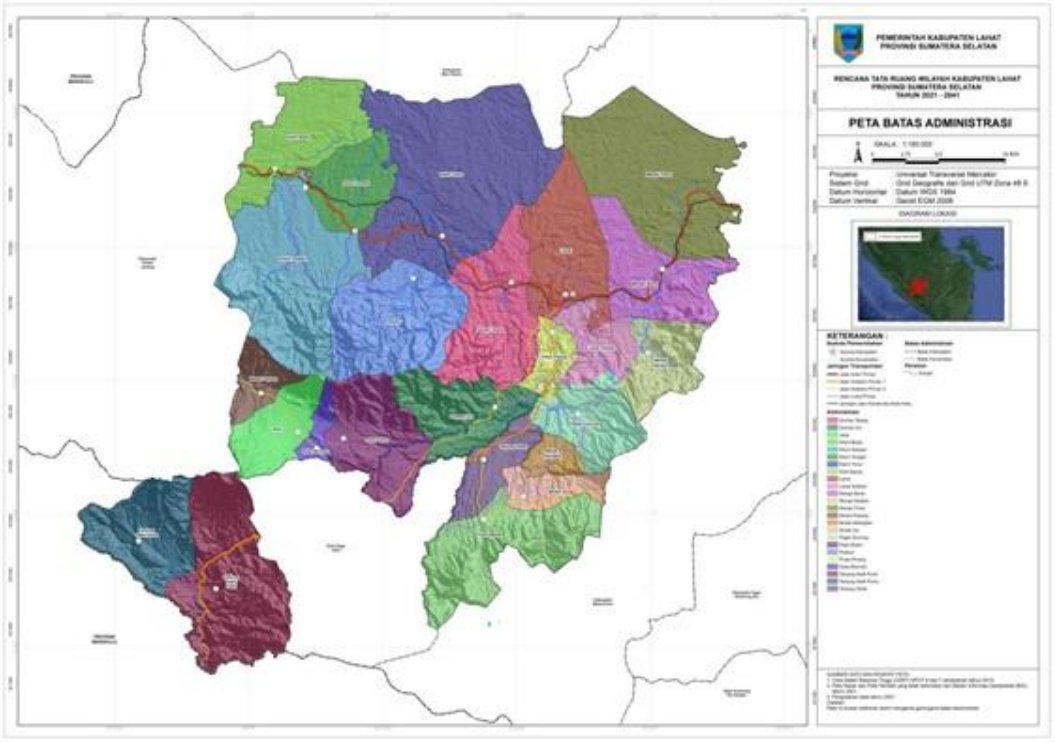

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lahat

4.1.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariatif mulai dari 25 meter hingga 1.000 meter. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Lahat, Merapi Barat, dan Merapi Timur dengan ketinggian 25 meter sampai 100 meter. Sedangkan kecamatan dengan dataran tinggi dari permukaan laut meliputi Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Jarai, Pajar Bulan, dan Muara Payang. Secara rinci ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 4.2, Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut, dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan *Subdistrict*	Tinggi Wilayah (mdpl) *Altitude (m a.s.l)*	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota *Distance to the Capital of Regency/ Municipality*
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	500-1000	66,35
Tanjung Sakti Pumu	500-1000	66,97
Kota Agung	500-1000	32,59
Mulak Ulu	100-1000	27,87
Tanjung Tebat	100-1000	22,55
Mulak Sebingkai	-	18,53
Pulau Pinang	100-500	3,37
Pagar Gunung	100-500	15,86
Gumay Ulu	100-500	17,13
Jarai	500-1000	41,53
Pajar Bulan	500-1000	36,60
Muara Payang	500-1000	44,87
Sukamerindu	500-1000	40,84
Kikim Barat	100-500	46,14
Kikim Timur	100-500	20,57
Kikim Selatan	100-500	31,61
Kikim Tengah	100-500	32,74
Lahat	25-100	-
Gumay Talang	100-500	7,67
Lahat Selatan	-	2,11
Pseksu	100-500	21,69
Merapi Barat	25-100	16,01
Merapi Timur	25-100	28,02
Merapi Selatan	25-100	14,50
Kabupaten Lahat *Lahat Regency*	–	–

https://lahatkab.bps.go.id

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.1.1.3 Geologi

Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan tatanan tektoniknya menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian

barat. Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Secara geologi daerah Kabupaten Lahat tersusun atas formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi jenis tanah aluvial, regosol, andosol, latosol, asosiasi litosol dan latosol serta komplek tanah podsolik dan litosol yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman sawah, kebun campuran, tegalan, alang-alang/semak belukar. Sedangkan jenis tanah andosol dan latosol cocok digunakan untuk tanaman padi, jagung, kopi, karet, cokelat, tanaman buah-buahan dan umbi-umbian.

4.1.1.4 Hidrologi

Secara umum Kabupaten Lahat memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan adalah sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang memenuhi persyaratan layak untuk dikonsumsi seperti sungai, danau dan tadah hujan. Beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi Sungai Lematang, Sungai Air Mulak, Sungai Endikat, Sungai Kikim, Sungai Lingsing, Sungai Pangi, Sungai Serelo, Sungai Air Keruh, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Masyarakat yang tinggal sepanjang pinggiran sungai memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap keberadaan sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih untuk dijadikan air minum. Pada saat musim kemarau, jumlah masyarakat yang memanfaatkan air sungai menjadi meningkat.

Sumber daya air tanah adalah sumber daya air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah adalah sumber air yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan baik untuk keperluan sehari-hari, irigasi ataupun industri tentu saja jika memenuhi persyaratan kualitas dan debitnya memenuhi kebutuhan.

4.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Lahat memilik iklim tropis atau 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017, rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat yaitu 93.36 per hari dan 266.29 mm. Jumlah curah hujan rata-rata paling sedikit terjadi di Kecamatan Merapi Timur sebanyak 183 per hari dan 69 mm, sedangkan rata-rata jumlah curah hujan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pulau Pinang sebanyak 396 per hari dan 82 mm.

Tabel 4.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
1	Tanjung Sakti Pumi	237	3.290	119	274
2	Tanjung Sakti Pumu	250	4.583	125	382
3	Kota Agung	188	3.331	94	278
4	Mulak Ulu	191	3.153	96	263
5	Tanjung Tebat	155	2.958	78	247
6	Pulau Pinang	164	4.747	82	396
7	Pagar Gunung	218	3.875	109	323
8	Gumay Ulu	103	2.782	52	232
9	Jarai	207	3.340	104	278
10	Pajar Bulan	274	3.341	137	278
11	Muara Payang	205	3.127	103	261
12	Sukamerindu	-	-	-	-

13	Kikim Barat	178	2.999	89	250
14	Kikim Timur	188	3.718	94	310
15	Kikim Selatan	242	2.904	121	242
16	Kikim Tengah	172	3.226	86	269
17	Lahat	205	3.770	103	314
18	Gumay Talang	206	4.200	103	350
19	Pseksu	236	3.508	118	292
20	Merapi Barat	164	2.581	82	215
21	Merapi Timur	138	2.193	69	183
22	Merapi Selatan	187	2.674	94	223
23	Lahat Selatan	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-
	Jumlah	**70.300**	**4.108**	**5.858**	**2.054**
	Rata-Rata	**3.195,45**	**186,73**	**266,29**	**93,36**

Keterangan:

- Data masih tergabung dengan kecamatan induk, CH = Curah Hujan, HH = Hari Hujan

4.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lahan pertanian dan bukan lahan pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 4.4

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		(Km^2)	%

1	**Lahan Pertanian**		
	a. Irigasi	159,42	3,65
	b. Tadah Hujan	15,70	0,36
	c. Rawa Pasang Surut	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-
2	**Bukan Lahan Pertanian**		
	a. Bangunan Permukiman	464,56	10,65
	b. Tegal	202,03	4,63
	c. Ladang	36,68	0,84
	d. Perkebunan	1.567,69	35,94
	e. Hutan Rakyat	544,10	12,47
	f. Hutan Negara	288,06	6,60
	g. Padang Rumput	224,12	5,14
	h. Tidak ditanami apapun	431,22	9,89
	i. Lainnya	148,71	3,41
	j. Pertambangan	279,54	6.41
Jumlah		**4.361,83**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lahat

Dari table di atas luas wilayah terbagi menjadi beberapa kecamatan, seperti tergambar pada table berikut:

Tabel 4.5

Luas Area Kecamatan di Kabupaten Lahat

Kecamatan *Subdistrict*	Ibukota Kecamatan *Capital of Subdistrict*	Luas [1] *Total Area* [1] (km²/*sq.km*)
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	271,00
Tanjung Sakti Pumu	Simpang III PUMU	229,59
Kota Agung	Kota Agung	165,59
Mulak Ulu	Muara Tiga	108,43
Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	82,72
Mulak Sebingkai	Keban Agung	63,41
Pulau Pinang	Jati	111,67
Pagar Gunung	Karang Agung	105,51
Gumay Ulu	Tinggi Hari	87,01
Jarai	Jarai	167,52
Pajar Bulan	Sumur	146,11
Muara Payang	Lawang Agung Lama	37,50
Sukamerindu	Sukamerindu	55,23
Kikim Barat	Saung Naga	272,00
Kikim Timur	Bungamas	564,45
Kikim Selatan	Pagar Jati	124,80
Kikim Tengah	Tanjung Aur	265,60
Lahat	Lahat	107,60
Gumay Talang	Sukarame	249,61
Lahat Selatan	Tanjung Payang	183,87
Pseksu	Lubuk Mabar	269,29
Merapi Barat	Merapi	232,64
Merapi Timur	Lebuay Bandung	260,55
Merapi Selatan	Sukamerindu	200,14
Kabupaten Lahat		**4 361,84**

https://lahatkab.bps.go.id

Sumber : Kabupaten Lahat dalam Angka 2021

4.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik Kabupaten Lahat maka dapat diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan rencana perubahannya dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032, bahwa kawasan lindung meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 44.528 (empat puluh

empat ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu. Kawasan lindung terdiri dari:

a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
   - Kawasan Hutan Lindung, meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Barat, Jarai, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung dan Mulak Ulu.
   - Kawasan Resapan Air, meliputi: kawasan resapan air yang terdapat hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah, Gumai Tebing Tinggi, Bukit Serelo dan Hutan Lindung Bukit Napal.

b) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
   - Kawasan Sempadan Sungai, meliputi Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Endikat, dan Sungai Manna dengan luas kurang lebih 7.142 hektar dan ketentuan jarak kawasan sempadan sungai selebar 100 meter kiri kanan untuk sungai besar dan 50 meter di kiri kanan untuk sungai kecil, serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman.
   - Ruang Terbuka Hijau Kota dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau privat seluas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

c) Kawasan konservasi, meliputi:
   - Taman Wisata Alam Bukit Serelo dengan luas kurang lebih 210 hektar.
   - Suaka Margasatwa Gumai Pasemah dengan luas kurang lebih 46.123 hektar.
   - Suaka Margasatwa Isau Pasemah dengan luas kurang lebih

16.998 hektar.

d) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi, Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Muara Payung, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu, Kecamatan Gumay Talang, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Kawasan rawan bencana gerakan tanah berlokasi di Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Kawasan rawan bencana letusan gunung api berlokasi di Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
- Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
- Kawasan rawan gempa bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.

e) Kawasan lindung geologi yaitu berada pada Kawasan Bukit Besak di Kecamatan Merapi Selatan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya Kabupaten Lahat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

- Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 51.093 hektar terdiri atas Kecamatan Kikim Timur dengan luas kurang lebih 23.144 hektar, Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 2.064 hektar, dan Kecamatan Merapi Barat dengan luas kurang lebih 25.885 hektar.
- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 5.458 hektar, terdiri atas Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dengan luas kurang lebih 888 hektar, Kecamatan Pulau Pinang dengan luas kurang lebih 4.564 hektar, dan Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 6 hektar.

b) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

- Kawasan peruntukan tanaman pangan yang dikembangkan di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 17.512 hektar. Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas lebih kurang 15.942 hektar.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas unggulan berupa durian, duku, manggis, alpukat, kubis, sawi, cabe dan wortel yang dikembangkan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kecamatan Kikim Selatan dan Kecamatan PSEKSU dengan luas kurang lebih 2.968 hektar.
- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi yang dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 145.004 hektar, terdiri atas: 1) perkebunan karet meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 4.335 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 37.907 hektar; 2) kelapa sawit meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 32.589 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 5.157 hektar; 3) perkebunan lada dengan luas kurang lebih 738 hektar; 4) perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 61.997 hektar; 5)

perkebunan kakau dengan luas kurang lebih 1.100 hektar; 6) perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 810 hektar; 7) kemiri dengan luas kurang lebih 89 hektar; 8) kayu manis dengan luas kurang lebih 161 hektar; 9) cengkeh dengan luas kurang lebih 60 hektar; dan 10) pinang dengan luas kurang lebih 61 hektar.

- Kawasan peruntukan peternakan meliputi peternakan sapi, kambing dan unggas dengan skala rumah tangga yang diarahkan pada seluruh kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

- Kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan sungai dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap di danau, tebat, cekdam, embung, dan/atau waduk.
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari budidaya perikanan kolam air tenang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Budidaya perikanan kolam air deras meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Budidaya perikanan sawah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan

Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.

d) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan perambangan batubara, dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
   - Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Pulau Pinang.
   - Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecataman Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merapi, Kecamatan Pagun, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Kota Agung.
   - Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Lahat.
   - Rencana kawasan peruntukan pertambangan panas bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

e) Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil.
   - Kawasan peruntukan industri sedang meliputi industri pengolahan batu kali dan krikil yang terletak di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang.
   - Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga meliputi industri pengolahan anyaman bambu, tahu, tempe, kerupuk, rotan

dan ukiran kayu terletak di Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Lahat.

f) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata budaya dan wisata alam.

- Kawasan peruntukan pariwisata budaya berlokasi :1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata budaya batu kepala putri, batunaga, batu orang roboh, batu kodok, batu gajah tidur, batu tapak orang belobang, batu lesung, meja batu dan rumah batu; 2) Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata budaya putri menjemur padi, makam serunting sakti, perahu kuno, batu kursi, makam dayang rindu, batu kambing, makam jaga lawang, makam hulu baling dan makam intan permata; 3) Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata budaya batu ngeri celeng, lobang tiga orang, puri menangis, batu behambing dan batu kerbau; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang memiliki objek wisata budaya batu tiang enam, ngarai, suaka alam, Makam Puyang Batu, dan perkebunan kopi bukit timur; 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Pajar Bulan yang memiliki objek wisata budaya batu lumping gajah, pemandian putri, rumah batu hanebat dan batu langgar; 6) Kecamatan Kikim Timur yang memiliki objek wisata budaya makam puyang raden gede dan makam Syekh Salman; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata budaya Megalith Kuhut Majapahit, Megalith Parajutri, Megalith Tinjak Banyak; dan 8) Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata budaya Rumah Bahi dan Candi Dayang Rindu.
- Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas 1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata alam taman rekreasi ribang kemambang, gua sarang walet dan air terjun;

  2) Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit serelo, pusat pelatihan gajah, Bukit Besar, Air Terjun Hujan Panas, Air Terjun Berdarah, Air Terjun Uhangan, Air Terjun Mata Putri, Air Sumur; 3) Kecamatan Kota

Agung yang memiliki objek wisata alam bukit rancing, Curup Nelindang, Curup Air Kerinjing, Tebat Bukit, Curup Air Tupai, danau batu dan tebat besar; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang memiliki objek wisata alam air panas, tebat besar, Curup Kabuhan, Curup Merundingan, Curup Perampangan, Curup Air Anak, dan Air Terjun Singgah Kudai;

5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Cambai, ngarai, suaka alam, Batu Megalit dan perkebunan kopi bukit timur; 6) Kecamatan Kikim Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit seping tiang; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata alam Taman Tinggi Hari I, II, dan III, Taman Nik Kambing, Curup Lintang, Curup Maung, Curup Buluh, dan Curup Pasemah; 8) Kecamatan Pseksu yang memiliki objek wisata alam Curup 9 Panggung, Goa Suruman, Curup Tinggi Suban, dan Goa Bukit Semping Tiang; 9) Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Curup Lawang Agung dan Lubuk Buntak; 10) Kecamatan Mulak Ulu yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Penengan, Air Terjun Dayang Rindu, Air Terjun Air Bais, Air Terjun Napalan, Megalith Batu Kerbau, Goa Suhuman, Tebat Besar, dan Tebat Bengkuang;

- Kecamatan Pulau Pinang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Air Salak, Curup Pemandian 7 Bidadari, Curup Gunung Nyawe, Curup Kunduran, Megalitik, dan Air Panas.

- Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata alam Marung Batu, Curup Bemban, Air Pans, Curup Laye dan Gua Laye, Curup Air Ugul Besak, Curup Air Ugul Kecik, Batu macan, Ribang Gayau, Gua Masanap Masaris, Tunggul Bute, dan Air Panas Kembuhak; 13) Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata alam Curup Cadas Pelangi, Air Terjun Tiga Tingkat, Danau Batu, Wahana Wisata Water Park.

g) Kawasan peruntukan permukiman seluas 18.549 hektar meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di setiap pusat ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan menyebar di setiap

kecamatan.

h) Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lahat dan kawasan peruntukan untuk Polres dan Polsek yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat serta Kawasan Pemerintahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.

4.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang relatif bervariasi yaitu berkisar antara 0->300 meter di atas permukaan laut dan juga memiliki gunung berapi aktif dan juga berapa sehingga menjadikan Kabupaten Lahat berpotensi rawan bencana alam banjir, karhutla, letusan gunung berapi, longsor dan gempa bumi. Sementara itu wilayah yang berpotensi rawan bencana banjir seluas 175.929,12 hektar, rawan bencana karhutla seluas 128.150,19 hektar, rawan bencana letusan gunung berapi seluas 1.044,11 hektar, rawan bencana longsor seluas 123.278,30 hektar dan rawan bencana gempa bumi seluas 4.248,26 hektar.

Tabel 4.6. Luas Kawasan Bahaya Bencana di Kabupaten Lahat

No	Bahaya Bencana	Luas Ha
1	Banjir	175.929,12
2	Longsor	123.278,30
3	Karhutla	128.150,19
4	Letusan Gunung Berapi	1.044,11

5	Gempa Bumi	4.248,26

Sumber: Inasrisk, Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam KLHS Lahat 2019-2023

4.1.1.9 Kejadian Bencana Kabupaten Lahat dan Sekitarnya

Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami mengalami bencana banjir pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan wilayah sekitar Kabupaten Lahat salah satunya Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan dimana bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020 yang berdampak terjadinya kerusakan bangunan rumah warga.

Berdasarkan data BNPB sepanjang tahun 2019-2020 wilayah Kabupaten Lahat mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya yaitu bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 05.00 WIB, tanggal 30 Desember 2019 yang melanda 3 (tiga) desa diantranya Desa Keban Agung, Desa Lesung Batu dan Desa Pengentaan. Kemudian bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 04.00 WIB, Tanggal 09 Januari 2020 yang melanda 4 (empat) kecamatan diantarnya Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Kikim Timur. Selanjutnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada pukul 10.00 WIB, Tanggal 7 Februari 2020 yang melanda Desa Batay, Desa Ngalam Baru, Desa Mandi Angin, Desa Gunung Kembang dan Desa Jati.

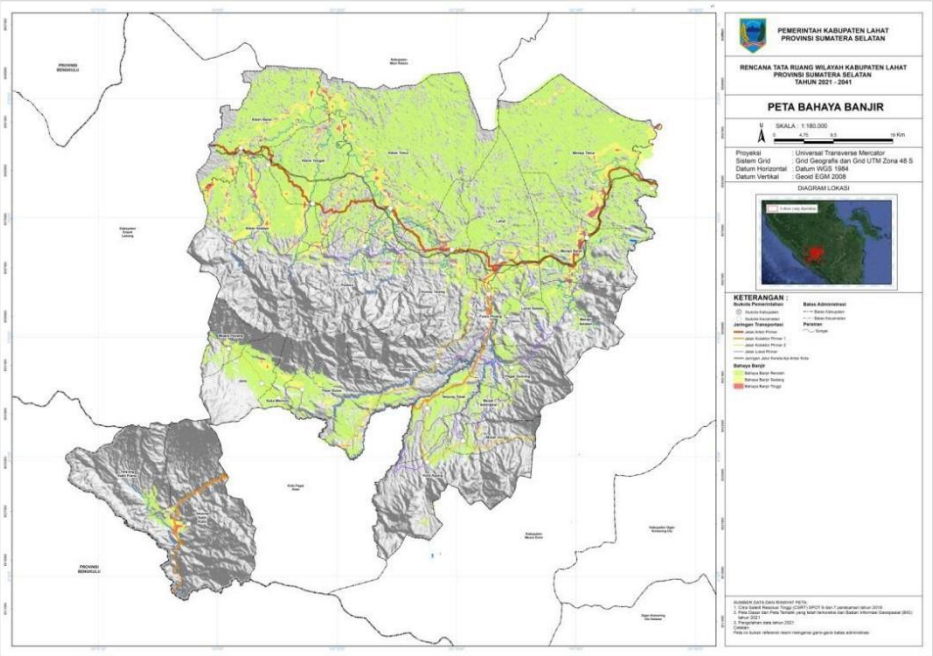

Gambar 4.2. Peta Daerah Banjir

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

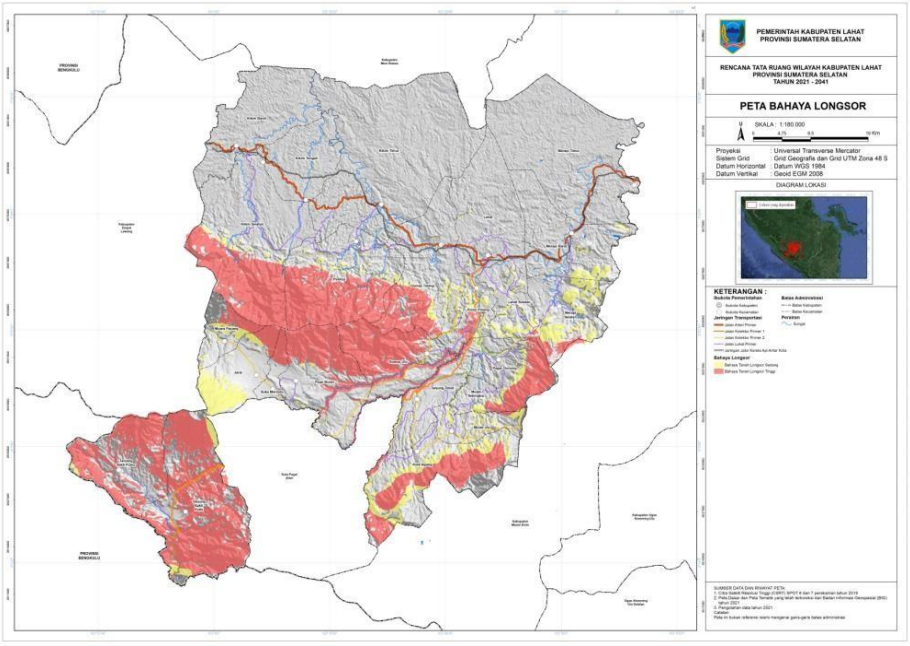

Gambar 4.3. Peta Bahaya Longsor

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

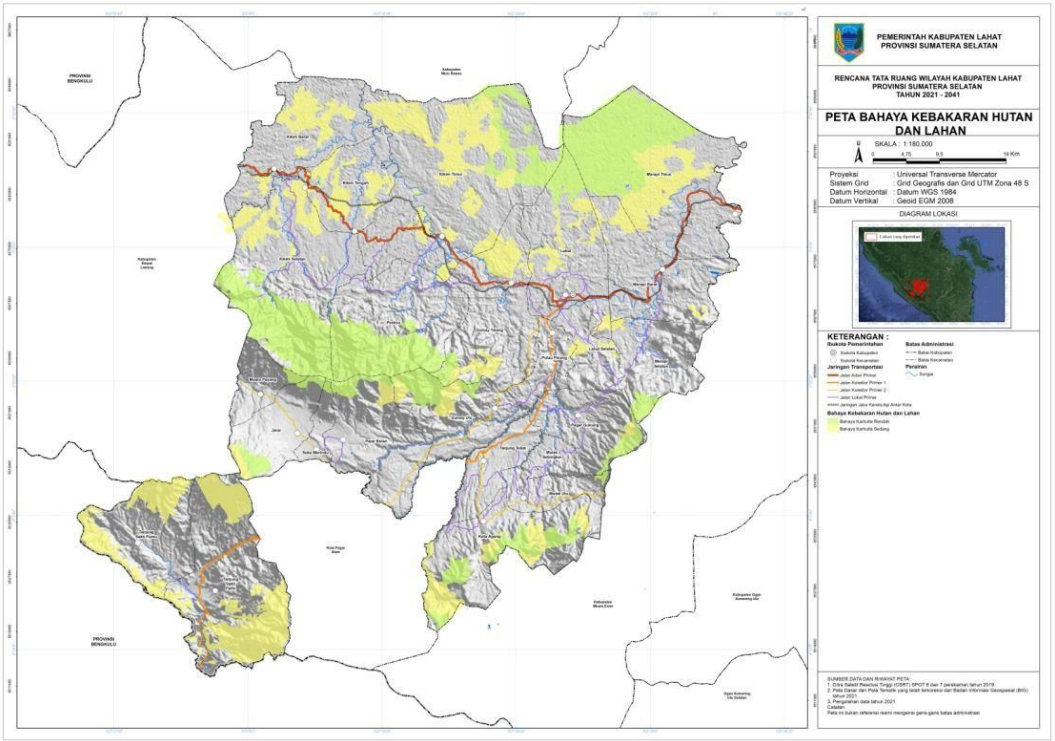

Gambar 4.4. Peta Rawan Karhutla

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

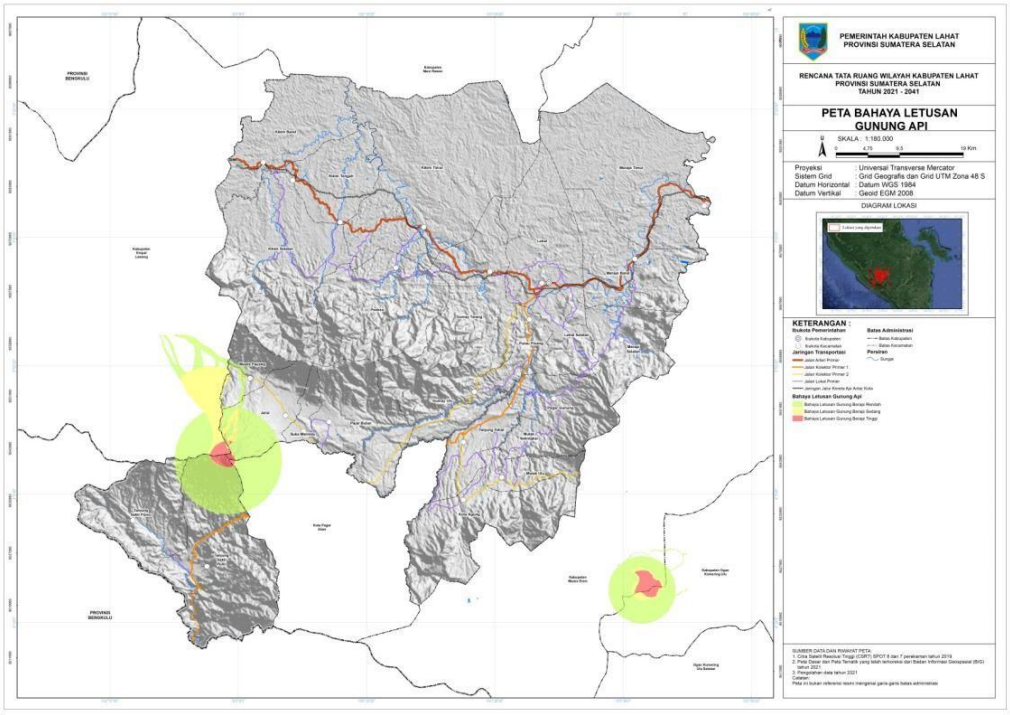

Gambar 4.5. Peta Gunung Berapi

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

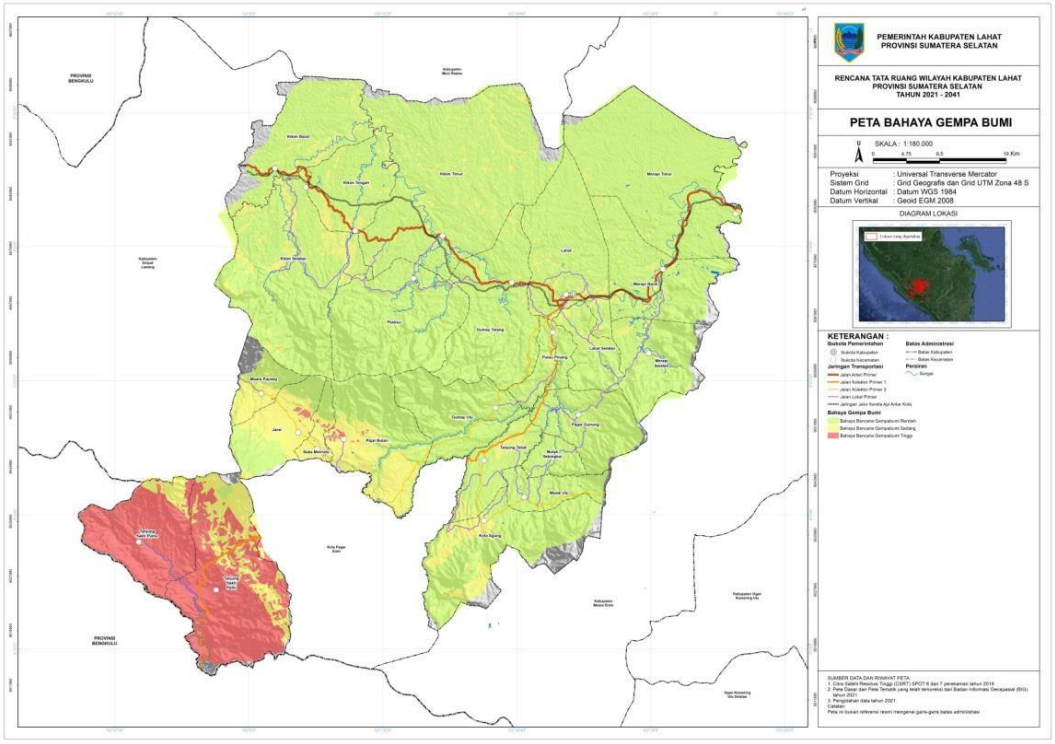

Gambar 4.6 Peta Rawan Gempa Bumi

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

4.2 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Lahat mencapai 439.567 jiwa yang terdiri atas 224.884 jiwa penduduk laki-laki dan 214.683 jiwa penduduk perempuan.

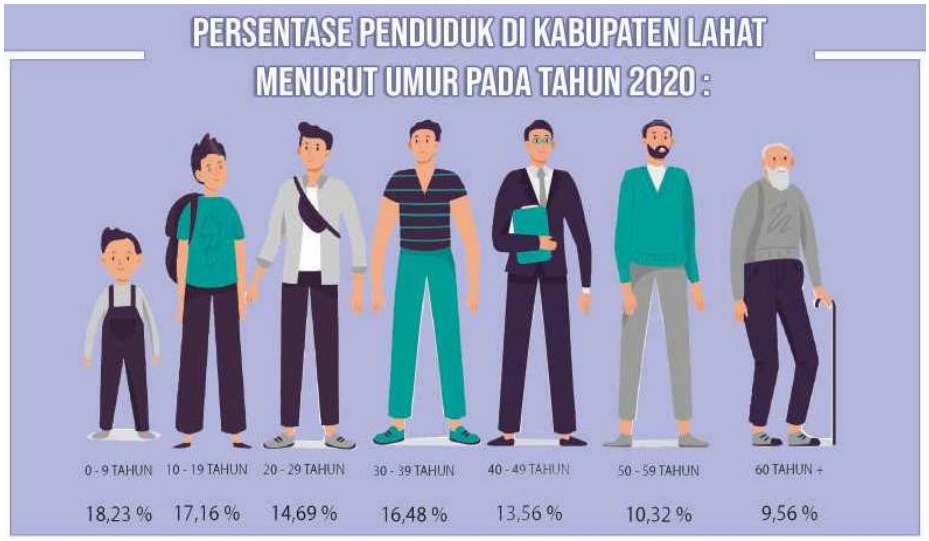

Gambar 4.7 Persentase Penduduk di Kabupaten Lahat

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Untuk mengetahui jumlah penduduk serta laju pertumbuhan, digambarkan dalam grafis berikut:

Tabel 4.6

Laju Populasi Penduduk per Tahun

Kecamatan *Subdistrict*	*Penduduk (ribu) Population (thousand)*		*Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)*	
	2020	*2021*	*2020*	*2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Sakti Pumi	16,82	16,94	1,09	0,96
Tanjung Sakti Pumu	14,52	14,60	0,89	0,69
Kota Agung	13,62	13,74	1,23	1,15
Mulak Ulu	12,57	12,66	1,05	0,90
Tanjung Tebat	8,82	8,90	1,28	1,21
Mulak Sebingkai	5,71	5,73	0,81	0,58
Pulau Pinang	9,87	10,04	2,17	2,40
Pagar Gunung	12,95	13,04	1,10	0,97
Gumay Ulu	5,58	5,62	1,09	0,96
Jarai	20,51	20,56	0,63	0,34
Pajar Bulan	12,85	12,94	1,03	0,88
Muara Payang	8,90	8,93	0,64	0,36
Sukamerindu	8,05	8,08	0,84	0,63
Kikim Barat	17,90	18,18	1,92	2,07
Kikim Timur	31,99	32,52	2,02	2,20
Kikim Selatan	17,34	17,54	1,54	1,56
Kikim Tengah	10,05	10,21	1,99	2,16
Lahat	107,51	108,13	0,95	0,78
Gumay Talang	12,94	13,24	2,72	3,13
Pseksu	9,04	9,12	5,00	1,18
Lahat Selatan	13,21	13,82	1,25	6,19
Merapi Barat	25,70	26,27	2,57	2,93
Merapi Timur	25,23	25,66	2,07	2,27
Merapi Selatan	8,39	8,47	1,32	1,26
Kabupaten Lahat/ *Lahat Regency*	**430,07**	**434,94**	**1,47**	**1,51**

https://lahatkab.bps.go.id

Sumber: Lahat Dalam Angka, 2022

Bertambahnya jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Lahat menyebabkan bertambahnya masalah kependudukan terutama dalam

penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

4.3.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.3.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Namun dari hitungan – hitungan tersebut PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, karenanya PDRB merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Dimana PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 2014 s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Berdasarkan data BPS, PDRB atas dasar harga berlaku dengan

migas Kabupaten Lahat tahun 2021 terhitung sebesar 118.613,33 trilyun rupiah atau tumbuh sebesar 7.4 persen dari tahun sebelumnya (2020). Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13.002,37 trilyun rupiah dengan pertumbuhan 3.6 persen.

Persentase distribusi PDRB atas harga berlaku yang paling terbesar adalah di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai 35,74 persen. Sedangkan, sektor yang paling sedikit adalah disektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0.03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2021 mencapai 4,63 persen.\

Grafik 4.1

Perkembangan PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2016-2021

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB Kab Lahat atas harga berlaku tercatat sebesar 15,035 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 18,613 juta rupiah

4.3.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya berkaitan

dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, sepertinya tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Lahat.

Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai komoditas. Komoditas tersebut dikelompokan menjadi 7 kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi.

Untuk mengukur lajur inflasi diperlukan survey biaya hidup dan juga survey kebutuhan pasar untuk mengetahui harga konsumen. Di Kabupaten Lahat tidak melaksanakan survey tesebut, sehingga untuk mengetahui laju inflasi di Kabupaten Lahat, digunakanlah data dari Kota Lubuk Linggau sebagai kota terdekat dari Lahat sebagaimana berikut :

Tabel 4.7

Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Lahat

Bulan *Month*	Makanan, Minuman dan Tembakau *Food, Beverages and Tobacco*	Pakaian dan Alas Kaki *Clothing and Footwear*	dan Bahan Bakar Rumah Tangga *Housing, Water, Electricity, and Household Fuels*
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/*January*	1,00	-0,04	-0,24
Februari/*February*	-0,49	0,05	-0,12
Maret/*March*	-0,03	0,00	0,08
April/*April*	0,56	0,39	0,29
Mei/*May*	0,05	1,00	0,21
Juni/*June*	-0,41	0,01	-0,01
Juli/*July*	-0,49	0,00	0,10
Agustus/*August*	-0,87	0,12	0,26
September/*September*	0,19	0,01	0,53
Oktober/*October*	0,28	0,02	0,95
November/*November*	0,86	0,08	-0,12
Desember/*December*	1,03	0,00	0,00
2021	0,54	0,10	0,36

https://lahatkab.bps.go.id

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.4 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Lahat tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 4.8

PDRB Kabupaten Lahat menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/*Industry*		2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	2 677,44	2 740,91	2 784,01	2 813,21	2 921,36
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	4 049,51	4 247,58	4 629,03	4 702,86	5 068,88
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	482,26	508,57	532,18	540,53	549,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	43,31	51,35	59,49	68,96	74,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,04	3,26	3,54	3,74	3,78
F	Konstruksi/*Construction*	908,82	929,18	953,53	970,15	976,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1 177,45	1 251,24	1 362,14	1 263,97	1 310,02
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	117,39	119,40	122,43	114,57	116,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	112,69	122,49	134,83	125,35	131,37
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	112,62	114,93	120,40	130,32	135,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	185,33	187,75	189,96	191,38	193,28
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	289,49	299,20	308,60	306,35	313,91
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	4,69	4,95	5,23	5,08	5,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	616,42	639,11	650,55	662,69	665,01
P	Jasa Pendidikan/*Education*	335,89	348,23	362,89	355,99	360,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	93,40	95,87	99,95	105,98	109,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	55,55	59,68	63,60	66,31	67,04
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42	13 002,37

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.5 Indeks Gini

Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Kabupaten Lahat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menekan kesenjangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Semakin kecil angka gini rasio berarti permerataan ekonomi semakin baik. Perkembangan gini rasio Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2019-2021 mendorong Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang atau terisolir akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pada tahun 2019 – 2020 Gini rasio Kabupaten lahat stagnan di angka 0,33 dan mulai membaik pada tahun 2021 dengan Gini rasio sebesar 0,30. Gini Rasio Kabupaten Lahat pada tiga tahun terakhir lebih baik dari Provinsi Sumsel dan Nasional.

Tabel 4.9 Indeks Gini Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021

Indeks Gini	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	0,33	0,33	0,30
Provinsi Sumsel	0,33	0,34	0,34
Nasional	0,38	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

4.3.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2014-2021 mengalami penurunan dari 18,02% di tahun 2014 menurun menjadi 16,46% pada tahun 2021. Penurunan tertinggi tejadi pada tahun 2019 dengan presentasi penduduk miskin mencapai 15,92 dan angka tersebut naik sampai mencapai angka 16,46% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya diakibatkan oleh pademi covid-19 yang membuat perekonomian dunia anjlok termasuk naiknya angka kemiskinan daerah dan juga nasional. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat antara lain disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran.

4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. ada 3 aspek yang menjadi dimensi pengukuran IPM yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara umum IPM di Kabupaten Lahat masih kalah dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumsel dan IPM Nasional. Begitu juga dengan IPM Kab. Lahat tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan dari 67,62 pada tahun 2019, menurun 67,44 tahun 2020, dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sebesar 67,58.

Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021

IPM	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	67,62	67,44	67,58
Provinsi Sumsel	70,02	70,01	70,24
Nasional	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Berikut adalah perbandingan IPM kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan**.**

Grafik 4.3

IPM Kabupaten Lahat 2022

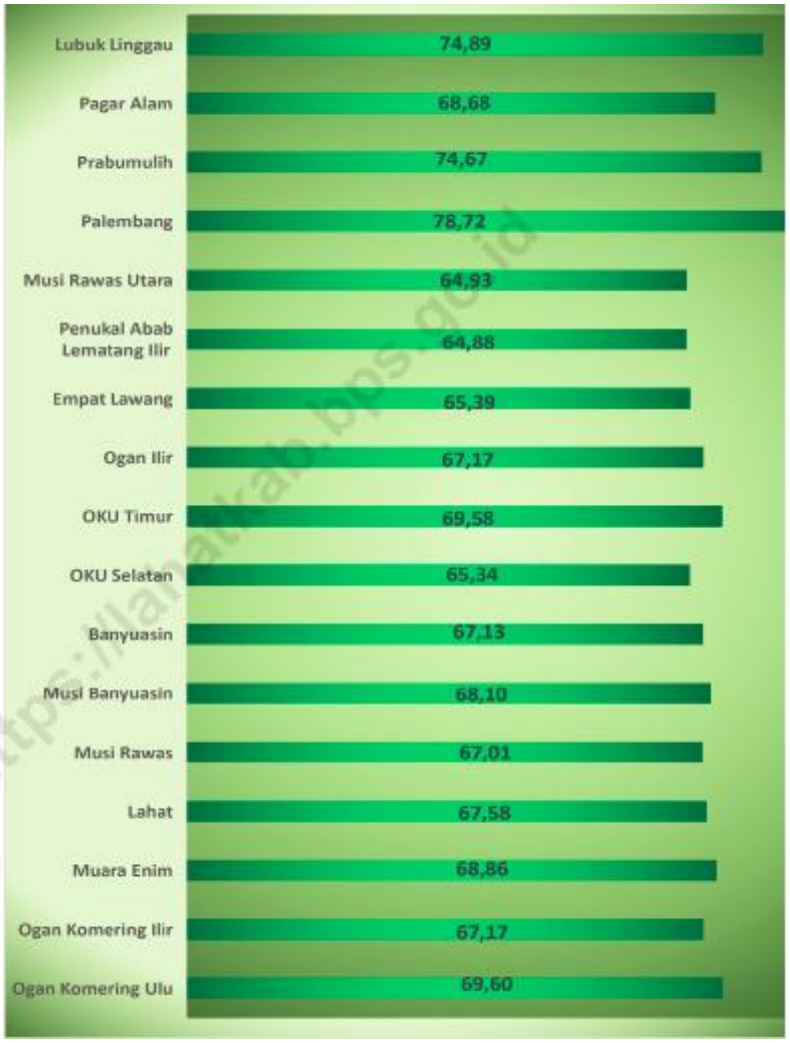

Sumber : BPS 2022

Untuk memperbaiki IPM suatau daerah, diperlukan penanganan serius khususnya pada 3 dimensi pengukuran IPM. IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Selain itu, dukungan infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan daerah. Perlu adanhya pemetaan secara serius untuk melihat dimensi mana yang masih kurang dan strategi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.

4.3.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fokus kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggungjawab.

Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

4.3.2.2.1 Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang

akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata- rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Pada tahun 2018, angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat untuk SD sederajat sebesar 148,128; SMP sederajat sebesar 249,772 dan SMA sederajat 353,339 siswa persekolah. Sedangkan rasio murid-guru untuk SD sederajat sebesar 1:09; SMP sederajat sebesar 1:12 dan SMA sederajat 1:12 siswa per guru. Jika dibandingkan dengan angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014, maka capaian rasio murid-sekolah menunjukan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014, rasio murid-sekolah untuk SD sederajat sebesar 158,06 yang artinya ketersediaan sekolah menampung murid sekolah SD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ketersediaan gedung SMP sederajat dan SMA sederajat. Dimana perkembangan rasio murid-sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014. Sedangkan untuk perkembangan rasio murid-guru kurun waktu 2014-2018 pada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Rasio murid-guru pada tahun 2018 lebih besar daripada rasio murid-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari

pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Dengan demikian, seiring bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA sederajat.

4.3.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2021 mencapai lebih dari 100 persen yaitu 109,75 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2021 APK sebesar 94,48 persen dan APK SMA sederajat sebesar 82,34 persen.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing- masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk

jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2021 APM Sekolah Dasar sebesar 98,83 persen. Hal ini menunjukan banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing-masing sebesar 86,98 persen dan 67,85 persen. Rendahnya APM juga menunjukan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

4.3.2.2.3 Angka Melek Huruf

Berdasarkan data BPS Kab. Lahat, angka melek huruf mencapai 98, 85%. Dari segi kelompok umur, pada usia 15-24 tahun angka melek huruf mencapai 100%. Pada usia 45 ke atas angka melek huruf mencapai 97,23.

4.3.2.3 Kesehatan

4.3.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah 25 < x > 85 (minimal 25 tahun dan maksimal
85 tahun). Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat kurun waktu 2018-2021 menunjukan peningkatan pada setiap tahunnya.

Tahun 2019, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat sebesar 65,76 tahun meningkat menjadi sebesar 66,04 tahun di tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebesar 66,16.

4.3.2.3.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,001 persen (target ≤ 1).

Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk.

4.3.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan

perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat pada kurun waktu tahun 2014-2017 berdasarkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama menunjukkan peningkatan yaitu dari tahun 2014 berjumlah 184.770 orang meningkat menjadi 201.240 orang pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukan penduduk usia ekonomi aktif yang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi jauh lebih banyak.

Perkembangan TPAK Kabupaten Lahat kurun waktu 2014- 2017 yaitu pada tahun 2014 mencapai 70,66% meningkat menjadi 72,74% di

tahun 2017. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan, sedangkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2017 sebesar 59,47 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang angkanya sebesar 60,26 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja wanita yang sedang mencari pekerjaan.

Salah satu isu dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 4,33 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang angkanya sebesar

5,62 persen. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat tersebut terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk laki-laki, yaitu dari 5,98 persen tahun 2014 menjadi 4,43 persen tahun 2017. Demikian juga dengan angka pengangguran pada penduduk perempuan turun dari 5,07 persen tahun 2014 menjadi 4,16 persen tahun 2017. Penurunan ini terjadi disinyalir karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga

kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Lahat.

4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lahat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah- tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Lahat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai

budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Kabupaten Lahat mempunyai kekayaan seni budaya yang beragam, hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Lahat dikenal dengan "Bumi Seribu Megalit" karena pada tahun 2012 dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia), yaitu Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Sebaran situs megalit berada di beberapa kecamatan seperti: Merapi Barat, Kota Lahat, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Pagar Gunung, Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Suka Merindu dan Tanjung Sakti. Peninggalan megalit di Kabupaten Lahat berupa: arca, arca menhir, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, dolmen, batu gelang, batu bergores, tetralith, bilik batu, lukisan bilik batu dan tempayan kubur. Jenis temuan megalit sebanyak 13 jenis hanya di temukan di Kabupaten Lahat.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lahat yang berbukit sehingga terdapat banyak air terjun, sungai, danau dan sumber air panas. Saat ini telah terdata di Kabupaten Lahat terdapat lebih kurang 126 air terjun dengan ketinggian dan keindahan yang berbeda. Pesona air terjun Kabupaten Lahat tersebar di beberapa kecamatan seperti: air terjun Milang di Kecamatan Merapi Barat. Air terjun Deras, air terjun Renalap di Kecamatan Merapi Selatan. Air terjun Ganya dan Serame di Kecamatan Kota Lahat. Air terjun Ketapang, Salak, Sumbing, Bidadari, Pandak, Pegadungan, Terlantang, Ujan Panas, Panjang, Kunduran, Gunung Nyawe, Gegas di Kecamatan Pulau Pinang. Air terjun Lintang Kecil, Lintang Besar, Buluh 7 Tingkat, Maung di Kecamatan Gumay Ulu. Air terjun Kesik, Jambat Akar, Kijeng di Kecamatan Tanjung Tebat. Air terjun Bale, Kerinjing, Nelindang, Semindang Rindu di Kecamatan Kota Agung. Air terjun Jernih, Suruman, Dayang Rindu, Penenangan, Tinggi, Napalan di Kecamatan Mulak Ulu, air terjun Ughul Kecil, Ughul Besar, Bemban, Laye di Kecamatan Pagar Gunung, air terjun Lawang Agung di Kecamatan

Muara Payang, air terjun 9 Panggung di Kecamatan Pseksu, air terjun Bukit Timur, Pama Salak, Gimo, Embun di Jarai, air terjun Pemandian Ratu di Kecamatan Tanjung Sakti. Sedangkan sumber air panas di Kabupaten Lahat terdapat di Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Sakti. Sumber air panas yang berada di Kecamatan Pagar Gunung terletak di Desa Padang dan Danau di hutan lindung Bukit Barisan pada ketinggian 850 mdpl. Sumber air panas di Kecamatan Tanjung Sakti berada di tengah Desa Pajar Bulan, sehingga mudah di jangkau. Sumber air panas ini terletak tepat di bawah jembatan desa Pajar Bulan. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dengan wisata arung jeram di sungai Manna. Kabupaten Lahat memiliki arena arung jeram di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Lematang, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Ketika berarung jeram selain menyusuri sungai juga akan melihat dan singgah di air terjun. Untuk arung jeram di sungai Lematang akan singgah di air terjun Salak dan arung jeram di Sungai Selangis Kecamatan Gumay Ulu akan melihat 6 air terjun dan singgah di air terjun Buluh (7 tingkat). Sedang arung jeram di Sungai Manna Kecamatan Tanjung Sakti akan dibawa menikmati jernihnya air sungai dan indahnya pemandangan sepanjang sungai Manna.

Selain sebagai sarana olahraga arung jeram, saat ini juga merupakan salah satu potensi pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lahat. Masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat selain berolahraga juga dapat menikmati suasana keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki Bukit Serelo atau Gunung Jempol merupakan sebuah bukit yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Letak bukit ini di desa Padang Kecamatan Merapi Selatan atau berjarak 27 km dari pusat Kota Lahat. Bukit dengan ketinggian 900 mdpl menjadi simbol Kabupaten Lahat. Di sini juga terdapat pelatihan gajah Sumatera dan dapat dijadikan sarana untuk rock climbing. Keberhasilan berbagai seni dan budaya serta olah raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai di antaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintah wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemeintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

4.4.2 Urusan Pendidikan

4.4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang pendidikan antara lain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang

masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2018 dilihat dari golongan usia 7-12 tahun sebesar 104,15 persen yang artinya terdapat 104 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 84,9 persen yang artinya penduduk usia 13-15 tahun ditemui 84 orang yang bersekolah. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 82,46 persen yang artinya pada tahun 2018, terdapat 82 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah faktor biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi pola angka partisipasi sekolah secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Angka Partisipasi Sekolah dalam kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan angka yang fluktuatif untuk setiap kategori kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi tahun 2018 pada kelompok umur 7-12 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.

4.4.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di setiap daerah. Keberhasilan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD, SLTP dan SLTA yang rusak berat dan penempatan guru di sekolah yang kekurangan guru.

4.4.2.3 Rasio Murid - Sekolah dan Rasio Murid - Guru

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan sekolah dalam menampung muridnya. Semakin kecil rasio antara murid dan sekolah maka semakin baik indikator pendidikan mengenai daya tampubg sekolah. Daya tampung sekolah yang semakin kecil tentunya menunjukkan bahwa sekolah lebih intensif dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas. Semakin rendah nilai rasio menunjukan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin membaik. Rasio murid terhadap sekolah lebih disebabkan oleh jumlah murid yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah.

Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2018 pada setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang relative lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat per tingkat pendidikan, tingkat SD memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 148,128. Selanjutnya adalah tingkat SLTP sebesar 249, 772 dan SLTA sebesar 353,339. Nilai rasio murid terhadap sekolah yang menunjukkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa penyebab nilai rasio yang menurun ini terjadi karena peningkatan fasilitas jumlah sekolah di Kabupaten Lahat.

Jumlah sekolah pada tahun 2018 bahkan meningkat pada berbagai tingkat pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah ini lebih disebabkan oleh jumlah murid yang bertambah diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang kemudian diikuti dengan upaya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Selanjutnya, angka rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu tahun tertentu. Semakin kecil rasio murid terhadap guru tentunya menunjukan semakin baiknya pendidikan yang bisa diberikan guru terhadap muridnya. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2014- 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukan nilai fluktuatif. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukan nilai yang semakin

besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pengajaran guru mengalami penurunan karena beban murid yang harus diajar lebih banyak pada tahun 2018 sedangkan jumlah guru berkurang sehingga menyebabkan guru menjadi kurang intens memperhatikan muridnya.

Pada jenjang SD, 1 orang guru mengawasi secara rata-rata 9 orang murid, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang murid dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 12 orang murid. Fenomena tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dimana indikator kesejahteraan taraf pendidikan yang baik diterima pada setiap masyarakat akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula.

4.4.3 Urusan Kesehatan

Gambaran umum kesehatan di Kabupaten Lahat menunjukan derajat atau status kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, morbiditas, imunisasi, dan angka harapan hidup. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

4.4.3.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk dapat diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah maupun swasta seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan lain-lain. Selain itu juga mencakup sarana pendukung kesehatan seperti tempat praktek dokter, bidan, poliklinik dan posyandu. Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lahat kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menunjukan peningkatan, begitu pula halnya

dengan jumlah tenaga kesehatan.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Lahat terdapat 2 unit rumah sakit, 33 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu, 1 unit rumah bersalin. Sementara itu jumlah apotik 19 buah, klinik/balai pengobatan sebanyak 13 buah dan optikal sebanyak 4 buah yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 terdiri dari dokter sebanyak 28 orang, perawat sebanyak 167 orang, bidan sebanyak 297 orang, dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Hal tersebut dapat menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesadaran pentingnya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis serta partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan dengan tenaga medis yang semakin tinggi. Akses masyarakat terhadap bidan desa yang semakin mudah akan mengurangi angka kematian bayi sekaligus juga meningkatkan angka harapan hidup.

4.4.3.2 Morbiditas

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dijadikan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4.4 TATA RUANG

4.4.4.1 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara

operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sebagai salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, maka jaringan irigasi tersebut haruslah dalam kondisi baik sehingga kebutuhan air irigasi bagi pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi baik untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi < 10% dari total panjang saluran irigasi, demikian sebaliknya kondisi rusak untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi > 10% dari total panjang saluran irigasi. Saluran irigasi di Kabupaten Lahat seluas
13.348 ha, yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang. Pada awal tahun 2017 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,10% yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 terlihat meningkat dan menunjukan perkembangan yang baik. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 61,84 meningkat menjadi 72,88 atau seluas 9.729 hektar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lahat kedepan yaitu perlu menjaga dan mempertahankan luasan daerah irigasi agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kewenangannya, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lahat sebanyak 214 Daerah Irigasi dengan Luas 13.348 hektar, sedangkan untuk kewenangan Provinsi Sumsel sebanyak 8 Daerah Irigasi dengan luas 10.443 hektar.

4.4.4.2 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lahat masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim PK RTRW Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lahat.

Hasil dari Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan hasil penilaian per aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek maka RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 perlu direvisi. Selain itu, penilaian terhadap perubahan RTRW berdasarkan beberapa kajian didapat hasil total perubahan sebesar 18%, yang artinya tidak perlu dilakukan pencabutan peraturan Daerah tetapi hanya perlu perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

Beberapa rekomendasi dalam revisi RTRW berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 sebagai berikut:

a. Revisi Peraturan Daerah

   Perubahan peraturan daerah disebabkan antara lain adanya perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah kecamatan. Selain itu perubahan peraturan daerah dilakukan untuk mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

b. Revisi terhadap Materi Teknis

   Revisi terhadap materi teknis akan disesuaikan dengan perubahan pada Peraturan Daerah serta mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

c. Revisi terhadap peta

   Revisi terhadap peta-peta juga diperlukan untuk memberikan gambaran data spasial terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 yang mengalami revisi. Revisi peta meliputi perubahan batas administrasi, perubahan data-data spasial yang dipersyaratkan dalam dokumen RTRW, perubahan peta-peta rencana yang meliputi peta

struktur ruang, peta pola ruang dan peta kawasan strategis.

4.5 FOKUS URUSAN DASAR

4.5.1 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari gangguan luar dan sebagai tempat tinggal untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Untuk itu, rumah diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Saat ini rumah merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Dengan adanya data perumahan dapat menggambarkan sampai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain akses rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya. Permasalahan air minum, sanitasi dan sumber listrik perlu menjadi perhatian, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lahat.

4.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk. Dalam rangka mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) diperlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai hal dimaksud. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, dimana permasalahan akses air minum, kawasan kumuh dan sanitasi yang layak sudah menjadi prioritas nasional merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Capaian rata-rata Kabupaten Lahat untuk akses air bersih tahun 2018 sebesar 43,70% masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 72,99% dan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,84%. Angka capaian akses air minum layak Kabupaten Lahat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 45,83%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan akses air minum layak di Kabupaten Lahat semakin rendah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan capaian akses universal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik melalui hibah, CSR, APBN, APBD dan lain-lain.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam upaya mendorong capaian akses universal yang telah dicanangkan secara nasional (100-0-100) pada tahun kedepan untuk akses air minum antara lain: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, merencanakan proyeksi kebutuhan penyediaan sarana air minum agar dapat berkelanjutan, membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Penyediaan air minum disalurkan ke seluruh konsumen, diantaranya sosial (umum; khusus), non niaga (rumah tangga; instansi pemerintah), niaga (kecil; besar) dan khusus (pelabuhan; lainnya). Pada tahun 2017, banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat mencapai 6.644 pelanggan yang terdiri dari jenis konsumen sosial, konsumen niaga, non niaga, industri dan khusus. Secara rinci perkembangan banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat.

4.5.3 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat, pada tahun 2018 telah melaksanakan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti halnya juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok daerah.

Masyarakat sebagai salah satu mitra aparat keamanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib serta bebas dari penyakit masyarakat diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pesan moral dalam perwujudannya. Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan sebanyak 10 pelanggaran. Selain itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan Peraturan Daerah yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan, penertiban penjualan minuman beralkohol, penertiban penginapan, hotel, losmen dan penertiban KTP. Disisi lain dilakukan juga kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas aparat.

4.5.4 Urusan Sosial

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat adalah untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat selaras dengan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan di bidang

kesejahteraan sosial terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar (Usia 6-18 tahun), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK) kelainan fisik/mental belum berusia 18 tahun, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai/wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendidik) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.Sedangkan yang dimaksud Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa hambatan di bidang sosial antara lain masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh masyarakat, peningkatan PMKS yang masih tinggi setiap tahunnya. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial meliputi berbagai jangkauan pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan bagi lansia terlantar, selain itu juga telah dilakukan peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial termasuk Penyempurnaan Sarana Prasarana Pusat Rehabilitas dan Panti Asuhan, Bantuan Tanggap Darurat kepada para korban bencana.

Hal penting lainnya yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencakup upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan, pemberdayaan KAT bukan hanya dilihat sebatas upaya untuk memathkan isolasi/keterasingan secara fisik dari kelompok- kelompok masyarakat lain di Lingkungannya tetapi lebih penting lagi adalah isu sosial, sehingga mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat sekitarnya.

Saat ini, permasalahan Urusan Sosial Kabupaten Lahat adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi oleh karena itu penanganan PMKS harus lebih di Optimalkan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lahat memerlukan target kinerja dan tambahan sumber dana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya melalui program yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan lima tahun mendatang yaitu melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Keluarga sangat Miskin (KSM) yang Memperoleh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Persentase KMS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan Indikator Kinerja Persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pelayanan

Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dengan Indikator Kenerja Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Terlantar yang dilatih Keterampilannya.

4.5.5 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kekerasan kepada Pemerintah. Pada tahun 2014, persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 10% menurun menjadi 7,2% di tahun 2018. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung oleh Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perkembangan angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah pada kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2014 untuk persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif sebesar 7,5% meningkat menjadi 10% di tahun 2018. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 3,1%, meningkat menjadi 4,98% di tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Kabupaten Lahat antara lain melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

4.5.6 Urusan Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Lahat saat ini jauh lebih kecil dari pada produksi dan ketersediaan pangan di kabupaten Lahat. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan mencapai 152.914.570.500 ton/tahun. Ketersediaan pangan terdiri dari indikator kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia.

Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dapat diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat dan Kecamatan Gumay Talang memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan. Namun dengan masuknya produk tanaman pangan dari kecamatan lain di dalam Kabupaten Lahat serta dari luar Kabupaten Lahat sehingga defisit bahan pangan di dua Kecamatan tersebut dapat di abaikan. Kekurangan bahan pangan di dua Kecamatan tersebut di sebabkan oleh luas lahan sawah yang dimiliki oleh kecamatan tersebut semakin sedikit.

4.5.7 Urusan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

4.5.7.1 Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih *(overflow)*. Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Permen LH No.17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakupi tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup

(basicneed). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m3/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard National Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8m3/kapita/tahun. Dari perhitungan air permukaan yang tersedia di kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600 m3/tahun. Kebutuhan air yang diperhitungkan terdiri dari kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pengairan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri Kebutuhan air domestik dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita.

Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kebutuhan domestik, kebutuhan peternakan dan kebutuhan industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kabupaten Lahat masih mengalami surplus air sebesar 16.876.210.052,59 m3/tahun. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan ke konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan di tangani oleh PDAM.

Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16 % dari total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM kabupaten Lahat tahun 2017, kebutuhan air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.135,822 m^3/tahun dari total kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi kebutuhan air bersih domestik yang diperoleh dari hasil model dan kebutuhan air rumah tangga yang dilayani PDAM. Terdapat perbedaan signifikan, dikarenakan tidak semua sumber air rumah tangga di kabupaten Lahat menggunakan jasa layanan PDAM.

Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk kabupaten Lahat sebagai berikut:

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak 1.000 m^3/kapita/tahun menurut standar WHO maka kebutuhan air sebesar 11.096.656,90 m^3atau 5% dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya mencapai 0,95

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, pertanian dan industri maka kebutuhan air sebesar 192.591.890 m^3/tahun atau 94 % dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya hanya mencapai 0,06.

4.5.7.2 Kualitas Air Sungai

Lima (5) sungai yang ada di Kabupaten Lahat telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestik (COD 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari), beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (COD 7.685 kg/hari dan BOD 1.750 kg/hari), beban pencemar dari limbah peternakan (COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari), beban pencemar dari limbah UMKM (COD 7.950 kg/hari dan BOD 1.755 kg/hari), dan beban pencemar dari limbah Industri. Sumber pencemar air sungai di kabupaten Lahat meliputi limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan limbah industri.

1) Beban pencemar dari limbah domestik

   Sungai Lematang dan sungai Selangis merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah domestik COD sebesar 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari.

2) Beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (non-titik)

   Sungai Lim merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan COD sebesar 7.685 kg/hari dan BOD sebesar 1. 750 kg/hari.

3) Beban pencemar dari limbah peternakan

   Beban pencemar dari limbah peternakan terbesar berasal hewan sapi dan kerbau dengan kandungan COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari

4) Beban pencemar dari limbah UMKM

Sungai Endikat paling tinggi beban pencemar dari limbah UMKM dengan jumlah COD sebesar 7.950 kg/hari dan BOD sebesar 1.755 kg/hari.

5) Beban pencemar dari limbah Industri

Sungai Lematang merupakan sungai dengan jumlah industri terbanyak yang membuang limbah sebanyak 18 industri.

Pada bidang persampahan, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 120.922,53 ton/tahun dan penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kecamatan Lahat. Pelayanan sampah di kabupaten Lahat masih terpusat di daerah perkotaan.. Berbagai alternatif pengelolaan sampah dapat diarahkan kepada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah, sehingga volume sampah dapat dikurangi.

Timbulan sampah di Kabupaten Lahat telah melampaui dari kapasitas yang ada. Dalam pengelolaan sampah dapat melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai sumber timbulan sampah seperti permukiman, industri, pasar, perkantoran, dan lain- lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang berada di Kabupaten Lahat tetapi masih kekurangan Fasilitas dalam pengolahan dan penampungan sampah. Saat ini fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Lahat.

4.5.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lahat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian persentase penduduk yang belum memiliki KK meningkat pada Tahun 2018 sebesar 25,5%. Dalam pemenuhan penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP pada tahun 2018 telah mencapai 85%, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebesar 20% dan Akta Kematian sebesar 14%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi

Kependudukan dan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang baik dan sesuai prosedur.

4.5.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2017, dalam rangka meningkatkan pasar desa yang modern, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang ekonomi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat mengadakan pembinaan pengelolaan pasar desa yang difokuskan pada 25 pasar desa di Kabupaten Lahat. Dengan harapan pasar desa tersebut akan menjadi pasar yang sehat, nyaman, aman, bersih dan memiliki manajemen pengelolaan yang profesional sehingga kesejahteraan pedagang meningkat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lahat juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 58 desa di wilayah Kabupaten Lahat.

Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menuju desa swasembada, masyarakat Desa Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berperan secara aktif dalam menyukseskan program Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

4.5.10 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%) kurun waktu 2014-2018 menunjukan angka yang fluktuatif yaitu pada tahun 2014 adalah 73,04% meningkat menjadi 76,09% di tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 73,28%. Realisasi cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif telah melebihi target SPM sebesar 65%. Tercapainya indikator ini didukung oleh Program Keluarga Berencana seperti penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin,

pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, dan Program Pelayanan Kontrasepsi melalui pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi. Beberapa kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%), cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB dan Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan. Sedangkan kinerja yang belum memenuhi target SPM antara lain cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need dan Rasio PLKB/PKB (petugas/desa).

4.5.11 Urusan Perhubungan

Sejalan dengan peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan beberapa program seperti Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Saat ini transportasi Darat yang ada di Kabupaten lahat tahun 2017 berupa angkutan darat umum yang berjumlah 210 angkutan darat dengan jumlah penumpang 16.618 orang dengan menggunakan angkutan desa.

4.5.12 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo antara lain: pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan Pembinaaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pembinaaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan Komunikasi, Pembuatan Website Humas Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dilaksanakan juga Program kerja sama informasi dengan massa media, melalui kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat terlihat lebih baik. Hal tersebut, ditandai dengan semakin meningkatnya implementasi penggunaan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lahat. Saat ini Dinas Komunikasi dan informasi menerapkan publikasi berbasis online pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui website *www.lahatkab.go.id* dengan harapan data dan informasi Kabupaten Lahat dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan lengkap.

4.5.13 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Lahat sebanyak 358 koperasi menurun menjadi 168 koperasi di tahun 2018. Kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi sangat berpengaruh pada jalannya usaha koperasi tersebut.

Persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2018 sebesar 22,14% sedangkan untuk Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil sebesar 61,20%. Strategi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung upaya pencapaian target tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Lahat dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dan Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

4.5.14 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kerjasama di bidang penanaman

modal antara instansi pemerintah baik tingkat propinsi maupun lembaga pusat. Selain itu juga dilaksanakan temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lahat dengan pengusaha PMDN, dan Instransi terkait yang bertujuan untuk terwujudnya konsep kemitraan dan pengembangan di bidang investasi serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Lahat. Bagi pemohon yang akan membayar pajak dan retribusi atas izin yang dimohonkan cukup di Kantor DPM dan PTSP Kabupaten Lahat, selain itu pula bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Kantor Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.

4.5.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Pada kurun waktu 2014-2018, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga adalah meningkatnya prestasi generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga. Pembangunan di bidang kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Lahat. Kegiatan difokuskan pada pembekalan bagi pemuda dengan pelatihan keterampilan dan wawasan tentang kewirausahaan dengan harapan mampu mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembibitan dan pembinaan atlit berprestasi di berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing dan berprestasi pada pertandingan olahraga ditingkat regional maupun nasional.

4.5.16 Urusan Perpustakaan

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan kurun waktu 2014-2018 menunjukan tren meningkat, seiring dengan meningkatnya persentase minat baca masyarakat Kabupaten Lahat. Capaian kinerja Jumlah pengunjung, peminjam dan koleksi buku pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam menunjang kegiatan dan Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan khususnya meubelair dan sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka. Untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Kabupaten Lahat, perlu adanya Perpustakaan Keliling. Selain itu, untuk menunjang minat baca pada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak. Ruangan ini rencananya akan dibuat menarik dengan dihiasi gambar-gambar warna-warni sesuai dunia anak-anak. Diharapkan dengan ruangan yang demikian, anak-anak lebih suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mendapatkan informasi lewat internet disediakan sarana komputer untuk akses internet secara gratis. Begitu juga bagi mereka yang membawa sendiri komputer laptop atau PDA, disediakan juga fasilitas jaringan internet wirreless.

Dinas Perpustakaan telah menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik untuk tertibnya administrasi. Dengan sarana ini pengunjung perpustakaan cukup menggunakan kartu elektronik ini untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis komputer akan meng-update ke data base komputer.Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan perlu menyediakan informasi-informasi bagi masyarakat luas mengenai koleksi buku-buku di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan kedepan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada masyarakat antara lain peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemenuhan erpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang lengkap

dan modern, meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, meningkatkan pengembangan budaya baca dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan/pemustaka, meningkatkan pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan ke desa-desa, membangun gedung perpustakaan yang refresentatif, mewujudkan perpustakaan desa yang mandiri, mewujudkan perpustakaan berbasis digital secara nasional dan adanya ruang baca anak.

4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

4.6.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat seluas 15.400 km² yang terdiri dari perairan umum, kolam, tebat dan sawah. Lahan tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Lahat sebesar 10.974 ton dengan jenis ikan yaitu nila, gurame, lele, patin, mas dan ikan lokal perairan umum.

Pada umumnya pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, untuk dikonsumsi pribadi dan belum dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Lahat. Ada beberapa jenis kelompok perikanan di Kabupaten Lahat yaitu Kelompok Budidaya Perikanan sebanyak 89 kelompok, Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan sebanyak 2 kelompok. Selanjutnya, untuk pengembangan pembangunan di sektor perikanan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ditempatkan di beberapa kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lahat terdiri dari BBI Kota Agung seluas 6.202 m², BBI Tanjung Sakti seluas 6.000 m², KAD Tanjung Sirih sebanyak 1 unit, Pasar Benih Ikan sebanyak 1 unit, Pasar Ikan Jarai sebanyak 1 unit, Laboratorium Kesehatan Ikan sebanyak 1 unit, dan Kantor UPTD PBI Kecamatan Lahat.

Berdasarkan data potensi dan permasalahan yang ada, maka dibuat rencana pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lahat, pemenuhan tingkat konsumsi ikan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan. Beberapa rencana pembangunan di bidang perikanan yaitu meningkatkan luas area lokasi 2 (dua) unit Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti.

4.6.2 Urusan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat terus menggali potensi wisata dan melakukan promosi kepada wisatawan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja urusan pariwisata seperti meningkatkan promosi budaya dan pariwisata baik skala nasional maupun internasional, mengembangkan objek-objek wisata unggulan, pembangunan infrastruktur pada objek wisata dan sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat, diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Saat ini Kabupaten Lahat telah memiliki 5 (lima) hotel kelas bintang dan 7 (tujuh) hotel bukan kelas bintang. Sedangkan untuk rumah makan tercatat ada 151 rumah makan di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018 Kabupaten Lahat memiliki 86 tempat objek wisata alam, 4 objek wisata buatan dan 11 tempat objek wisata budaya yang tersebar di 16 kecamatan. Pada tahun 2018, jumlah kamar akomodasi yang tersedia di hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lahat ada sebanyak 520 kamar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 273 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel dan tenaga kerja pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan kamar sehingga

hotel harus menambah tenaga kerja dan kamar huni setiap tahunnya.

4.6.3 Urusan Pertanian

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah seluas 17.158 hektar dan lahan bukan sawah sawah seluas 342.213 hektar. Salah satu sektor unggulan dalam pertanian adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tahun 2018, produksi padi (padi sawah dan Padi ladang) sebanyak 229.776 ton, produktivitas 54,30 kuintal per hektar dengan luas panen 42.029 hektar padi sawah dan 1.384 hektar padi ladang.

Selanjutnya untuk jenis tanaman palawija mencakup jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2018, produksi palawija yang paling banyak adalah produksi jagung yaitu sebesar 7.876 ton, disusul ubi kayu sebesar 2.125 ton, ubi Jalar sebesar 2.068 ton, Kedelai sebesar 422 ton, kacang tanah sebesar 198 ton, dan yang terkecil adalah produksi kacang hijau sebesar 160,5 ton. Selain tanaman palawija di Kabupaten Lahat juga terdapat tanaman buah-buahan.

Selanjutnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Lahat meliputi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe, cabe rawit, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam dan sebagainya.

Selain tanaman pangan terdapat banyak jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja yang cukup menonjol adalah kopi dan karet, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan kopi paling luas sebesar 54.441 ha jika dibandingkan dengan luas tanaman perkebunan lainnya yaitu karet sebesar 43.232 hektar, kelapa sawit sebesar 13.636 hektar, dan kakao sebesar 4.366 hektar.

Selain Urusan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lahat juga melaksanakan Urusan Peternakan di Kabupaten Lahat. Adapun hasil peternakan terdiri dari daging, telur dan susu. Produksi daging Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, produksi daging sebesar 2.353 ton meningkat menjadi 4.810 ton di tahun 2018. Demikian juga halnya dengan produksi telur, dimana pada tahun 2014 produksi telur mencapai 2.232 ton meningkat menjadi sebesar 2.443 ton di tahun 2018.

Hasil peternakan selain dari produksi daging dan telur, juga bisa dihitung dari populasi ternak. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lahat terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil/unggas. Adapun yang termasuk populasi ternak besar adalah sapi (termasuk sapi perah), kerbau dan kuda, sedangkan yang termasuk populasi ternak kecil/unggas adalah kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur dan itik. Pada tahun 2018, populasi ternak besar yang paling banyak adalah populasi sapi sebanyak 11.382 ekor dibandingkan populasi ternak besar lainnya seperti kerbau sebanyak 1.668 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil dan unggas yang paling banyak adalah populasi ternak kambing sebanyak 13.920 ekor dan populasi ternak ayam pedaging sebanyak 2.282.566 ekor.

4.6.4 Urusan Perdagangan

Pada tahun 2018 , sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dilihat dari jenisnya berjumlah 1.833 fasilitas. Jenis sarana kios dan rumah makan merupakan jenis sarana perdagangan dengan persentase tertinggi yaitu 35,46 persen atau masing-masing sebanyak 650 kios, sedangkan fasilitas pasar umum di Kabupaten Lahat berjumlah 9 pasar.

4.7 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

4.7.1 Urusan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lahat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun muatan laporan tersebut menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Elemen data yang dihimpun berasal dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Tim Penyusun, dan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dilanjutkan dengan *self-asessment* oleh Tim Evaluasi Daerah dan Setelah dilakukan penyempurnaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.

4.7.2 Urusan Pengawasan

Capaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,1 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menunjukkan hasil yang baik.Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2018 adalah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap dapat mempertahankan nilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik atau predikat B.

4.7.3 Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada periode 2014-2018, Bappeda Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD dengan tepat waktu dan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lahat akan menerapkan perencanaan berbasis *e_planning*.

4.7.4 Urusan Keuangan

Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.917.046.551.222,32 atau 105% dari target pendapatan tahun anggaran 2018. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp112.549.070.975,37 atau 90,94% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.377.663.737.906,00 atau 106,20% dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 426.833.742.340,95 atau 105,47%.

Sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.834.893.019.295,00 atau 95,21% dari target belanja tahun anggaran 2018 yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.119.633.141.296,00 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 715.259.877.999,00.

Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2018, yaitu penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi). Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 berasal dari SILPA sebesar Rp 1.942.278.544,69. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah ditandai dengan penerimaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bagi Kabupaten Lahat.

4.7.5 Urusan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 6.761 orang dengan komposisi Eselon II.B sebanyak 31 orang, Eselon III.A sebanyak 75 orang, Eselon III.B sebanyak 137 orang, Eselon IV. A sebanyak 720 orang, Eselon IV.B sebanyak 233 orang, Eselon V.A sebanyak 17 orang, Jabatan Fungsional tertentu Ahli dan Terampil sebanyak 3.548 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2000 orang.

Persentase ASN dilingkungan Pemkab Lahat berdasarkan golongan pada tahun 2018 meliputi golongan IV.C sebanyak 32 orang, golongan IV.B sebanyak 318 orang, golongan IV.A sebanyak 1.093 orang, golongan III.D sebanyak 1.219 orang, golongan III.C sebanyak 826 orang, golongan III.B sebanyak 1114 orang, golongan III.A sebanyak 936 orang,golongan II.D sebanyak 187 orang, golongan II.C sebanyak 561 orang, golongan II.B sebanyak 286 orang, golongan II.A sebanyak 139 orang, golongan I.D sebanyak 19 orang, golongan I.C sebanyak 18 orang, golongan I.B sebanyak 9 orang dan golongan I.A sebanyak 4 orang.

4.7.6 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lahat. Badan ini merupakan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lahat karena minimnya publikasi hasil penelitian terkait bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan serta kemasyarakatan dan masih rendahnya kehadiran inovasi (produk, proses, organisasi, pasar dan perilaku) untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lahat.

Bab V Hasil Kegiatan

5.1 Sebaran Responden

5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

Tabel 5.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

kecamatan	Jumlah Responden	Percent
Tj Sakti PUMU	15	3,9
Sukamerindu	6	1,6
Pulau Pinang	9	2,4
Pseksu	9	2,4
Pajar Bulan	15	3,9
Pagar Gunung	14	3,6
Mulak Ulu	8	2,0
Mulak Sebingkai	7	1,8
Muara Payang	10	2,6
Merapi Timur	24	6,3
Merapi Selatan	10	2,6
Merapi Barat	22	5,8
Lahat Selatan	11	2,8
Lahat	75	19,6
Kota Agung	15	3,9
Kikim Timur	20	5,2
Kikim Tengah	10	2,6
Kikim Selatan	17	4,4
Kikim Barat	20	5,2
Jarai	21	5,5
Gumay Ulu	6	1,6
Gumay Talang	12	3,1
Tj Sakti PUMI	17	4,6
Tj Tebat	10	2,6

Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui responden berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Tabel 5.2 Nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan

No	Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2020
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanjung Sakti Pumi	18	18	18	18	18
2	Tanjung Sakti Pumu	14	14	14	14	14
3	Kota Agung	22	22	22	22	22
4	Mulak Ulu	26	16	16	16	16
5	Tanjung Tebat	14	14	14	14	14
6	Mulak Sebingkai	-	10	10	10	10
7	Pulau Pinang	14	10	10	10	10
8	Pagar Gunung	20	20	20	20	20
9	Gumay Ulu	10	10	10	10	10
10	Jarai	21	21	21	21	21
11	Pajar Bulan	20	20	20	20	20
12	Muara Payang	7	7	7	7	7
13	Sukamerindu	10	10	10	10	10
14	Kikim Barat	19	19	19	19	19
15	Kikim Timur	32	32	32	32	32
16	Kikim Selatan	17	18	18	18	18

17	Kikim Tengah	9	9	9	9	9
18	Lahat	35	29	29	29	29
19	Gumay Talang	15	15	15	15	15
20	Lahat Selatan	-	10	10	10	10
21	Pseksu	11	11	11	11	11
22	Merapi Barat	19	19	19	19	19
23	Merapi Timur	14	14	14	14	14
24	Merapi Selatan	9	9	9	9	9
	Kabupaten Lahat	**367**	**377**	**377**	**377**	**377**

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

Tabel 5.3 jumlah penduduk serta laju pertumbuhan menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	16.820	1.09
Tanjung Sakti Pumu	14.520	0.89
Kota Agung	13.623	1.23
Mulak Ulu	12.572	1.05
Tanjung Tebat	8.820	1.28
Mulak Sebingkai	5.706	0.81
Pulau Pinang	9.867	2.17
Pagar Gunung	12.949	1.10
Gumay Ulu	5.583	1.09
Jarai	20.512	0.63
Pajar Bulan	12.853	1.03
Muara Payang	8.904	0.64
Sukamerindu	8.046	0.84
Kikim Barat	17.898	1.92
Kikim Timur	31.994	2.02
Kikim Selatan	17.340	1.54
Kikim Tengah	10.046	1.99

Lahat	107.506	0.95
Gumay Talang	12.938	2.72
Lahat Selatan	13.208	5.00
Pseksu	9.042	1.25
Merapi Barat	25.703	2.57
Merapi Timur	25.232	2.07
Merapi Selatan	8.389	1.32
Kabupaten Lahat	430.071	1.47
Hasil Registrasi	430.071	1.47
Hasil Proyeksi	412,957	0.87

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

Perbedaan kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu utuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat “pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilits sosial, ekonomi dan dan pemerintahan yang memadai. Namun di samping itu, pengembangan potensi daerah dengan memperlihatkan komoditas-komoditas unggulan sangat perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa konsentrasi jumlah penduduk yang menyebar secara tidak merata. Hal ini dapat kita ketahui dengan mudah dengan melihat perbedaan rata-rata jumlah penduduk per kilometer di masing-masing kecamatan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah oleh karena faktor luas wilayah kecamatan yang juga tidak merata. Perbedaan

kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu utuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilits sosial, ekonomi dan dan pemerintahan yang memadai.

Tabel 5.4 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	**Persentase Penduduk**	**Kepadatan Penduduk per km2**
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	3.91	62.07
Tanjung Sakti Pumu	3.38	63.24
Kota Agung	3.17	82.27
Mulak Ulu	2.92	115.95
Tanjung Tebat	2.05	106.62
Mulak Sebingkai	1.33	89.99
Pulau Pinang	2.29	88.36
Pagar Gunung	3.01	122.73
Gumay Ulu	1.30	64.17
Jarai	4.77	122.45
Pajar Bulan	2.99	87.97
Muara Payang	2.07	237.44
Sukamerindu	1.87	145.68
Kikim Barat	4.16	65.80
Kikim Timur	7.44	56.68
Kikim Selatan	4.03	138.94
Kikim Tengah	2.34	37.82

Lahat	25.00	999.13
Gumay Talang	3.01	51.83
Lahat Selatan	3.07	71.83
Pseksu	2.10	33.58
Merapi Barat	5.98	110.48
Merapi Timur	5.87	96.84
Merapi Selatan	1.95	41.92
Kabupaten Lahat	100.00	98.60
Hasil Registrasi	100.00	98.60
Hasil Proyeksi	100.00	94.67

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Tabel 5.5 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Usia	Frequency	Percent
< 20 Tahun	5	1,3
20 - 29 Tahun	80	20,9
30 - 39 Tahun	97	25,5
40 - 49 Tahun	98	25,6
> 50 Tahun	102	26,7
Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut kelompok usia di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 25,5% responden berusia 30-39 tahun, disusul 26,7% penduduk berusia 40-49 tahun, kemudian 20,9% penduduk berusia 20-29 tahun, lalu sebesar 17,4% penduduk berusia lebih dari 50 tahun, dan terakhir kelompok usia di bawah 20 tahan sebesar 1,3%. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah

masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut jenis kelamin di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 48,4% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 51,6% diantaranya responden berjenis kelamin perempuan, responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Sejalan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Lahat menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rasio jenis kelamin menurut kecamatan, laki-laki terhadap perempuan

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
Tanjung Sakti Pumi	105.90

Tanjung Sakti Pumu	107.90
Kota Agung	107.86
Mulak Ulu	104.66
Tanjung Tebat	104.40
Mulak Sebingkai	109.24
Pulau Pinang	104.46
Pagar Gunung	107.28
Gumay Ulu	112.44
Jarai	105.30
Pajar Bulan	107.98
Muara Payang	110.15
Sukamerindu	104.73
Kikim Barat	104.01
Kikim Timur	104.77
Kikim Selatan	104.55
Kikim Tengah	102.58
Lahat	101.60
Gumay Talang	106.22
Lahat Selatan	104.11
Pseksu	106.39
Merapi Barat	104.07
Merapi Timur	107.45
Merapi Selatan	105.56
Kabupaten Lahat	104.74
Hasil Registrasi	104.74
Proyeksi	104.74

Potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hal ini akan semakin memperberat persoalan kelangkaan modal karena untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi pada setiap tahunnya maka perlu dilakukan investasi secara besar-besaran (Jhingan,1992: 26-27). Laju

pertambahan penduduk yang beragam, dimana pertambahan penduduk yang cepat diiringi dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pemupukan modal merupakan kesulitan bagi negara berkembang. Output yang meningkat karena teknologi akan tertekan oleh pertambahan tersebut, akibatnya tidak ada perbaikan taraf hidup.

Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan dan sektor industri yang tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja. Navarrete (dalam Jhingan, 1992: 29) mengatakan: pengganggguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan, dimana pengalihan sejumlah tertentu faktor tenaga kerja ke bidang lain tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asal. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa produktivitas marjinal unit-unit faktor tenaga kerja tempat asal mereka kerja adalah nol atau menduduki nol atau bahkan negatif. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan berpenduduk padat pengangguran tersembunyi diperkirakan 25-30 persen dari tenaga kerja (di dalam pertanian). Dalam menentukan betapa penting arti pendidikan di masa pembangunan ekonomi, suatu negara tidak dapat mengaku dirinya maju, tanpa menyelenggarakan pendidikan di bidang peradaban industri (Cairncross dalam Jhingan, 1992: 70). Petani harus di bawah menuju perekonomian moneter dan tidak dibiarkan saja bergerak pada usaha tani pangan. Para pekerja harus dibiasakan bekerja pada jam kerja yang ditentukan di pabrik-pabrik untuk mendapat bayaran. Kota-kota harus tumbuh, begitu juga bank dan usaha bisnis. Hasil ilmu pengetahuan harus diterapkan di seluruh perekonomian, dimana harus muncul kelompok pemuda bisnis, administrasi dan politik, sebagai nyawa kehidupan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dalam mempertahankan momentum pembangunan. Faktor manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada efisiensi. Para ahli ilmu ekonomi modern 32 menyebutkan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Dalam mengetahui perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial, kemiskinan (poverty) merupakan indikator yang digunakan dalam menilai perkembangan suatu wilayah (Hill dan Williams, 1989: 195).

5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku

Tabel 5.7 Sebaran Responden Menurut Suku

Suku	Jumlah Responden	Prosentase
Lematang	89	23,3
Kikim	76	19,9
Pasemah	115	30,0
Lintang	4	1,0
Jawa	70	18,4
Sunda	4	1,0
Komering	2	0,4
Lampung	2	0,6
Lainnya	21	5,5
Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran suku di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 30% dari suku Pasemah sekaligus yang paling banyak, sedangkan suku komering hanya 0,4% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Lahat dikenal di Sumatera Selatan dengan 4 suku yang ada di sana sehingga disebut Lekipali.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut). Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani.

Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali. Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan di sini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi. Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten ini berjumlah 430.071 jiwa. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing. Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan China.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Diantara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya. Di Kabupaten Lahat orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain karena kota kabupatennya yakni Kota Lahat, merupakan daerah lintas antar provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima

transmigrasi. Penduduk pendatang yang terbanyak ialah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau dan Pirsus Senabing.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki “pihak ayah”, sehubungan dengan prinsip keturunan ini dalam masyarakat dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui gari laki-laki. Pada masyarakat dusun Tanjung Payang yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang yakni yang berasal dari keturnan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta ijin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat di pimpin oleh kepala desa “rie”, selain berbagai kepada pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun yakni orang yang dituakan dalam kampung. Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran yang bertugas mengawaso kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air hingga panen.

Seperti halnya masyarakat modern, Masyarakat Adat Suku Lahat juga memiliki sistem pemerintahan yang menjalankan tradisi suku tersebut. Dusun-dusun orang Suku Lahat dipimpin oleh Rie sebagai kepala pemerintahan setempat. Rie juga sekaligus menjadi kepala adat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala adat, Rie dibantu oleh tua-tua, atau yang dianggap sesepuh (orang yang

dituakan) di dusun tersebut. Lalu ada Penghulu atau disebut juga dengan Khatib. keduanya memiliki tugas memimpin hal-hal yang terkait dengan ritual-ritual keagamaan atau adat. Ada juga yang bertugas khusus mengatur soal persawahan, mulai dari menanam, pemakaian air hingga saat masa panen tiba. Jabatan ini disebut sebagai Ketua Ataran.

Di samping mempunyai sejumlah megalitik (batu besar/monumen kuno) berusianya ribuan tahun, Kabupaten Lahat pun mempunyai sejumlah lokasi tinggal tradisional yang berusia ratusan tahun. Rumah yang dinamakan sebagai ghumah baghi atau lokasi tinggal baghi (rumah tua) berada dibeberapa kecamatan. Dahulunya delapan kecamatan ini dikenal dengan nama Besemah Padang Libagh dan secara kultur adat istiadat sama dengan masyarakat Pagaralam yang dinamakan Besemah, yang dahulunya unsur dari Lahat.

Keberadaan lokasi tinggal baghi di delapan kecamatan ini tersebar di desa-desa laksana di Kecamatan Kota Agung, tampak ada di Desa Bangke, Mulak Ulu dan salah satunya ada di Desa Gramat. Beberapa rumah, kondisinya menyedihkan tergambar pada sebanyak bangunan. Sebagian lokasi tinggal yang rata rata usianya di atas ratusan tahun ini, tidak sedikit yang telah lapuk. Bahkan sejumlah diantaranya tak terurus dan terpinggirkan diantara rumah-rumah penduduk dengan desain yang lebih modern. Tak laksana rumah canggih saat ini, lokasi tinggal baghi makin terpingirkan. Maklum saja, desainnya yang klasik tidak unik warga guna mencontohnya ketika membangun. Jika merenovasi, tanpa sadar kemurnian rumah itu hilang. Tak ayal, keberadaannya sekarang terancam punah dan bermukim jadi kenangan.

5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 5.8 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah Responden	Prosentase Responden

1.	Tidak sekolah	11	2,8
2.	SD/Sederajat	96	25,2
3.	SLTP/Sederajat	92	24,0
4.	SLTA/Sederajat	151	39,6
5.	PT dan Sederajat	28	7,3
6.	Sekolah Nonformal (Ponpes dsb)	5	1,2
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran tingkat Pendidikan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 47% berpendidikan SMA sederajad, kemudian peringkat kedua sebesar 26% berpendidikan SD/Sederajad, lalu 19% berpendidikan SMP/Sederajad, untuk pendidikan tinggi sebesar 7,2%, dan masyarakat yang tidak sekolah sebesar 0,8% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Tabel 5.9 tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan **Educational Level**	**Laki-laki** **Male**	**Perempua** **Female**	**Jumlah** **Total**
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD Up to Primary School	15	5	20
SMP/Sederajat General Vocational Junior High School	31	13	44
SMA/Sederajat General/Vocational Senior High School	592	466	1 058
Diploma I, II/Akta I, II Diploma I, II/Akta I, II	71	163	234
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda Diploma III/Akta III/Bachelor	98	577	675
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D University Graduates	1 531	2 521	4 052
Jumlah/Total	**2 338**	**3 745**	**6 083**

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Angka partisipasi Pendidikan tersebut didukung dengan jumlah Lembaga

Tabel 5.10 sekolah yang ada di Kabupaten Lahat seperti pada table berikut:

No.	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	286	35	321	64	26	90	31	18	49	8	4	12	472
1	Kec. Kota Agung	13	0	13	5	1	6	1	0	1	0	0	0	20
2	Kec. Pulau Pinang	9	0	9	1	0	1	1	0	1	0	0	0	11
3	Kec. Jarai	10	2	12	1	1	2	1	1	2	1	0	1	17

4	Kec. Kikim Timur	27	5	32	6	3	9	3	1	4	0	1	1	46
5	Kec. Lahat	33	15	48	10	11	21	6	13	19	3	3	6	94
6	Kec. Mulak Ulu	10	2	12	2	0	2	1	0	1	1	0	1	16
7	Kec. Pajar Bulan	13	0	13	1	0	1	1	0	1	0	0	0	15
8	Kec. Kikim Selatan	14	1	15	4	0	4	2	0	2	0	0	0	21
9	Kec. Kikim Barat	17	2	19	4	2	6	1	1	2	0	0	0	27
10	Kec. Kikim Tengah	6	1	7	2	0	2	2	0	2	1	0	1	12
11	Kec. Tanjung Sakti Pumi	12	4	16	4	2	6	1	1	2	1	0	1	25
12	Kec. Tanjung Sakti Pumu	12	2	14	2	1	3	1	0	1	0	0	0	18
13	Kec. Merapi Barat	13	0	13	3	1	4	1	0	1	0	0	0	18
14	Kec. Pseksu	9	0	9	3	0	3	1	0	1	0	0	0	13
15	Kec. Gumay Talang	6	0	6	1	1	2	1	1	2	0	0	0	10
16	Kec. Pagar Gunung	16	0	16	2	1	3	1	0	1	0	0	0	20
17	Kec. Merapi Timur	16	1	17	2	1	3	2	0	2	1	0	1	23
18	Kec. Gumay Ulu	7	0	7	2	0	2	1	0	1	0	0	0	10
19	Kec. Merapi Selatan	5	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	7
20	Kec. Tanjung Tebat	11	0	11	2	0	2	1	0	1	0	0	0	14
21	Kec. Muara Payang	8	0	8	1	1	2	1	0	1	0	0	0	11
22	Kec. Sukamerindu	6	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
23	Kec. Mulak Sebingkai	5	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7
24	Kec. Lahat Selatan	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10

Sumber: Kemendikbud, 2021

Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Melalui pendidikan umum pemerintah dapat meningkatkan persediaan buruh efektif dan kapasitas produktif bangsa, serta lembaga latihan yang diperlukan untuk memberikan pengajaran kepada ahli mesin, montir listrik, tukang, perawat, guru, penyuluh

pertanian dan lain-lain. Pendidikan tinggi dan lembaga penelitian didirikan untuk mencetak dan meningkatkan jumlah dokter, administrator, insinyur dan semua jenis personil terlatih. Program pendidikan pada usaha menjalin kesatuan bangsa pada umumnya, memanfaatkan energi rakyat dan membangun bangsa dan sumber daya manusia di seluruh negeri, investasi dalam mendidik massa sama juga produktifnya. Galbraith (dalam Jhingan,1992: 550) berpendapat" Menolong petani dan pekerja dari kebutahurufan mungkin merupakan suatu tujuan tersendiri, tetap juga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan bagi setiap bentuk kemajuan pertanian. Dipandang secara demikian, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif". Dalam melihat perkembangan suatu wilayah dari segi pendidikan, alternatif yang digunakan untuk mengukur perkembangan adalah rasio banyaknya 33 pelajar pada jenjang SLTP, yaitu banyaknya pelajar grup usia (13-15 tahun) sebagai indikator pendidikan(Hill dan Williams, 1985: 191-195).

5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama

Tabel Sebaran Responden Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Islam	370	96,86
2.	Katolik	3	0,79
3.	Budha	4	1,05
4.	Khong Hu Chu	5	1,31
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut agama responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 96,86% beragama Islam, kemudian 1,05% beragama Budha, lalu 1,31% beragama Khong Hu CU, dan masyarakat yang beragama Katolik sebesar 0,7%. responden dalam kegiatan ini

telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanjung Sakti Pumi	35 927	-	200	-	-
Tanjung Sakti Pumu	14 600	-	100	-	-
Kota Agung	13 669	-	-	-	-
Mulak Ulu	17 050	-	-	-	-
Tanjung Tebat	9 680	-	-	-	-
Mulak Sebingkai	...	...	...	...	...
Pulau Pinang	12 867	-	-	-	-
Pagar Gunung	12 426	-	-	-	-
Gumay Ulu	9 923	-	-	-	-
Jarai	22 870	-	-	-	-
Pajar Bulan	24 985	-	-	-	-
Muara Payang	8 763	-	-	-	-
Sukamerindu	8 062	-	-	-	-
Kikim Barat	17 794	326	183	6	4
Kikim Timur	31 485	100	301	-	-
Kikim Selatan	24 895	-	-	-	-
Kikim Tengah	15 500	95	-	-	-
Lahat	113 756	1 345	2 720	1 560	2 178
Gumay Talang	12 371	-	-	-	-
Lahat Selatan	...	...	...	...	...
Pseksu	9 531	-	-	-	-
Merapi Barat	25 800	70	-	-	-
Merapi Timur	21 192	218	-	6	-
Merapi Selatan	8 543	-	-	-	-
Kabupaten Lahat	**471 689**	**2 154**	**3 504**	**1 572**	**2 182**

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Masyarakat Lahat kini paling banyak pemeluk Agama Islam, walaupun demikian sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Di antara upacara adat yang terpenting ialah yang berkaitan dengan pengerjaan sawah, yang disebut Sedekah Rame. Tujuannya ialah agar padi yang ditanam selalu dilindungi oleh Tuhan YME dan banyak hasilnya. Dalam upacara ini terdapat tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan, diantaranya meminta ijin kepada Jurai Tue, mengadakan pertemuan antara rie dan tua-tua kampung memberikan sesajen berupa pembakaran kemenyan, pembacaan kisah puyang pertama yang membuka areal persawahan, pembacaan doa, makan bersama serta menyelenggarakan upacara mubuh babak, yakni mengeringkan dan membersihkan saluran air serta menangkap ikan.

5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan

Gambar 5.1 : Responden Berdasarakan Pekerjaan

Berdasar Gambar di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pekerjaan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 38,3% sebagai petani, kemudian peringkat terendah sebagai karyawan swasta. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	29 919	13 365	43 284
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	34 854	8 564	43 418
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1 048	0	1 048
Buruh/Karyawan/Pegawai	34 521	20 504	55 025
Pekerja bebas	15 547	6 622	22 169

Pekerja keluarga/tak dibayar	11 397	32 770	44 167
Jumlah/Total	**127 286**	**81 825**	**209 111**

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Variabel perekonomian yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah diukur berdasarkan produktivitas, perubahan struktur ekonomi dan perubahan taraf hidup masyarakat yang akan mendorong terjadinya transformasi pada lapangan kerja, terutama perubahan mata pencaharian penduduk dari sektor primer, ke sektor sekunder dan tersier. Adanya peningkatan produksi komoditas wilayah tersebut mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat wilayah itu sendiri. Struktur ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah, dimana beralihnya mata pencaharian masyarakat suatu daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan keluarga dan pola konsumsi masyarakat, baik meningkat ataupun menurun.

Kabupaten Lahat sebagai daerah berbasis pertanian, lapangan kerja utama penduduknya adalah sektor primer (pertanian). Perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Lahat diindikasikan dengan terjadinya transformasi bidang pekerjaan dari primer ke sekunder dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, antara lain terjadinya alih lapangan pekerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebelum pemekaran wilayah, sebagian besar masyarakat (80%) bekerja pada sektor primer (pertanian), yaitu antara tahun 1990–1998, namun setelah tahun 2021 komposisi pekerja yang berada di kecamatan mengalami peralihan ke sektor sekunder. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pekerja sektor sekunder sebesar 50%. Pergeseran ini didorong oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di setiap kecamatan. Hal ini pula mencerminkan adanya peningkatan

pada sektor pembangunan serta mencerminkan adanya peningkatan modal, terutama dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Sebelum pemekaran wilayah kabupaten, hasil pertanian berupa beras relatif lebih besar, akan tetapi setelah pemekaran wilayah produksi hasil pertanian padi cenderung menurun. Pada akhirnya, hal tersebut mempengarui pendapatan dan tingkat konsumsi keluarga pada sebagian besar kecamatan, antara lain: Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Ulu Musi. Adapun untuk kecamatan lainnya cenderung mendatar, yang berarti kesejahteraan akibat adanya faktor nonekonomi, seperti pertambahan penduduk akan mendorong demand, sehingga harga pasar meningkat. Produksi kedua yang dominan di kecamatan dalam Kabupaten Lahat adalah produksi hasil perkebunan berupa biji kopi yang merupakan komoditas unggulan bagi Kabupaten Lahat. Dalam memenuhi permintaan pasar, biji kopi mempunyai harga yang cukup baik, sehingga hasil perdagangan kopi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi kecamatan di Kabupaten Lahat.

masyarakat Lahat mayoritas tetap sebagai petani sebagai penopang ekonomi masyarakat. Hal inisenada dengan analisis unsur kegiatan sosial ekonomi tidak pelak lagi sebagai faktor sangat penting didalam memacu proses pertumbuhan kota, karena banyak dari pesatnya pembangunan suatu daerah bertolak dari jumlah dan intensitas kegitan sosial ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Kegiatan sosial ekonomi secara fisik dapat dikenali melalui struktur penggunaan lahan. Setiap kawasan yang dicirikan oleh kegiatan sosial ekonomi relatif besar akan terlihat dari intensitas guna lahan yang tinggi. Pertumbuhan Kota Lahat yang diawali sekitar pusat kota, tampaknya tidak memiliki struktur yang jelas dari perkembangan kota, akibat kegiatan sosial-ekonomi kota selalu mengacu kepada konsep efisiensi ruang, yaitu memanfaatkan keuntungan dari kondisi ruang yang ada.

Kecenderungan berkonsentrasi (berkelompok) ini menunjukkan gejala yang akan terus berlangsung, hal tersebut terlihat dari adanya perembetan dan perluasan kegiatan ke daerah-daerah permukiman atau mengikuti jaringan jalan utama, sepanjang masih dapat diperoleh keuntungan aksesibilitas. Sebagai contoh, meluasnya kegiatan komersial di sepanjang jalan Jl. Mayor Ruslan, Jl. K.Komar, Jl. Pasar Bawah, Jl. Inspektur Yazid, Jl. Kaptein Zein Ali, Jl. Amir Hamzah, Jl. RE. Martadinata dan Jl. Prof. Asrul Salim. Apabila kegiatan komersial ini dibiarkan berkembang mengikuti kecenderungan, maka pada masa yang akan datang kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dikarenakan pada suatu saat akan tercapai batas optimal (optimum size). Brian Goodall (1972) mendefinisikan batas optimal sebagai proses pertumbuhan yang stagnan dan tidak layak untuk kehidupan dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinu merupakan suatu faktor utama yang mempengarui perkembangan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang dapat diukur dan obyektif, adanya perluasan tenaga kerja, modal, serta volume perdagangan dan konsumsi, perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga. (Jhingan, 1983). Kutnets (dalam Jhingan, 1983: 72-84) menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasari pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebagainya: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita; laju kenaikan perkapita yang tinggi diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk; (2) Peningkatan produktivitas; pertumbuhan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju produk perkapita sebagai akibat adanya perbaikan kualitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; ditandai dengan peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa,

perubahan dalam skala unitunit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan yang ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan; (5) Ekspansi negara maju; pertumbuhan ini ditandai dengan revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi; dam (6) Arus barang, modal, dan orang antarbangsa; pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan migran akibat mudahnya angkutan antarbenua.

Ekonomi Makro dalam Perkembangan Wilayah Ruang lingkup ekonomi makro meliputi tingkat harga secara umum (indek harga), serta yang berkenaan dengan pendapatan nasional, investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan pembangunan yang terjadi digerakkan oleh adanya investasi (Syamsudin, Ahmad dan Marzuki, 2007: 1-4). Investasi sebagai pendayagunaan diartikan sumber daya hari ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Pertumbuhan investasi yang terjadi serta keuntungan yang berpengaruh secara luas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

Ekonomi Mikro dalam Perkembangan Wilayah Perkembangan wilayah ekonomi mikro menitikberatkan secara individual pada pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan dan faktor-faktor produksi; tenaga kerja dan modal sampai pada keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan mata rantai perkembangan ekonomi wilayah. Aktivitas perekonomian masyarakat pada sektor riil akan meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ekonomi basis (Ricardson dalam Tarigan, 2005: 55-56). Hal ini merupakan aktivitas ekonomi mikro yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

Tabel 5.10 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

No	Penghasilan perbulan	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Tidak Berpenghasilan tetap	54	14,1
2.	<Rp.1.000.000	31	8,2
3.	Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000	159	41,6
4.	Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000	93	24,3
5.	> Rp.3.000.000	43	11,4
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pendapatan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 41,6% berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000. sedangkan 24,3% berpenghasilan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. sebanyak 11,4% berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000. serta sebanyak 8,2% berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000. dan sebanyak 14,1% masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap. Data responden di atas bisa diselaraskan dengan tabel pengeluaran masyarakat di bawah ini.

Tabel 5.1 1 perkapita masyarakat di Kabupaten Lahat

Golongan Pengeluaran (Rp) **(1)**	**2019** **(2)**	**2020** **(3)**
< 150 000	0.00	-
150 000–199 999	0.24	-
200 000–299 999	1.35	0.82
300 000–499 999	21.01	15.50
500 000–749 999	26.97	32.65
750 000–999 999	13.76	14.98
1 000 000–1 499 999	19.93	19.42

> 1 500 000	16.72	16.64
Jumlah/Total	**100,00**	**100**

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

5.4. Perhitungan IKLI

Tabel 5. 1 Perhitungan IKLI

No	Pertanyaan	Indeks						RERATA
		ketersediaan	Kualitas	Kesesuaian	Efektivitas pemanfaatan	Penyerapan tenaga Kerja	Kontribusi Ekonomi	
1	jalan dan jembatan yang berkualitas;	62,59	52,16	61,07	73,22	55,30	64,23	61,43
2	transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	65,88	64,48	62,87	57,80	41,19	58,48	58,45
3	infrastruktur air bersih;	44,84	60,80	47,18	46,60	51,08	60,51	51,83
4	infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	65,91	59,03	59,90	63,82	61,87	67,53	63,01
5	infrastruktur perumahan	50,24	63,04	50,01	50,94	51,63	57,54	53,90
RERATA		57,89	59,90	56,21	58,48	52,21	61,66	**57,72**

Sumber: Hasil Lapangan 2022

Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Lahat secara keseluruhan memiliki kategori “CUKUP”.

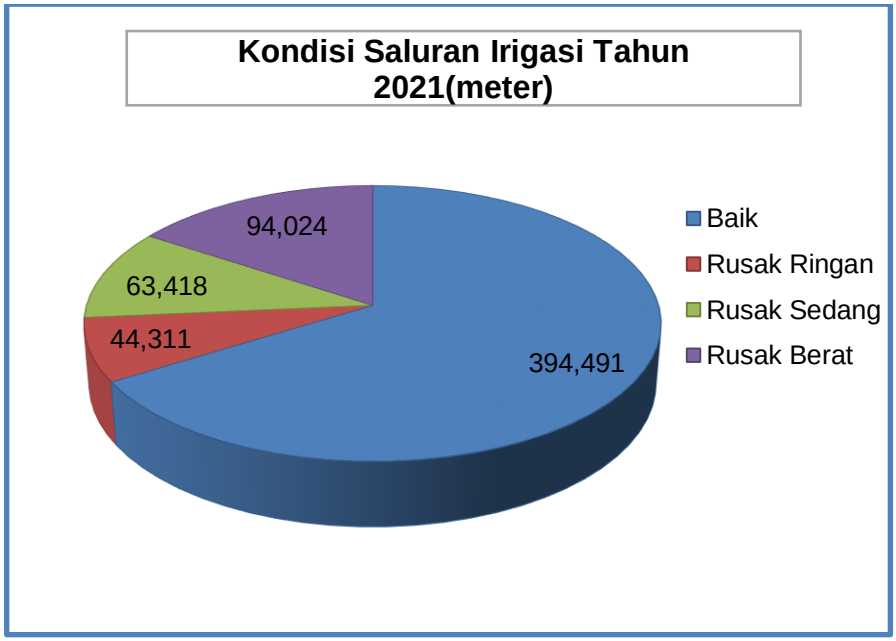

Gambar 6. 1 Kondisi Saluran Irigai Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa kondisi saluran irigasi primer di Kabupaten Lahat pada tahun 2021 sebesar 66% dari total keseluruhan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 pembangunan nasional terus dilaksanakan demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan moderenisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan. Secara yuridis formal keberadaan desa diakui dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. Sumber dana yang berasal dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 terdiri dari: Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, hasil aset, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagiandari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan pendapatan lain yang sah.

Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Lahat yaitu dengan mengoptimalkan anggaran dari berbagai sumber, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lahat: “Mengenai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Lahat ini diberikan anggaran, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, PNPM dan Swadaya masyarakat. Karena memang fungsi anggaran dalam pembangunan itu sangat penting agar pembangunan dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran”1 Dalam mengatur keuangan desa tersebut Bupati Lahat mengeluarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan dari pengelolaan tersebut diberikan kewenangan

untuk mengatur seberapa besar pengeluaran dana tersebut. Untuk pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara salah satunya adalah pembagian rasio keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Beberapa tahun terakhir tentang perkembangan pembangunan fisik dari tahun 2010, 2011, dan 2012 bahwa lingkup masalah pembangunan yang dirasakan masih transparan, dan juga kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang sarana dan prasarana.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Namun demikian hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah pedesaan maupuan antar desa dan kota. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program lainnya. Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat, yaitu:3 bahwa strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan;
2. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;
3. Mengembangkan jalan primer sebagai jalur penghubung kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar pedesaan serta antar pedesaan dengan perkotaan;
4. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani guna meningkatkan akses jalur dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi;

5. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan;
6. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dengan dibangunnya sarana transportasi (dalam hal ini infrastruktur desa), kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah untuk dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sekalipun sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Dengan demikian diperlukan suatu strategi pembangunan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Perbaikan akses jalan bagi masyarakat desa di Kabupaten Lahat menjadi penting karena desa tersebut sebagai sentra pertanian membutuhkan infrastruktur jalan yang baik untuk memperlancar aksesibilitas masyarakat khususnya dalam hal pemasaran hasil-hasil pertanian. Dengan demikian perbaikan akses jalan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan aksesibilitas masyarakat yang dapat dilihat dari kelancaran arus barang dari dan ke desa di Kabupaten Lahat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya perbaikan akses jalan dilakukan. Dengan semakin lancarnya arus transportasi tersebut akan mengurangi biaya dan waktu pengangkutan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan dalam pembangunan perdesaan. Upaya-upaya itu

telah menghasilkan berbagai kemajuan signifikan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak juga wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Dengan demikian perlu adanya kebijakan percepatan dan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka kegiatan percepatan pembangunan perdesaan, akan terus dilakukan berbagai program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu adanya kesadaran bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan penopang yang kokoh atau fondasi pada pembangunan di wilayah perdesaan.

Kemiskinan yang terjadi di perdesaan ditimbulkan karena adanya masalah ekonomi dan juga kondisi fisik daerahnya yang terpencil, serta keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk rincian Indeks masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut:

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KECAMATAN		Bandar	Bareng	Diwek	Gudo	Jogoroto	Lahat	Kabuh	Kesamben	Kudu	Megaluh
KETERSEDIAAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	71,9	69,4	66,2	69,4	60,4	77,0	67,9	54,5	50,0	66,7
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	75,0	56,3	58,3	63,9	57,1	62,0	75,0	80,6	75,0	70,8
	Konversi	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	3. infrastruktur air bersih;	25,0	58,3	25,0	25,0	37,5	74,0	60,7	31,8	70,0	25,0
	Konversi	Sedang	Cukup	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Cukup	Sedang	Baik	Sedang
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	82,1	62,5	64,6	72,2	66,7	65,2	57,1	59,1	55,0	70,8
	Konversi	Baik Sekali	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik
	5. infrastruktur perumahan	46,4	61,1	58,8	30,6	58,3	82,0	32,1	45,5	25,0	25,0
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	Baik Sekali	Sedang	Cukup	Sedang	Sedang
KUALI	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	59,4	55,6	57,4	50,0	54,2	60,0	53,6	47,2	50,0	62,5

	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	75,0	56,3	66,7	69,4	60,7	62,0	71,4	72,2	75,0	58,3
	Konversi	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup
	3. infrastruktur air bersih;	NA	58,3	NA	NA	50,0	69,0	62,5	75,0	75,0	50,0
	Konversi	Baik Sekali	Cukup	Baik Sekali	Baik Sekali	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	67,9	56,3	60,4	63,9	58,3	64,8	53,6	54,5	55,0	54,2
	Konversi	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
	5. infrastruktur perumahan	75,0	63,9	64,1	75,0	61,4	77,0	41,7	75,0	NA	25,0
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik Sekali	Sedang
KESESUAIAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	65,6	58,3	55,9	61,1	56,3	68,0	67,9	57,5	55,0	62,5
	Konversi	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	75,0	53,1	60,0	61,1	60,7	65,0	67,9	72,2	75,0	66,7
	Konversi	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	3. infrastruktur air bersih;	32,1	66,7	25,0	25,0	50,0	70,0	64,3	30,0	65,0	25,0

	Konversi	Sedang	Baik	Sedang	Sedang	Cukup	Baik	Baik	Sedang	Baik	Sedang
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	50,0	56,3	60,4	66,7	62,5	60,2	71,4	59,1	55,0	66,7
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Baik
	5. infrastruktur perumahan	50,0	58,3	58,8	34,4	52,1	72,0	35,7	45,5	25,0	25,0
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Sedang	Cukup	Sedang	Sedang
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	78,1	66,7	67,6	77,8	66,7	73,0	82,1	84,1	75,0	87,5
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik	Baik Sekali
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	71,9	50,0	61,7	61,1	58,3	69,0	53,6	61,1	50,0	58,3
	Konversi	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup
	3. infrastruktur air bersih;	25,0	66,7	25,0	30,6	50,0	67,0	71,4	30,0	62,5	25,0
	Konversi	Sedang	Baik	Sedang	Sedang	Cukup	Baik	Baik	Sedang	Baik	Sedang
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	60,7	56,3	60,4	69,4	66,7	69,3	67,9	59,1	55,0	83,3
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik Sekali
	5. infrastruktur perumahan	53,6	63,9	60,3	43,8	54,2	76,0	32,1	43,2	25,0	25,0

	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Sedang	Cukup	Sedang	Sedang
PENYERAPAN TENAGA TENAGA KERJA	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	46,9	52,8	57,4	44,4	58,3	71,6	50,0	68,2	70,0	54,2
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	39,3	50,0	60,7	30,6	50,0	55,3	32,1	36,1	25,0	33,3
	Konversi	Sedang	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	3. infrastruktur air bersih;	NA	66,7	NA	NA	50,0	60,5	66,7	25,0	66,7	NA
	Konversi	NA	Baik	NA	NA	Cukup	Cukup	Baik	Sedang	Baik	NA
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	60,7	59,4	62,5	75,0	66,7	76,4	39,3	50,0	65,0	75,0
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Sedang	Cukup	Baik	Baik
	5. infrastruktur perumahan	58,3	55,6	61,7	75,0	52,3	72,5	25,0	62,5	NA	NA
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Sedang	Baik	NA	NA
KONTRIBUSI PENGURANGAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	62,5	63,9	60,3	72,2	60,4	79,0	71,4	75,0	75,0	75,0
	Konversi	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	64,3	50,0	60,7	46,9	58,3	77,0	53,6	66,7	55,0	58,3
	Konversi	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup

	3. infrastruktur air bersih;	NA	66,7	NA	NA	50,0	70,0	66,7	75,0	75,0	NA
	Konversi	NA	Baik	NA	NA	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	NA
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	67,9	62,5	60,4	80,6	66,7	77,1	60,7	65,9	65,0	87,5
	Konversi	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik Sekali
	5. infrastruktur perumahan	58,3	58,3	59,4	75,0	57,5	76,0	25,0	75,0	NA	NA
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Sedang	Baik	NA	NA
RERATA		**59,2**	**59,3**	**57,0**	**57,4**	**57,1**	**69,9**	**56,0**	**57,9**	**58,1**	**54,5**
Konversi		**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Baik**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**

No.		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Rerata
KECAMATAN		Mojo agung	Mojo warno	Ngoro	Ngusikan	Perak	Peterongan	Plan daan	Ploso	Sumo bito	Tembe lang	Wono salam	
KETERSEDIAAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	56,8	68,3	52,5	58,3	64,3	59,4	62,5	54,2	63,3	56,3	65,0	**62,6**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Baik	**Baik**
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	47,5	55,4	65,0	83,3	75,0	53,1	62,5	75,0	61,4	81,3	50,0	**65,9**
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik Sekali	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Cukup	**Baik**
	3. infrastruktur air bersih;	50,0	65,0	30,0	25,0	25,0	64,3	50,0	75,0	50,0	25,0	50,0	**44,8**
	Konversi	Cukup	Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	**Cukup**
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	67,5	63,9	80,0	83,3	75,0	53,1	41,7	56,3	67,5	82,1	58,3	**65,9**
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik Sekali	Cukup	**Baik**
	5. infrastruktur perumahan	55,0	63,3	47,5	25,0	50,0	71,9	25,0	66,7	63,3	62,5	60,0	**50,2**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Cukup	**Cukup**
KUALITAS	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	50,0	53,3	40,0	50,0	46,4	46,4	50,0	45,8	56,7	46,9	60,0	**52,2**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	**Cukup**

	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	47,5	53,6	75,0	75,0	67,9	53,6	75,0	54,2	52,1	75,0	58,3	**64,5**
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	**Baik**
	3. infrastruktur air bersih;	50,0	65,0	75,0	NA	NA	57,1	50,0	75,0	50,0	NA	50,0	**60,8**
	Konversi	Cukup	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik Sekali	Cukup	**Cukup**
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	60,0	63,9	67,5	75,0	53,6	53,6	37,5	58,3	62,5	60,7	58,3	**59,0**
	Konversi	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	**Cukup**
	5. infrastruktur perumahan	60,0	60,0	75,0	NA	75,0	65,6	37,5	70,0	61,7	75,0	60,0	**63,0**
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik Sekali	Baik	Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Cukup	**Baik**
KESESUAIAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	52,5	60,0	67,5	66,7	57,1	59,4	70,8	58,3	53,3	68,8	60,0	**61,1**
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	**Baik**
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	50,0	50,0	62,5	75,0	75,0	50,0	62,5	66,7	50,0	71,9	50,0	**62,9**
	Konversi	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Baik**
	3. infrastruktur air bersih;	50,0	60,0	33,3	41,7	35,0	56,3	58,3	75,0	50,0	28,1	50,0	**47,2**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Sedang	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	**Cukup**

	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	57,5	63,9	60,0	75,0	60,7	46,4	41,7	58,3	60,0	67,9	58,3	**59,9**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**
	5. infrastruktur perumahan	55,0	65,0	50,0	25,0	42,9	78,1	25,0	75,0	55,0	62,5	60,0	**50,0**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Sedang	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	59,1	65,0	77,5	66,7	78,6	68,8	83,3	62,5	65,0	87,5	65,0	**73,2**
	Konversi	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	**Baik**
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	50,0	53,6	52,5	58,3	60,7	50,0	56,3	66,7	52,1	68,8	50,0	**57,8**
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**
	3. infrastruktur air bersih;	50,0	55,0	27,8	41,7	33,3	59,4	62,5	70,8	50,0	25,0	50,0	**46,6**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	**Cukup**
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	57,5	63,9	75,0	75,0	64,3	64,3	41,7	50,0	60,0	82,1	58,3	**63,8**
	Konversi	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik Sekali	Cukup	**Baik**
	5. infrastruktur perumahan	52,5	63,3	47,5	25,0	42,9	75,0	25,0	79,2	56,7	65,6	60,0	**50,9**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	Sedang	Cukup	Baik	Sedang	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**

PENYERAPAN TENAGA TENAGA KERJA	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	50,0	57,1	35,0	58,3	42,9	64,3	54,2	50,0	53,3	62,5	60,0	**55,3**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	47,5	53,8	35,0	25,0	33,3	35,0	50,0	41,7	50,0	31,3	50,0	**41,2**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Cukup	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	**Cukup**
	3. infrastruktur air bersih;	50,0	62,5	25,0	NA	NA	33,3	68,8	40,0	50,0	NA	50,0	**51,1**
	Konversi	Cukup	Baik	Sedang	NA	NA	Sedang	Baik	Sedang	Cukup	NA	Cukup	**Cukup**
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	65,0	66,7	63,9	58,3	67,9	54,2	50,0	50,0	60,0	75,0	58,3	**61,9**
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	**Baik**
	5. infrastruktur perumahan	52,5	60,0	25,0	25,0	50,0	59,4	25,0	56,3	55,0	50,0	60,0	**51,6**
	Konversi	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	**Cukup**
KONTRIBUSI PENERIMAAN	1. jalan dan jembatan yang berkualitas;	50,0	58,9	45,0	66,7	53,6	65,6	62,5	66,7	53,3	71,9	60,0	**64,2**
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Baik**
	2. transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	47,5	51,9	45,0	58,3	58,3	67,9	68,8	70,8	50,0	68,8	50,0	**58,5**
	Konversi	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**

	3. infrastruktur air bersih;	50,0	62,5	25,0	NA	NA	56,3	75,0	75,0	50,0	NA	50,0	**60,5**
	Konversi	Cukup	Baik	Sedang	NA	NA	Cukup	Baik	Baik	Cukup	NA	Cukup	**Cukup**
	4. infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);	62,5	66,7	77,5	66,7	71,4	71,4	45,8	62,5	62,5	78,6	58,3	**67,5**
	Konversi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Cukup	**Baik**
	5. infrastruktur perumahan	52,5	63,3	45,0	NA	50,0	68,8	25,0	62,5	53,3	70,8	60,0	**57,5**
	Konversi	Cukup	Baik	Cukup	NA	Cukup	Baik	Sedang	Baik	Cukup	Baik	Cukup	**Cukup**
RERATA		**53,5**	**60,5**	**52,8**	**55,3**	**55,9**	**58,7**	**51,5**	**62,3**	**55,9**	**63,0**	**56,3**	**57,7**
Konversi		**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Baik**	**Cukup**	**Baik**	**Cukup**	**Cukup**

Dari tabel di atas diketahui indeks kepuasan layanan infrastruktur untuk masing-masing kecamatan. Dikatahui kecamatan Lahat Kota memperoleh skor tertinggi yakni 69,9 sehingga bermakna layanan infrastruktur berkategori baik. Kategori yang sama juga di kecamatan Tembelang yakni sebesar 63 dan Ploso sebesar 62,3. Dari ke-21 Kecamatan terdapat 3 kecamatan (14,3%) yang berkategori baik dan 18 lainnya berketegori cukup (85,7%). Untuk rerata se-kabupaten sebesar 57,7 (cukup).

Bab VI Penutup

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Lahat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Salah satu unsur utama kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi adalah penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti: ketenagalistrikan, penyediaan air minum, telekomunikasi, sarana jalan, dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur sebagai komoditas yang berdimensi publik (public goods) merupakan tanggung jawab pemerintah. Artinya, pemerintah terlibat secara langsung di dalam penyediaan infrastruktur sebagai pelengkap di dalam sistem ekonomi yang berlangsung di dalam suatu kelompok masyarakat atau negara.

Pengelolaan infrastruktur yang kurang optimal, mempunyai implikasi bahwa provinsi dengan kualitas infrastruktur rendah akan sulit berkompetisi dalam menarik investor asing dibandingkan provinsi lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas agenda pembangunan di Kabupaten Lahat, yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan infrastruktur di Lahat antara lain meliputi : penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembukaan keterisolasian wilayah, perbaikan dan peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur irigasi untuk pertanian dan air baku.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastuktur merupakan modal yang sangat di butuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungan kegitan antar daerah/wilayah, infrastruktur fisik mempunyai keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan system infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Satriawan, Mulyo dan Fitriadi 2011, *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal,*

Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

Asnudin 2009, *Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Degan Perlibatan Masyarakat setempat,*

Jurnal SMARTek, Vol. 7, No. 4, November 2009: 292-300

Benjamin 2011, *Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastructure Support program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri,* Jurnal Ilmiah administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, Juli-Desember 2011, ISSN : 2087-0825

Hermek Malik 2008, *Menguak Ketertinggal Meretas Jalan Baru,* Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama dengan Kementertian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, ISBN 978-26-9618- 9

Nasrullah Jamaludin 2015, *Sosiologi Perdesaan,* Bandung: CV. Pustaka Setia

Nawari 2010, *Analisis Regresi dengan MS Excel 2010 dan SPSS 17,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Putra dan Djalante 2016, *Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 6 No. 1. Januari 2016, ISSN : 2087-9334

Rahardjo Adisasmita 2013, *Pembangunan Perdesaan,* Yogyakarta: Graha Ilmu

Roberth J. Kodoatie 2005, *Pengantar Manajemen infrastruktur,* Yogyakarta: Pustaka Belajar Sa”ad dan Santoso 2015, *Tipologi Kecamatan Tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah,* Jurnal

Teknik ITS Vol. 4 No. 2, (2015), ISSN : 2337-3539

Saepul Hamdi 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.